

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN
TUNJANGAN TERPENCIL DALAM PENINGKATAN
PROFESIONAL GURU DI KECAMATAN
KAYAN HULUKABUPATEN SINTANG**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

GUSTIANA

NIM. 500022416

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2015

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe and analyze the distribution of allowance remote policy implementation in order to promote the professionalism of teachers in district upstream Kayan Sintang.

Efforts to improve the quality of education, led to the establishment of product quality education that must be implemented thoroughly, both on the management aspects of education, learning implementation, monitoring, evaluation, and policy benefits teachers. Through the role of the teacher is the embodiment of a professional educator with the primary task of educating, teaching, guiding, directing, train, assess, and evaluate students on childhood education, primary and secondary education and to carry out these tasks effectively and professionally, then the teacher must have pedagogical, personality, social and professional. This study the author uses descriptive research with the aim to describe the different situations the distribution policy of special allowances of teachers in the country isolated on Elementary School Kayan District Upstream Sintang District, at one time or equivalent salary 1.35 million. Teacher entitled the allowance if it is working in selected schools for a minimum of two years, the number of working hours at least 24 hours/week. Feasibility teachers involved in the field associated with the policy of distribution of allowances remote, Sintang District and has decent and show the behavior as an educator and still authoritative without prejudice attitude maternal or paternal in order to attempt to achieve the planned objectives in accordance with the vision and mission of the school to realize the quality of the quality of learners.

Keywords: quality of education, professional teachers, teacher allowance remote.



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

N a m a : GUSTIANA
NIM : 500022416
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Judul TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN TUNJANGAN
TERPENCIL DALAM RANGKA PENINGKATAN PROFESIONAL
GURU DI KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN
SINTANG

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana,
Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : 25 Agustus 2015
Waktu : 10.00-12.00 WIB

Dan telah dinyatakan **LULUS**:

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji: Prof. Dr .Udin.S. Winataputra,MA

Penguji Ahli : Andi FeftaWijaya, MDA, Ph.D

Pembimbing I : Dr. Yulius Yohanes,M.Si

Pembimbing II : Prof .Dr. Udin S. Winataputra,MA

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “ IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN TUNJANGAN TERPENCIL DALAM RANGKA PENINGKATAN PROFESIONAL GURU DI KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN SINTANG” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan Adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pontianak,

Yang Menyatakan,

METERAI
TEMPEL

603F9ADF509307861

6000
ENAM RIBU RUPIAH



(GUSTIANA)

NIM. 500022416

PERSETUJUAN TAPM

JUDUL TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN TUNJANGAN TERPENCIL, RANGKA PENINGKATAN PROFESIONAL GURU DI KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN SINTANG

PENYUSUN TAPM : GUSTIANA

NIM : 500022416

PROGRAM STUDI : MEGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HARI/TANGGAL : SELASA, 25 AGUSTUS 2015

Menyetujui :

Pembimbing II,

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, M.A
NIP. 19451007 197302 1 001

Dr. Yulius Yohanes, M.Si
NIP. 19640527 199202 1 001

Penguji Ahli

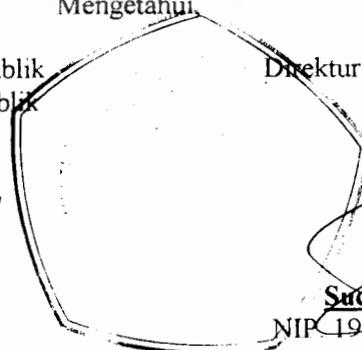
Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph. D
NIP. 19670217 199103 1 010

Mengetahui

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik
Program Magister Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana

Dr. Darmanto, M.ED
NIP. 19591027 198603 1 003



Suciati, M.Sc. Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : GUSTIANA
 NIM : 500022416
 Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI NEGARA
 Judul TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN
 TUNJANGAN TERPENCIL, RANGKA
 PENINGKATAN PROFESIONAL GURU DI
 KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN
 SINTANG

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Implementasi Kebijakan Penyaluran Tunjangan Terpencil, Rangka Peningkatan Profesional Guru di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2015
 Waktu : 10.00 s.d 12.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, M.A

Penguji Akhir

Nama : Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D

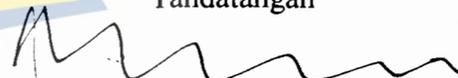
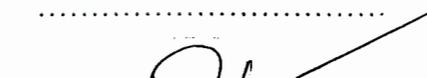
Pembimbing I

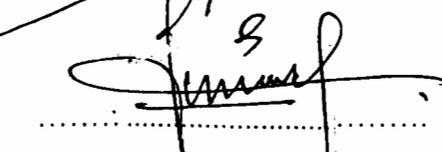
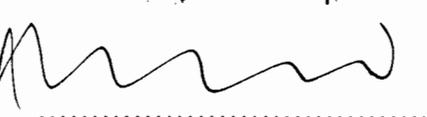
Nama : Dr. Yulius Yohanes, M.Si

Pembimbing II

Nama : Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, M.A

Tandatangan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN TUNJANGAN TERPENCIL, TERLUAR, TERBELAKANG DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU DI KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN SINTANG”. Penulis sajikan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata 2 pada Program Universitas Terbuka Jakarta.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu tidak berlebihan di dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Yulius Yohanes, M.Si, selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
2. Prof.Dr.Udin.S.Winatapura,MA selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan penulis tesis ini.
3. Ketua Pengelola Universitas Terbuka Pontianak beserta Dosen dan Staf yang telah membantu penulis selama dalam masa perkuliahan.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dan Guru di SD Negeri 21 Manaluk yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.

5. Camat Kayan Hulu Bapak.T.Manurung,S.Sos yang telah memberi izin kepada peneliti untuk meneliti di kecamatan Kayan Hulu.
6. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Pontianak, yang telah memberikan bantuan baik moril maupun spritual kepada penulis sehingga terselesainya penulisan tesis ini.
7. Kepada suami, orang tua dan Semua anggota keluarga yang telah mendukung dan memberi motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, yang disebabkan terbatasnya kemampuan penulis. Untuk itu, penulis dengan kerendahan hati mengharapkan kritikan serta saran-saran positif dari berbagai pihak demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Mudah-mudahan tesis ini bermanfaat terutama bagi penulis.

Akhirnya atas segala bantuan yang telah diberikan Bapak/Ibu/Saudara kepada penulis agar mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa dan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat.

Pontianak, April 2015

Penulis

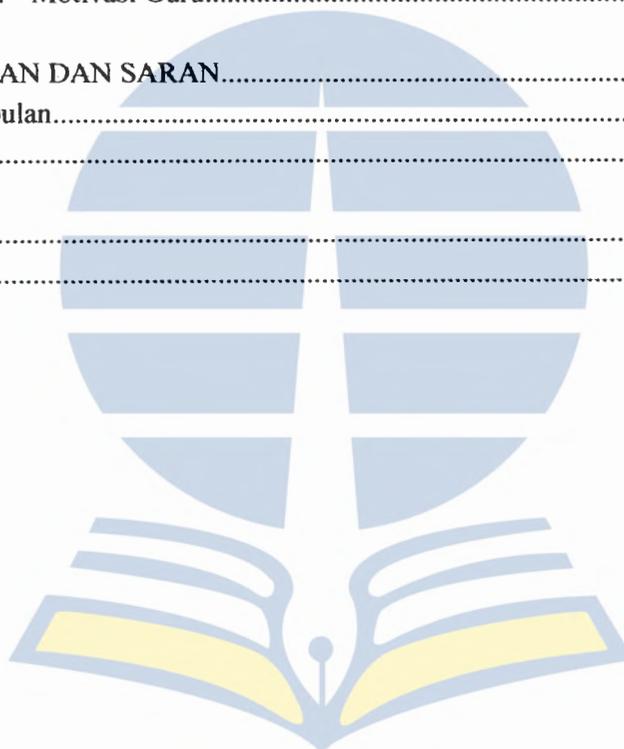

GUSTIANA
NIM. 500022416

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	
ABSTRAK.....	
RINGKASAN TESIS.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Masalah Penelitian.....	1
1. Latar Belakang Penelitian.....	1
2. Ruang Lingkup Masalah.....	12
3. Perumusan Masalah.....	13
B. Tujuan Penelitian.....	14
C. Manfaat Penelitian.....	14
1. Manfaat Teoritis.....	14
2. Manfaat Praktis.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A Implementasi Kebijakan.....	16
B Kebijakan Publik.....	22
C. Kinerja.....	28
D. Penelitian Terdahulu.....	35
E. Kerangka Berfikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subjek Penelitian.....	39
D. Tehnik dan Alat Pengumpul Data.....	40
E. Analisis Data.....	42
F. Teknik Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Kabupaten Sintang.....	46
B. Gambaran Umum Kec. Kayan Hulu.....	50
1. Geografis Kecamatan Kayan Hulu.....	50
2. Pemerintahan.....	55

3. Sosial.....	55
4. Pertanian.....	58
5. Industri dan Pertanian.....	61
6. Transportasi.....	62
C. Pembahasan.....	65
1. Evaluasi Proses Implementasi Tunjangan Guru Terpencil.....	65
a. Kelayakan Guru.....	65
b. Proses dan Mutu Pendidikan.....	70
c. Martabat Guru.....	76
d. Profesionalisme Guru.....	81
2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Tunjangan Guru Terpencil.....	81
a. Kemampuan Guru.....	81
b. Penempatan Guru.....	91
c. Kewenangan dan Tanggungjawab Guru.....	98
d. Motivasi Guru.....	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	113
Daftar Pustaka.....	115
Lampiran.....	



DAFTAR TABEL

Tabel	Nama	hal
1	Letak Geografis	49
2	Batas Administrasi Kecamatan	49
3	Luas Wilayah Kecamatan	50
4	Luas Lahan Sawah	51
5	Penggunaan Lahan	52
6	Keadaan Sekolah Dasar Negeri/Swasta	54
7	Fasilitas Kesehatan	55
8	Rata-rata Produksi	57
9	Luas Perkebunan	57
10	Ternak dan Unggas	58
11	Unit Usaha	59
12	Panjang Jalan Kabupaten	61
13	Panjang Jalan Kecamatan	61
14	Keadaan Bermotor	62
15	Nilai Ujian Siswa	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Masalah Penelitian

1. Latar Belakang Masalah

Administrasi publik dalam dunia pendidikan merupakan salah satu aspek yang terpenting bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu penempatan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan bermutu merupakan produk pendidikan dan merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara.

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, sehingga peningkatan mutu pendidikan, akan membawa perubahan bagi kesejahteraan bangsa baik secara regional maupun nasional. Khususnya secara regional peningkatan mutu pendidikan di Propinsi Kalimantan Barat meliputi:

1. Pemerataan dan Perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan.
 2. Peningkatan mutu pendidikan dan relevansinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman.
 3. Peningkatan manajemen pendidikan yang relevansi dan efisiensi
- (Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 2003 : 2)

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan tempat dilaksanakannya interaksi dari berbagai komponen pendidikan. Yang terkait dengan proses pembelajaran yang menghasilkan lulusan yang bermutu. Untuk menghasil mencapai tujuan yang telah ditentukan baik secara umum maupun tujuan setiap bidang pendidikan maka, tujuan umum pendidikan yang ingin dicapai telah ditetapkan dalam Tujuan Pendidikan Nasional UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Pasal 3 yaitu: "Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa Kepada tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab".

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas, kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan harus selalu diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah oleh pendidik selalu menempati posisi penting, sehingga komponen-komponen dalam proses belajar mengajar senantiasa mendapat perhatian utama. Hal ini berkaitan dengan salah satu tujuan Pembangunan Nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pendidikan yang diselenggarakan sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan suatu upaya sadar yang terus menerus berkelanjutan dan berkesinambungan. Pendidikan berpacu dengan perkembangan teknologi dan ilmu. Semakin pesat ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, membawa konsekuen semakin besarnya tuntutan yang

dialamatkan kepada pendidikan karena produk pendidikan harus senantiasa siap dan mampu menguasai serta memanfaatkan ilmu pengetahuan.

Berarti bahwa tuntutan akan pendidikan yang baik dan berkualitas akan selalu menjadi semacam “tuntutan yang abadi” karena hanya dengan pendidikan yang berkualitas maka produk pendidikan akan siap dan mampu menguasai ilmu dan teknologi dapat berhasil.

Pendidikan itu merupakan hak dan kewajiban bagi setiap individu laki-laki dan perempuan. Pendidikan itu menjadi tumpuan harapan (cita-cita) setiap orang yang cinta perbaikan, karena pendidikan itulah satu-satunya media untuk mengangkat derajat bangsa dan membangkitkan mereka (menyadarkan) untuk menuju tingkat kebahagiaan dan kesempurnaan.

Upaya peningkatan mutu pendidikan, bermuara pada terwujudnya produk pendidikan yang bermutu yang harus dilaksanakan secara menyeluruh, baik pada aspek manajemen pendidikan, pelaksanaan pembelajaran, pengawasan, penilaian, maupun kebijakan tunjangan guru.

Menurut pendapat Muhammad (1981:5) Pendidikan memiliki dua pengertian yaitu pengertian yang bersifat umum dan bersifat khusus. Pendidikan yang bersifat umum adalah setiap sesuatu memiliki pengaruh dalam pembentukan jasmani seseorang, akalnya dan ahlakinya, sejak dilahirkan hingga mati. Pendidikan dengan pengertian ini meliputi semua sarana, baik disengaja seperti pendidikan rumah tangga dan pendidikan sekolah; atau yang tidak disengaja, seperti pendidikan yang datang kebetulan, dari pengaruh lingkungan yang bersifat alamiah dan

kemasyarakatan dan lain-lain. Dengan demikian jelaslah bahwa Pendidikan merupakan sarana untuk dapat meningkatkan kecerdasan manusia dalam rangka upaya untuk mewujudkan harapan dan keinginan terkait dengan kesejahteraan yang dicita-citakan manusia.

Pendidikan di sekolah merupakan subsistem dalam administrasi publik yang mengatur pendidikan di sekolah secara formal. Di dalam sistem ini kegiatan seperti jam belajar-mengajar, baik itu mulai jam masuk sekolah sampai dengan jam pulang sekolah harus di atur dengan baik. Baik itu penyampaian materi yang tercantum dalam kurikulum dan yang diajarkan di sekolah tersebut harus diajarkan sesuai dengan jadwal program pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini bertujuan agar program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu sistem pendidikan sekolah perlu diterapkan oleh Guru dalam lingkungan sekolah, karena ini menyangkut dengan peningkatan mutu pendidikan.

Deputi Menko Kesra Bidang Pendidikan (Umar dalam Mukminin, 2003:1) menyatakan bahwa "proses pendidikan dalam suatu sistem perkolahan saat ini sesungguhnya belum menerapkan pembelajaran secara tuntas. Akibatnya, tidak sedikit siswa yang tidak menguasai materi pelajaran meskipun sudah dinyatakan tamat dari sekolah, tidak heran pula kalau mutu pendidikan secara nasional masih rendah". Pernyataan ini memberikan makna bahwa pembelajaran yang selama ini dilakukan dalam proses pendidikan dalam suatu sistem persekolahan siswa belum mampu menguasai materi pembelajaran dengan baik sehingga mempengaruhi mutu dan kualitas

2. Mengukur mutu pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah.madrasah
3. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan secara nasional, provinsi, kabupaten/kota, sekolah/madrasah, kepada masyarakat.

Dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional disebutkan juga fungsi dari Ujian Nasional adalah sebagai :

1. Alat pengendali mutu pendidikan secara nasional.
2. Pendorong peningkatan mutu pendidikan.
3. Bahan dalam menentukan kelulusan peserta didik.
4. Bahan pertimbangan dalam seksi penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu melalui surat keputusan Menteri Pendidikan mengeluarkan kebijakan tunjangan guru terampil untuk peningkatan profesionalisme guru sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan sebagai target yang ingin dicapai secara nasional.

Guru sebagai tenaga pendidik yang profesional merupakan agen pembelajaran yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,melakukan pembimbingan dan pelatihan. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik berfungsi mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berahlak mulia,sehat,berilmu,cakap kreatif,mandiri serta bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sebagai pengakuan terhadap profesional Guru berhak : memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan social. .Yang dimaksud dengan

penghasilan di atas kebutuhan minimum, meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan antara lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan maslahat yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Disamping gaji yang telah mereka terima selama ini pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagi guru yang bertugas di daerah khusus (daerah Terpencil, masyarakat adat terpencil, daerah perbatasan, pulau terluar, terbelakang terluar dan terisolir) pemerintah memberikan tunjangan khusus setara satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan, masa kerja dan kualifikasi yang sama, (UU No.14 tahun 2005 pasal 15 dan 18) disamping itu guru berhak mendapat tambahan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa dan penghargaan, pembayaran kesehatan atau bentuk kesejahteraan.

Menurut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 tahun 2012 tentang kriteria Daerah Khusus dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini adalah:

- a. Daerah yang terpencil atau terbelakang.
- b. daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan /atau
- c. pulau kecil dan terluar

mengamanatkan bahwa “Guru sebagai tenaga profesional berhak untuk memperoleh penghasilan diatas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Untuk itu, salah satuupaya memberi penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan guru adalah denganmemberikan tunjangan khusus kepada guru yang bertugas di daerah khusus”. Halini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 10 tentang Tunjangan Terpencil yangmenyatakan bahwa:“Guru yang ditugaskan oleh Pemerintah atau pemerintah daerahdi daerah khusus sesuai peraturan perundang-undangan diberi tunjangan khusussetiap bulan selama masa penugasan.Program pemberian tunjangan khusus masih berupa pemberian bantuankesejahteraan guru daerah khusus”.Saat ini Direktorat Jenderal Pendidikan Dasarsedang mengupayakan usulan tambahan anggaran pada APBNP untukmerealisasikan pemberian tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerahkhusus sebesar setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil.Kebijakan ini merupakan bukti bahwa Pemerintah secara terus-menerus berusahameningkatkan profesionalisme guru dan kesejahteraan guru.Guna menarik minat atau mempertahankan guru, pemerintah menyediakantunjangan khusus berupa bantuan kesejahteraan untuk guru di daerah terpencil,termasuk wilayah miskin atau rawan konflik, sebesar satu kali gaji atau setara1,35 juta rupiah. Guru berhak menerima tunjangan jika sudah bekerja di sekolahterpilih minimal selama dua tahun, dengan jumlah jam kerja paling sedikit 24 jam/minggu. Untuk tahun anggaran 2012, bantuan kesejahteraan diberikan kepada

35 guru jenjang pendidikan Dasar di Kecamatan Kayan Hulu berjalan baik dan lancar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, program peningkatan lulusan pendidikan secara regional cukup berhasil. Namun keberhasilan itu, tidak diikuti dengan peningkatan kualitas, terutama mutu lulusan pendidikan formal seperti dikemukakan Taufiq (1995:2) cenderung mengalami penurunan.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada tingkat SD merupakan program pemerintah belum dapat dicapai secara maksimal dengan disertai pembangunan berbagai sarana dan prasarana penunjang mulai dari gedung sekolah dan tenaga pendidik sampai pada fasilitas pendukung lainnya seperti ketersediaan buku paket dan materi pembelajaran yang belum tercapai.

Proses pendidikan di wilayah terpencil membawa harapan kepada anak didik dan orang tua siswa, dimana beban yang harus ditanggung untuk pendidikan akan sedikit lebih berkurang. Betapa tidak, berbagai biaya pendidikan seperti biaya pendaftaran, iuran bulanan, biaya ujian, maupun bahan pendukung lainnya hingga biaya praktik dan lainnya menjadi beban yang dipikul bersama antara pemerintah dan orang tua.

Bila ditelaah secara mendalam, proses penyaluran dana pendidikan untuk guru terpencil, terluar dan terbelakang selama ini kurang perencanaan yang matang. Dapat diasumsikan bahwa penyaluran dana guru tunjangan terpencil itu terkesan sangat buru-buru dimana dari 177 guru yang ada guru

tunjangan khusus guru terpencil pada SD Negeri di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang dan 2. faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan penyaluran tunjangan khusus guru terpencil di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang belum tercapai secara optimal”.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menemukan permasalahan yang dihadapi untuk dipecahkan khususnya yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Penyaluran Tunjangan Khusus Guru Terpencil di SDN Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses Implementasi Penyaluran Tunjangan khusus Guru Terpencil, di SDN Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang

C. Manfaat Penelitian

Hasil temuan pada saat penelitian dilakukan kiranya dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis

Diharapkan dalam hasil penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi publik. Yang terkait dengan Implementasi Penyaluran

Tunjangan Khusus Guru Terpencil, Kinerja Guru di SDN Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang.

b. Manfaat praktis

Bagi pihak instansi yang terkait diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu yang mana program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam membantu masyarakat tersebut dalam Implementasi kebijakan Penyaluran Tunjangan Terpencil, Kinerja Guru SDN, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan. Model implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan menjadi model yang semakin operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variable yang terkait dengan kebijakan. Terdapat tiga model implementasi kebijakan yang dianggap relatif operasional sehingga dapat direkomendasikan dalam proses implementasi kebijakan publik. Ketiga model itu adalah pertama, Model Hogwood & Gunn, yakni *The Top Down*. Kedua, Model Van Meter & Van Horn dengan *A Model of the Policy Implementation Pracess*. Ketiga, Model Mazmanian Sabatier yang disebut *A Framework for Implementation Analyicis*.

Dalam Model *Top Down Approach*, Hogwood & Gunn (dalam Wahab, 1997:71) mengemukakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna atau *perfect implementation* maka diperlukan 10 persyaratan, sebagai berikut.

Pertama ; kondisi eksternal yang dihadapi instansi pelaksana tidak akan menimbulkan yang serius. *Kedua* ; untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber daya yang cukup memadai. *Ketiga* ; perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. *Keempat* ; kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal. *Kelima* ; hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. *Keenam* ; hubungan saling ketergantungan harus kecil. *Ketujuh* ; pemahaman yang mendalam dan

kesepakatan terhadap tujuan. *Kedelapan* ; tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. *Kesembilan* ; komunikasi dan koordinasi yang sempurna. *Kesepuluh* ; pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Model Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter & Van Horn (1975) menekankan sifat kebijakan dalam setiap implementasi kebijakan serta menghubungkannya dengan isu kebijakan dan implementasi kebijakan dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan kinerja kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan ditekankan prosedur yang mengutamakan perubahan, kendala dan kepatuhan bertindak. Implementasi kebijakan akan berhasil bila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi. Sedangkan yang menghubungkan antara kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel itu adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri atau sifat instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Wahab, 1997:75) memperkenalkan model implementasi kebijakan *Kerangka Analisis Implementasi* sebagai salah satu model implementasi kebijakan yang tepat dan operasional. Menurut mereka, analisis implementasi kebijakan adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formula pada keseluruhan proses implementasi. Ada tiga

kategori variable dimaksud, yaitu : 1) mudah tidaknya masalah yang akan digarap dan dikendalikan. 2) kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi dan 3) pengaruh langsung pelbagai variable politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang dimuat dalam kebijakan dimaksud. Ketiga variable itu sebagai *independent variable* yang dibedakan dari tahap-tahap implementasi yang harus dilalui sebagai variable tergantungan. Dalam hubungan antar variable ini setiap tahap akan berpengaruh terhadap tahap yang lain.

Dalam implementasi kebijakan publik, organisasi pelaksana merupakan salah satu faktor penting karena pada dasarnya merujuk pada system birokrasi pemerintah. Kedudukan birokrasi memang sangat strategis dalam proses implementasi kebijakan publik. Seperti dikemukakan oleh Thompson (dalam Thoha, 1992:51) setelah kebijakan publik dirumuskan dan ditetapkan, maka dibutuhkan adanya suatu system untuk mengimplementasikannya, yaitu birokrasi. Melalui birokrasi dapat diselenggarakan berbagai variasi tindakan yang luas, membicarakan dan menyelenggarakan petunjuk, menyelenggarakan pendanaan, menjabarkan informasi, menganalisis masalah, membantu dan mempermudah personil, membuat unit-unit operasional, dan lain-lain.

Sebagai suatu konsep, birokrasi adalah suatu system organisasi. Oleh karena itu, birokrasi merupakan institusi yang memiliki struktur, prosedur dan anggota dengan cirri spesifik. Struktur adalah pola atau cara organisasi mengatur sumber daya untuk kegiatan-kegiatan kearah tujuan. Beberapa

Dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan di daerah, harus diakui banyak tergantung pada partisipasi masyarakat. Pada setiap daerah otonom, partisipasi masyarakat merupakan suatu “energi” dari dalam masyarakat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pembangunan. Dikatakan bahwa indikator keberhasilan dapat dilihat dari sejauh mana partisipasi masyarakat berfungsi di dalamnya. K.A. Graham (1998:32) menyebutkan syarat-syarat dari partisipasi adalah: keterbukaan, fleksibilitas, dimiliki sifat responsive, terdapat hirarki dalam birokrasi, professional autonomy, regional planning, changes dan manajemen yang modern.

Partisipasi masyarakat bagi pemerintah sangatlah penting sekali, terutama dalam proses pembangunan sosial, politik dan ekonomi yang akan menyentuh kepentingan masyarakat. Cohen J.et. All (1978) menilai partisipasi masyarakat sebagai suatu alternatif dari “*revolutionary movement and the green uprising*” artinya, apabila masyarakat dapat dikerahkan dan menjadi bagian dari proses pembangunan, maka kecil kemungkinan mereka akan melakukan gerakan-gerakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Partisipasi masyarakat tidak semata-mata dapat diartikan sebagai kejadian dalam proses politik yang merupakan sarana dimana ide masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan Pemerintah, tetapi ia juga merupakan pendekatan dimana masyarakat turut serta dalam proses implementasi merupakan suatu arena dimana setiap individu dan kelompok dapat

dalam suatu akibat atau efek, maka karakteristik esensial proses implementasi adalah kinerja (*performance*) yang tepat waktu dan memuaskan. Dari sudut pandang keluaran (*output*), implementasi menyangkut ketercapaian sasaran (*goals*). Akhirnya pada tingkat abstraksi tertinggi, implementasi sebagai akibat (*outcome*) mengimplementasikan memuat perubahan terukur pada masalah yang menjadi sasaran program.

B. Kebijakan Publik

Sebagai suatu disiplin ilmu, Ilmu Administrasi Negara memiliki beberapa dimensi pokok. Diantara dimensi pokok tersebut adalah kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi prima dalam ilmu administrasi negara (Thoah, 1993:51). Pengertian kebijakan publik telah banyak dikemukakan oleh para ahli, salah satunya adalah Mark Considine. Menurut Mark Considine (1996:3), kebijakan publik adalah tindakan yang melibatkan berbagai sumber terhadap nilai-nilai yang dikehendaki serta merupakan suatu kinerja yang berkesinambungan yang dilakukan oleh aktor-aktor kebijakan dengan menggunakan institusi-institusi publik yang ada guna mengartikulasikan dan mengekspresikan berbagai nilai yang penting menurut mereka.

Merumuskan suatu kebijakan, apalagi kebijakan itu berupa peraturan/peraturan daerah, bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah. Hal ini disebabkan karena terdapat banyak faktor atau kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut. Suatu

kebijakan/peraturan dibuat bukan untuk kepentingan politis (misalnya guna mempertahankan status quo pembuatan keputusan) tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan (Islamy, 1997:22). Untuk memperjelas makna yang terkandung dalam perumusan kebijakan negara (*Publik-policy-making*) itu pada hakekatnya merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis dimana tidak mengenal saat dimulai dan diakhiri, dan batas-batas dari proses situ sesungguhnya yang paling tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan yang agak kompleks yang kita sebut sebagai pembuatan kebijakan negara itulah yang membuahkan hasil yang disebut kebijakan. Pada pemikiran yang lain, Raymond Bouer (Wahab, 1997:16) merumuskan pembuatan kebijakan negara sebagai proses transformasi atau perubahan input-input politik menjadi output-output politik. Sedangkan Price (dalam Abdul Wahab, 1997:17), menyebutkan bahwa proses pembuatan kebijaksanaan yang bertanggung jawab ialah proses yang melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok ilmuwan, pemimpin-pemimpin organisasi profesional, para administrator dan para politisi. Melalui proses pembuatan keputusanlah, komitmen-komitmen masyarakat yang acap kali masih kabur dan abstrak, sebagaimana nampak dalam nilai-nilai dan tujuan-tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh para actor (politik) ke dalam komitmen-komitmen yang lebih spesifik menjadi tindakan-tindakan dan tujuan-tujuan yang konkrit (Amitai Etzioni, dalam Wahab, 1997:17). Selanjutnya Udoji (Wahab, 1997:17) merumuskan pembuatan Kebijaksanaan negara sebagai :

Keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam sistem politik, pengupayaan pemberian saksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan pelaksanaan/implementasi, monitoring dan peninjauan kembali (umpan balik)

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat beberapa komponen pokok dan konsep kebijakan publik, yakni nilai-nilai yang dikehendaki, aktor-aktor kebijakan, institusi publik serta pengartikulasikan dan mengekspesikan berbagai nilai. Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi secara intensif sehingga melahirkan suatu keputusan publik yang merupakan hasil kompromi seluruh actor kebijakan yang terlibat.

Salah satu tahap dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi kebijakan publik. Dalam pandangan Jones (1991:296) implementasi kebijakan publik adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Kegiatan untuk mengoperasikan dimaksud berisi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak (individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta) dalam kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 1997:65).

Keberadaan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah “jembatan” yang menghubungkan antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan. Dengan demikian dalam tahap implementasi kebijakan terdapat hubungan-hubungan yang menunjukkan sebab akibat (kausalitas) antara tindakan dengan tujuan kebijakan. Hal ini sejalan dengan

pemahaman yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky (Jones, 1991:295) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.

Aktivitas implementasi kebijakan pada dasarnya bersifat kompleks karena sangat ditentukan oleh berbagai faktor baik secara internal maupun secara eksternal. Van Mater dan Van Vorn (1975:46) memformulasikan 6 faktor yang mempengaruhi proses dan penampilan implementasi kebijakan yaitu (1) kejelasan standard dan tujuan kebijakan, (2) tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan seperti staf, fasilitas fisik, informasi dan sebagainya, (3) komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antar organisasi dan pelaksana, (4) karakteristik lembaga pelaksana yang mendukung kesuksesan implementasi kebijakan, (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik dimana kebijakan tersebut dilaksanakan, dan (6) adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk mensukseskan implementasi kebijakan di lapangan.

Lebih lanjut, Syukur (Sumardi, 2005:79) mengemukakan adanya tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu : (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (implementator) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Adapun unsur

Implementasi program penggunaan penyaluran tunjangan guru terampil sebagai suatu kebijakan distributif tidak akan ditemui kelompok yang dirugikan secara langsung, tetapi tidak berarti bahwa implementasinya dipastikan lancar. Sekalipun tindakan kebijakan dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuannya, tidak selalu tindakan tersebut dapat diwujudkan semua kehendak kebijakan. Kecuali disebabkan oleh lemahnya daya antisipasi para pembuat kebijakan maupun pendesain program. Tergantungnya implementasi yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan mungkin juga karena pengaruh dari berbagai kondisi lingkungan yang tidak dapat diramalkan sebelumnya. Oleh karena pemerintah selaku pembuat kebijakan, bagaimanapun juga ingin agar tujuan kebijakannya tercapai, maka ia berkepentingan untuk menjaga proses implementasi sebaik mungkin. Jika seandainya kebijakan tetap gagal mencapai tujuan, pemerintah pasti ingin mengetahui penyebab kegagalan tersebut, agar hal yang sama tidak terulang di masa depan. Untuk kepentingan inilah evaluasi kebijakan dilakukan oleh pemerintah.

Kegiatan evaluasi mirip dengan pengawasan, pengendalian, penyeliaan, supervise, kontrol dan pemantauan. Pelaku utama jelas adalah pemerintah. Dari berbagai persoalan tersebut, evaluasi kebijakan kiranya bermaksud untuk mengetahui 4 (empat) aspek yaitu : (1) proses pembuatan kebijakan, (2) proses implementasi, (3) konsekuensi kebijakan dan (4) efektivitas dampak kebijakan (Wibawa dkk, 2002:9). Keempat aspek pengamatan ini dapat mendorong seorang evaluator untuk secara khusus

mengevaluasi ini kebijakan, baik pada dimensi hukum dan terutama kelogisannya dalam mencapai tujuan, maupun konteks kebijakan terhadap kondisi lingkungan yang mempengaruhi seluruh proses kebijakan.

Kemudian secara keseluruhan evaluasi kebijakan memiliki 4 (empat) fungsi sebagaimana dikemukakan oleh Dunn dan Ripley (dalam Wibawa, 2002:10) yaitu : Eksplanasi, Kepatuhan, Auditing, dan akunting. Ini berarti dengan evaluasi dapat diketahui apakah akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut. Contoh seberapa jauh program penggunaan penyaluran tunjangan guru terpencil setiap Kabupaten/Kota mampu meningkatkan kualitas pendidikan.

C. Kinerja

Istilah “kinerja” merupakan terjemahan dari kata “*performance*” yang sepadan dengan kata-kata: “*accomplishment, execution, achievement*” Webster’s Dictionary, (1979:1332). “*Performance refers to the degree of accomplishment of the tasks that make up an employee’s job*” (Rue, 2000:401). Maksudnya kinerja merujuk pada tingkat penyelesaian tugas yang merupakan pekerjaan seseorang pegawai.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Dikbud, 1995:503), kinerja diartikan sebagai: Pertama, sesuatu yang dicapai. Kedua, prestasi yang diperhatikan, ketiga, kemampuan kerja (tentang peralatan). Dengan demikian berdasarkan hasil etimologis dan kamus, kinerja dapat diartikan sebagai tingkat prestasi (hasil yang dicapai).

Menurut Bernardin dan Russel dalam Sulistiyani (2003: 223-224) menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan *outcome* yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Menurut Tika (2006:23) Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja menyangkut perilaku alami yang dimiliki seorang untuk bebas melakukan tindakan sesuai keinginannya, perilaku bebas untuk bertindak ini tetap tidak bisa dilepaskan dari syarat-syarat formal peran seorang pegawai untuk meningkatkan fungsi efektif suatu organisasi (Rich, 1997:147).

Menurut Waldman (1994:93) Kinerja merupakan gabungan perilaku dengan prestasi dari apa yang diharapkan dan pilihannya atau bagian syarat-syarat tugas yang ada pada masing-masing individu dalam organisasi. Sedangkan menurut Mangkunegara (2001:67) Kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Cascio (1995:275) mengatakan bahwa kinerja merupakan prestasi karyawan dari tugas-tuganya yang telah ditetapkan. Soeprihantono (1988:7) mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan seorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, target, sasaran, kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Menurut Bambang Guritno dan Waridin (2005:82) Kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Hakim (2006:119) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu instansi pada suatu periode waktu tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan dimana individu tersebut bekerja. Kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dengan standar yang telah ditentukan Masrukhin dan Waridin (2004:3).

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa apabila kinerja pegawai atau individu-individu itu baik maka secara otomatis kinerja organisasi juga baik yang pada akhirnya kepercayaan terhadap lembaga atau institusi semakin kuat Vigoda-Gadot dan Erran (2003:82). Kinerja mengandung dua komponen penting yaitu:

1. Kompetensi: berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tingkat kinerjanya.
2. Produktifitas: kompetensi tersebut diatas dapat diterjemahkan kedalam tindakan atau kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kinerja (outcome).

Kinerja (*performance*) sebagai kata benda (*noun*) mengandung arti "thing done" (sesuatu hasil yang telah dikerjakan). Kinerja merupakan suatu hasil kerja dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing,

dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Prawirosentono, 1999:2). Lembaga Administrasi Negara (2000:3) kinerja diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi, organisasi.

Masalah pengukuran kinerja baik organisasi maupun swasta terkait erat dengan akuntabilitas dan kinerja dari institusi yang bersangkutan, sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Johson dan Levin (1991:189):

"the problem of measuring the performance of private and public sector organization is fundamental to any society concerned with the accountability and performance of its institutions".

Untuk melihat derajat akuntabilitas birokrasi publik, diperlukan standar kinerja (*performance*), yang harus disepakati terlebih dahulu mengenai informasi kinerja sektor publik dan standar pelaporan informasi tadi. Sehubungan dengan hal ini Johson dan Lewin (1991:188) menegaskan bahwa:

"No real progress can be achieved with any approach involving disclosure and comparative measure of performance unless consensus can be reached on what is essential information about public sector performance and on standard for reporting this information".

Dengan demikian agar bisa melihat derajat kemajuan yang telah dicapai birokrasi publik dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepada standar ukuran kinerja harus ditetapkan dan mendapatkan persatuan atau kesepakatan terlebih dahulu antara birokrasi

publik dengan pihak yang memberikan tugas, wewenang, dan tanggungjawab.

Dwiyanto (2006:507) menentukan indikator untuk mengukur kinerja organisasi, yaitu:

1. Produktivitas. Konsep produktifitas tidak hanya mengukur tingkat efesiensi, tetapi efektifitas pelayanan.
2. Kualitas pelayanan. Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.
3. Responsivitas adalah kemampuan organisasi mengenai kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Responbilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik eksplisit maupun implicit (Lenvien, 1999)
5. Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik tersebut karena

Konsep dasar kinerja (*the basic conceptions of performance*) dapat didekati dengan beberapa pendekatan (*approaches*), yaitu *the engineering*



D. Penelitian Terdahulu

Darohman Tesis 2007 Universitas Tanjungpura Pontianak, berjudul tentang “Implementasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Madrasah Negeri 2 Tsanawiyah Pontianak”. Program standarisasi ini adalah salah satu pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam Surat Keputusan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ujian Akhir Nasional adalah sebagai alat pengendali mutu pendidikan secara nasional, pendorong peningkatan mutu pendidikan, bahan dalam menentukan kelulusan peserta didik dan bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan standarisasi kelulusan siswa di Madrasah Negeri 2 Tsanawiyah Pontianak mendapat respon yang cukup positif dari semua pihak seperti; gur, orang tua murid, siswa meskipun sosialisasi yang diterapkan tidak menyeluruh. Di sisi lain dalam pelaksanaan implementasi kebijakan itu ditemui adanya hambatan-hambatan seperti terbatsanya biaya operasional sekolah, tenaga guru yang sangat tebatas dengan jam pelajaran yang begitu padat untuk siswa serta waktu.

Aspansius Tesis Universitas Terbuka Tahun 2009 berjudul, Program Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Pada SMP di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Implementasi kebijakan program dana BOS di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak khususnya pada tingkat

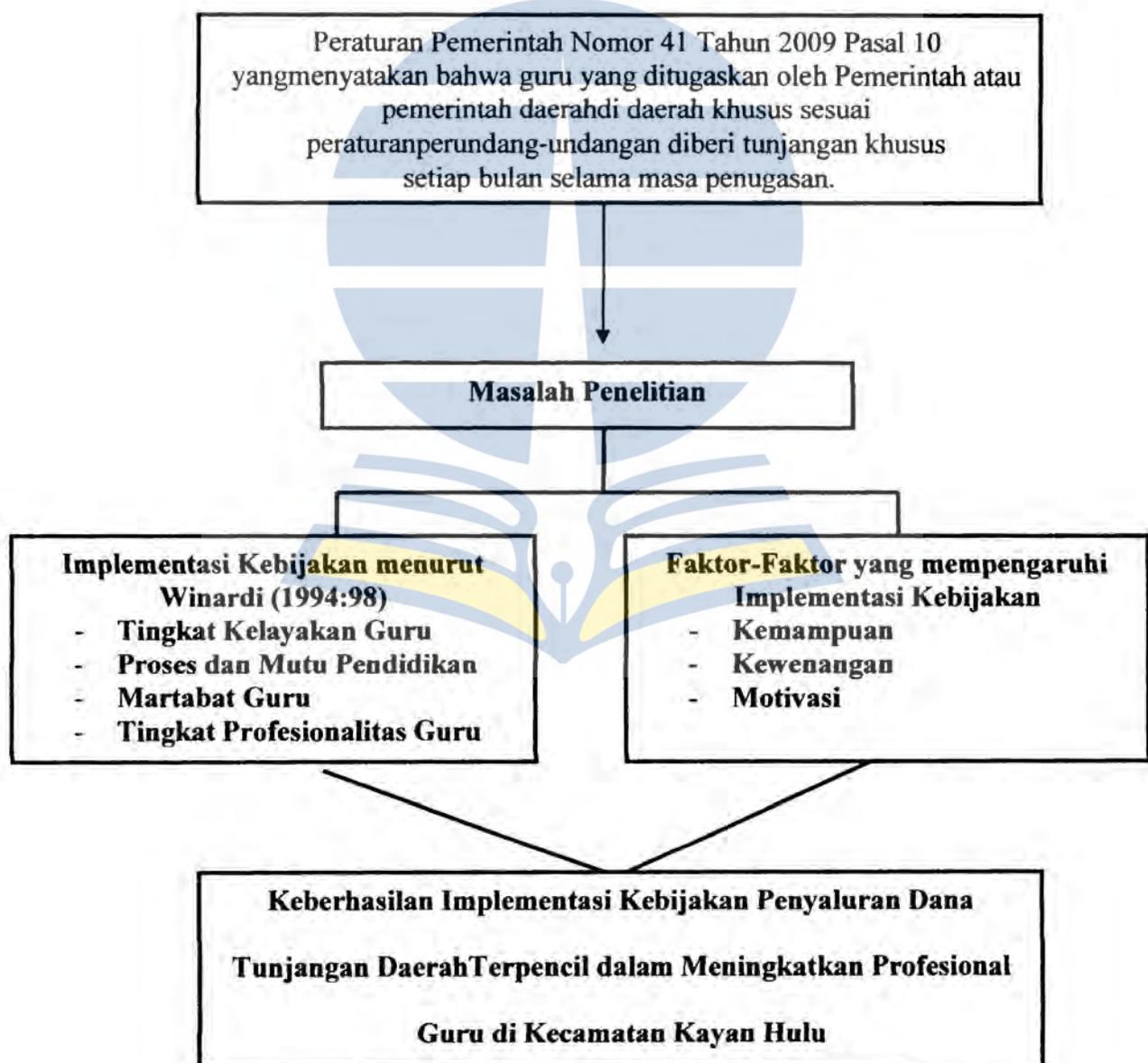
Sekolah Menengah Pertama (SMP), BOS bukan hanya memberikan peluang kepada anak-anak atau siswa dari keluarga kurang mampu, tetapi juga bagi sekolah/madrasah untuk tetap mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat. proses penelitian ini adalah sebagai berikut : “Apakah proses implementasi kebijakan program BOS pada SMP di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak sudah tercapai”.

Hasil penelitian ini ada beberapa persoalan dalam pengelolaan dana BOS oleh sekolah, khususnya berkaitan dengan kapasitas sekolah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Sekolah (RAPBS), pengaturan pengambilan dana dari rekening sekolah, penggunaan dana, dan ketidakjelasan aturan mengenai bunga bank dan pembayaran pajak. Di banyak sekolah, peran kepala sekolah dalam memutuskan penggunaan dana BOS dan penyusunan RAPBS sangat dominan. Dalam pencairan dana satker membuat persyaratan tambahan di luar juklak dan juknis, dengan alasan perlunya pengawasan, tetapi dalam pelaksanaannya menambah birokrasi prosedur pemanfaatan dana BOS oleh sekolah.

E. Kerangka Berpikir

Gambar 1

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN TUNJANGAN TERPENCIL DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan berbagai situasi sebagaimana yang ditulis Moleong (1992:18) bahan penelitian deskriptif adalah penelitian yang sekedar untuk melukiskan atau menggambarkan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antara variable sebagai upaya eksploitasi dan kenyataan sosial.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada SD Negeri, di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang dengan alasan sebagai berikut :

- a. Lokasi Kayan Hulu merupakan tempat tugas saya, sebagai tenaga pendidik di wilayah daerah terencil di Kabupaten Sintang.
- b. Kecamatan Kayan Hulu merupakan daerah terencil dan banyak yang mendapatkan tunjangan dari penyaluran untuk peningkatan oprasional guru.
- c. 16 SD Negeri, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang termasuk salah satu lokasi yang letaknya di wilayah terencil yang letaknya jauh dari Kabupaten Sintang sebagai Pusat Pemerintahan.
- d. Masih rendahnya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam pemerataan akses kebijakan penyaluran tunjangan terencil untuk guru guna

meningkatkan pelayanan pendidikan bagi peruntukan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Subyek Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang mengetahui atau yang terlibat langsung di dalam implementasi kebijakan penyaluran tunjangan guru terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan guru dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan. Dalam hal ini penulis menggunakan konsep ada tiga jenis. Teknik purposif diperlukan dalam penelitian kualitatif, karena tidak ada ukuran mutlak. Dalam penelitian kualitatif, teknik purposive adalah tidak berdasarkan probabilitas, tetapi samping dipilih dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena sosial atau masalah ekonomi yang ada pada guru di SD Negeri, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga disebut sampling bertujuan (*purposive*).

Karena penulis menggunakan purposive maka penulis menentukan informan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang
2. UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan kayan hulu, Kabupaten Sintang
3. Kepala Sekolah , Guru, dan Ketua Komite di Sekolah SD Negeri Kecamatan kayan hulu, Kabupaten Sintang

4. Masyarakat, Orang tua Siswa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teknik observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung pada proses pendidikan di SD Negeri, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, saat melakukan penelitian. Teknik observasi ini biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena kegiatan yang menyangkut penerima tunjangan oprasional guru terampil yang terkait dengan mutu pendidikan di SD Negeri, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang yang diteliti.
- b. Teknik wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan subyek penelitian (informan). Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian di SD Negeri, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya/pewawancara dengan penjawab/informan dengan alat yang dinamakan *interview guide* atau panduan wawancara (Arikunto, 1993:243).
- c. Teknik dokumentasi, yaitu suatu cara untuk mencari, mengumpulkan, dan mempelajari dokumen-dokumen, surat-surat, catatan-catatan, buku-buku dan

laporan-laporan tertulis yang ada serta berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti dalam implementasi kebijakan penyaluran tunjangan guru terpencil di SD Negeri, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang.

Sedangkan alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

a. Daftar Pengamatan (*Checklist*)

Daftar ini untuk melengkapi sikap, tanggapan dan kesulitan-kesulitan *informan* dalam menanggapi atau memahami pertanyaan yang diberikan oleh peneliti terkait dengan implementasi kebijakan penyaluran tunjangan guru terpencil di SD Negeri, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang..

b. Panduan Wawancara

Berupa susunan pertanyaan yang langsung dinyatakan kepada *informan* yakni dalam bentuk pertanyaan terbuka yang dicantumkan dalam penelitian, hal ini menjadi pedoman dalam melakukan wawancara mendalam terkait dengan implementasi kebijakan penyaluran tunjangan guru terpencil di SD Negeri, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang..

c. Alat Dokumentasi

Alat ini dapat berupa tustel dan foto copy. Alat ini digunakan dengan maksud apabila dalam catatan yang dibuat peneliti pada saat wawancara terdapat ketinggalan atau kelupaan yang terkait dengan implementasi kebijakan

penyaluran tunjangan guru terpencil di SD Negeri, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang.

E. Analisis Data

Data yang terkumpul terlebih dahulu dilakukan klasifikasi, interpretasi data dan dianalisis sehingga diperoleh kesimpulan sementara, sedangkan analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengkoordinasikannya ke dalam pola, kategori dan suatu urutan dasar. (Moleong, 1996:103). Selain itu Nasution (1988:127) juga mengemukakan bahwa menyusun data berarti menggolongkannya ke dalam pola, tema atau kategori. Tafsiran artinya memberikan makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan antara berbagai konsep. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan bahwa analisis data bermaksud mengorganisasikan data. Hal ini disebabkan karena data yang terkumpul banyak sekali yang terdiri dari: catatan lapangan, gambar, dokumen dan lain sebagainya. Analisa dalam hal ini mengatur dan mengorganisasikannya.

Analisis kualitatif diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder, untuk melengkapi bahan analisa deskriptif. Data primer dianalisis dengan mengembangkan teori yang relevan, dan penafsiran hasil analisa deskriptif dengan berpedoman pada teori yang sesuai. Begitu pula dilakukan, analisis yang sama terhadap data kualitatif yang berasal dari sumber sekunder, tetapi terlebih

dahulu dilaksanakan pengujian otentikstias dari data. Analisis kuantitatif meliputi analisis terhadap data hasil pengamatan terhadap gejala sosial.

Analisis data untuk penelitian kualitatif menurut Purwoko (1999:36), analisa data dapat digambarkan sebagai berikut:

Reduksi data, langkah ini meliputi proses manipulasi, integrasi dan transpormasi serta kategorisasi data. Reduksi data akan sangat membantu dalam mengidentifikasi aspek penting dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian untuk memfokuskan data yang terkumpul, membaca dengan hati-hati identifikasi tema-tema utama dari proses penelitian, tingkah laku dan sebagainya.

Pengorganisasian data, yaitu proses penyusunan kembali semua informasi sekitar tema-tema tertentu yang berkaitan dengan topic spesifik dan menampilkan hasilnya dalam beberapa format seperti grafik, tabel dan sejenisnya.

Interprestasi data, yaitu meliputi proses pembuatan keputusan dan penyusunan kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Proses ini juga memberikan penjelasan atas tujuan-tujuan tertentu, yang akan memungkinkan terjadinya perkembangan kearah pandang yang lebih tegas, yang selanjutnya akan menuntun peneliti ke langkah-langkah selanjutnya.

Proses kategorisasi dan klasifikasi data dilaksanakan secara bertahap atas jawaban informan yang dilanjutkan dengan interprestasi data kualitaif. Pembahasan dilaksanakan dengan mempergunakan metode komprehensif atas hasil wawancara mendalam kepada informan sekaligus membandingkan dengan hasil observasi di lapangan. Pandangan dari informan selain disajikan dalam bentuk kutipan juga digunakan untuk memperkaya dan memperdalam analisis hasil penelitian.

F. Teknik Keabsahan Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti tidak selamanya memiliki kebenaran sesuai dengan fokus penelitian bahkan boleh jadi terdapat kecurangan atau kelebihan ungkapan. Untuk itu, perlu adanya pengecekan data, untuk menetapkan keabsahan (*Trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknis pemeriksaan didasarkan atas jumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu, Derajat Kepercayaan (*Credibility*), Keteralihan (*Transferability*), Ketergantungan (*Dependability*), dan Kepastian (*Confirmability*). Penelitian ini menggunakan kriteria pertama yakni Derajat Kepercayaan (*Credibility*) dalam kriteria ini terdapat dua jenis teknik dalam penelitian, yaitu:

1. Saturasi

Satuan data atau kejenuhan data, dicapai apabila data atau informasi yang disimpulkan oleh peneliti telah menunjukkan ketetapan (tidak berubah).

2. Triangulasi

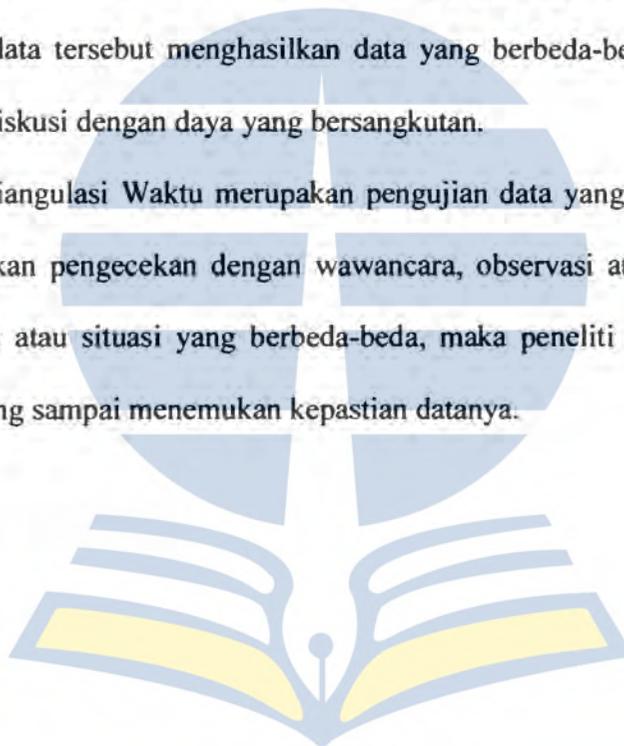
Triangulasi diartikan sebagai pengecekan kembali data dari sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, seperti:

a. Triangulasi Sumber merupakan cara untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, misalnya seperti pengumpulan data pengujian kredibilitas gaya kepemimpinan seseorang maka pengumpulan data dan pengujian yang diperoleh melalui bawahan yang dipimpin. Data dari ketiga sumber tersebut tidak bisa dirata-ratakan tetapi dengan

mendeskrripsikan mana hasil berupa pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang lebih spesifik dari tiga sumber tersebut.

b. Triangulasi Teknik merupakan cara menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dan dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek kembali dengan melakukan observasi dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik ini pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi dengan daya yang bersangkutan.

c. Triangulasi Waktu merupakan pengujian data yang diperoleh dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lainnya dalam waktu atau situasi yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan secara berulang-ulang sampai menemukan kepastian datanya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sintang

Kabupaten Sintang terletak di bagian Timur Propinsi Kalimantan Barat atau di antara $1^{\circ}05'$ Lintang Utara, serta $1^{\circ}21'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}50'$ Bujur Timur serta $113^{\circ}20'$ Bujur Timur. Secara administrative, batas wilayah Kabupaten Sintang adalah :

1. Utara : Berbatasan dengan Serawak dan Kapuas Hulu
2. Timur : Berbatasan dengan Kalimantan Timur
3. Selatan : Berbatasan dengan Kalimantan Tengah
4. Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Sanggau

Sumber : Kabupaten Sintang dalam Angka, 2015

Faktor geografis mencakup antara lain aspek keadaan alam dan sumber daya alam (SDA) dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan pendidikan. Pengaruh ini mungkin bersifat menunjang dan mungkin pula bersifat menghambat. Tersedianya sumber daya alam jelas merupakan faktor yang menunjang pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Keadaan geografi yang tidak menguntungkan antara lain keadaan pemukiman penduduk yang berpencar-pencar dan terpencil serta pemukiman yang padar. Keadaan seperti ini merupakan kendala dalam upaya peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar.

Keadaan Topografi di wilayah Kabupaten Sintang , dialiri oleh dua sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Sintang, dimana Sungai Kapuas melewati daerah Sepauk, Tempunak, Sintang dan ketungau. Sedangkan Sungai Sintang melewati Kota Sintang, Dedai, sampai Ambalau ke Propinsi Kalimantan Timur.

Keadaan Topografi berkaitan dengan aspek sebagai berikut:

- a. Rencana penentuan lokasi sekolah
- b. Rencana rayonasi penerimn siswa baru
- c. Rencana supervisi sekolah dan pengendalian
- d. Rencana penempatan guru
- e. Rencana pengadaan dan pendistribusian buku-buku serta peralatan pendidikan lainnya.

Sebagian besar, wilayah Kabupaten Sintang merupakan wilayah perbukitan, dengan luas lebih kurang 22.392 Km atau 69,32 %, dengan kondisi pemukiman penduduk terpencar (terutama di daerah pedesaan). Kondisi tanah Kabupaten Sintang sebagai berikut.

- | | | |
|--------------------|---|------------------|
| 1. Tanah Organosal | : | 5.056 Hektar |
| 2. Tanah Aluvial | : | 173.824 Hektar |
| 3. Tanah Podsolit | : | 1.341.576 Hektar |
| 4. Tanah Latosal | : | 1.667.444 Hektar |

Sumber : Kabupaten Sintang dalam Angka, 2014

Sumber daya alam baik yang terkandung di daratan, di sungai maupun di laut (jika ada) merupakan potensi ekonomi yang besar. Hal tersebut, berarti

bahwa pengelolaan sumber daya alam secara efisien akan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jelas akan memberikan dampak positif terhadap penyediaan dana dan fasilitas pendidikan.

Di Kabupaten Sintang terdapat berbagai sumber daya alam, di antaranya yang menjadi andalan sebagai berikut :

- a. Sumber daya alam (SDA) pada sektor Perkebunan Rakyat dengan berbagai jenis komoditi: karet, kelapa sawit, dn lain-lain dengan luas areal keseluruhan 117.346, 16 hektar.
- b. SDA pada bahan tambang yang sebagian besar dengan cara tambang tradisional.
- c. SDA hutan

Sedangkan sumber daya alam berupa pertanian padi saawah, padi ladang, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan belum dapat menjadi andalan. Rencana tata ruang di Kabupaten Sintang yang berwawasan ramah lingkungan harus dijadikan pedoman perencanaan terpadu pembangunan, agar tatanan lingkungan hidup dn pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan dapat dilakukan secara tepat guna, berdaya guna serta berhasil guna secara berkelanjutan.

Berhubungan dengan rencana tata ruang tersebut perlu diperhatikan bahwa di Kabupaten Sintang Luas kawasan hutan lebih kurang mencapai 3.229.900 hektar. Peruntukan kawasan hutan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hutan PPA	: 127.509 hektar
2. Hutan Lindung	: 749.950 hektar
3. Hutan Produksi Terbatas	: 771.684 hektar
4. Hutan Produksi Biasa	: 410.674 hektar
5. Hutan Produksi yang dapat dikoperasikan	: 14.027 hektar
6. Pertanian lahan kering	: 1.154.048 hektar

Sumber : Kabupaten Sintang dalam Angka, 2015

Faktor iklim yang mencakup antara lain aspek lamanya musim kemarau dan musim penghujan serta banyaknya curah hujan. Aspek-aspek ini berpengaruh terhadap tingkat keseluruhan lahan, kekeringan, banjir dan sebagainya, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Musim kemarau di Kabupaten Sintang biasanya pada bulan Juni sampai Desember, sedangkan musim hujan terjadi bulan Januari sampai Mei, dan curah hujan rata-rata adalah 301,46 mm, serta curah hujan tertinggi dan terendah masing-masing adalah 759,10 mm dan 150,50 mm.

Sesuai UU No. 22 tahun 1999, Pemerintah daerah sebagai koordinator semua instansi sektoral dan kepala daerah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan pengembangan wilayahnya. Pembinaan dan pengembangan tersebut mencakup segala bidang kehidupan dan bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daerah Kabupaten sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang memiliki arah dan tujuan tertentu yang

harus dicapai melalui pembangunan di semua bidang, termasuk di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hal tersebut, berarti bahwa rencana pembangunan pendidikan di Kabupaten tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan kabupaten secara keseluruhan. Oleh karena itu segala usaha dan kegiatan pembinaan dari pengembangan di bidang pendidikan di kabupaten harus berada di bawah sepengetahuan dan koordinasi dari Pemerintah Daerah untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Kabupaten Sintang terdiri dari atas 21 kecamatan dan yang terbagi ke dalam 250 kelurahan / desa dengan luas wilayah seluruhnya 32.279 Km² dari jumlah kelurahan/desa tersebut, 246 di antaranya atau 61,33 % masih merupakan desa tertinggal.

B. Gambaran Umum Kecamatan Kayan Hulu

1. Geografis Kecamatan

Kecamatan Kayan Hulu Kabuapten Sintang secara geografi terletak diantara:

- 0⁰13' Lintang Utara – 0⁰37' Lintang Selatan
- 111⁰13' Bujur Timur – 111⁰44' Bujur Timur

Sedangkan batas-batas administrasi Kecamatan Kayan Hulu adalah :

TABEL 1

**LETAK GEOGRAFI KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN
SINTANG MENURUT GARIS LINTANG DAN BUJUR**

Letak Geografi	Keterangan
[1]	[2]
Lintang	0 ⁰ 13' L U – 0 ⁰ 37' L S
Bujur	111 ⁰ 13' B T – 111 ⁰ 44' B T

Sumber: Kantor Camat Kayan Hulu, 2015.

Kecamatan Kayan Hulu memiliki luas wilayah 1.605 Km² atau 7,42 persen dari luas wilayah Kabupaten Sintang. Pada tahun 2014 keadaan geografis menjadi berbeda dengan adanya pemekaran desa di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang.

TABEL 2

**BATAS ADMINISTRASI KECAMATAN KAYAN HULU
KABUPATEN SINTANG**

Letak Administratif	Berbatasan Dengan
[1]	[2]
Sebelah Utara	Kecamatan Silat
Sebelah Selatan	Kecamatan Ella Hilir
Sebelah Timur	Kecamatan Serawai
Sebelah Barat	Kabupaten Melawi

Sumber: Kantor Camat Kayan Hulu, Tahun 2015.

Berdasarkan Tabel tersebut diatas, jelaslah bahwa letak Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang adalah batas administrasi kecamatan tersebut terletak di wilayah terpencil di pedalaman Kabupaten Sintang.

TABEL 3

LUAS WILAYAH KECAMATAN KAYAN HULUKABUPATEN SINTANG

No	NAMA DESA	Luas (Km2)
1	NANGA PAYAK	140,65
2	TANJUNG BUNGA	109,85
3	NANGA TEBEDAH	144,00
4	ENTOGONG	111,100
5	NANGA TOGOL	145,200
6	TANJUNG LALU	74,90
7	LINTANG TAMBUK	107,50
8	NANGA MASAU	92,00
9	NANGA ABAI	96,00
10	NANGA UNGAI	45,00
11	NANGA TORAN	100,00
12	RIAM PANJANG	43,00
13	NANGA LAAR	32,00
14	RIAM MUNTIK	72,80
15	MERAU PERMAI	55,00
16	EMPONYANG	115,00
17	LANDAU BARU	121,00
18	TOPAN NANGA	55,00
19	MAPAN JAYA	28,00
20	TONAK GOREH	45,00
21	EMPAKAN	23,00
22	TANAH MERAH	45,00
23	MERAH ANAI	55,00
24	TAMPANG MANUA	32,00
25	NANGKAK LESTARI	117,00
26	NANGA ORAN	120,00
27	BULUH MERINDU	123,00
28	KERAPUK JAYA	49,00
29	TANJUNG MURU	56,00
30	KEBARAU	120,00
31	NANGA TAMPANG	112,00

Sumber: Kantor Camat Kayan Hulu

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa luas wilayah Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang, desa yang terluas di kecamatan tersebut adalah Desa Naga Payak dengan luas wilayah 140.65 Km², sedangkan luas

wilayah desa yang terkecil di wilayah kecamatan tersebut adalah desa riam Muntik dengan luas 32,00 Km².

TABEL 4
LUAS LAHAN SAWAH MENURUT JENIS PENGAIRANNYA DI
KECAMATAN KAYAN HULUKABUPATEN SINTANG

No.	Jenis Pengairan	Ditanami Padi	Tidak Ditanami Padi	Sementara Tidak Ditanami
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Irigasi Teknis	-	-	-
2.	Irigasi SeHilir Teknis	-	-	-
3.	Irigasi Sedrehana	175	25	400
4.	Irigasi Desa / Non PU	-	-	-
5.	Tadah Hujan	230	-	500
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
6.	Pasang Surut	-	-	-
7.	Lebak	-	-	-
2014		405	25	900

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, 2015.

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa lahan sawah dengan jenis pengairan di Kecamatan Kayan Hulu rata-rata mempergunakan sistim tadah hujan dengan disertai irigasi yang sangat sederhana di kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang tersebut.

TABEL 5
LUAS PENGGUNAAN LAHAN SELAIN LAHAN SAWAH DI KECAMATAN
KAYAN HULUKABUPATEN SINTANG

No.	Lahan Kering	2011	2012
[1]	[2]	[3]	[4]
A.	Lahan Bukan Sawah		
1.	Tegal / Kebun	15.100	-
2.	Ladang / Huma	1.235	-
3.	Perkebunan	16.760	-
4.	Ditanami Pohon / Hutan Rakyat	9.500	-
5.	Tambak	-	-
6.	Kolam / Tebat / Empang	5	-
7.	Padang Pengembalaan / Rumput	-	-
8.	Sementara Tidak Diusahakan	9.232	-
9.	Lainnya (Perkarangan, dll)	1.240	-
	Jumlah	53.072	-
B.	Lahan Bukan Pertanian		
1.	Rumah, Bangunan dan Halaman Sekitarnya	810	-
2.	Hutan Negara	23.232	-
3.	Rawa-rawa (tidak ditanami)	5.051	-
4.	Lainnya (Jalan, Sungai, Danau, Lahan Tandus, dll)	70.985	-
	Jumlah	10.078	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, 2015.

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa luas penggunaan lahan selain lahan sawah di Kecamatan Kayan Hulu lahan bukan sawah yang luas penggunaannya 53,072 Ha, sementara lahan bukan pertanian hanya 10,078 Ha.

Ini menunjukkan penggunaan lahan pertanian di wilayah Kecamatan Kayan Hulu ini cukup minim.

2. Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No. 15 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Desa, Kecamatan Kayan Hulu memiliki desa sebanyak 31 desa. Sampai dengan tahun 2014 di Kecamatan Kayan Hulu telah terjadi 12 kali pergantian camat.

Pegawai Negeri di dalam pemerintahan di Indonesia mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pusat (Instansi Vertikal) dan TNI yang bekerja di Kecamatan Kayan Hulu sebanyak 66 orang, yang terdiri dari golongan satu sebesar 1,52 persen, golongan dua sebesar 45,45 persen, golongan tiga sebesar 50 persen dan golongan empat sebesar 3,03 persen. Jika jumlah Pegawai Negeri Sipil dirinci menurut jenis kelamin maka sebagian besar berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebesar 92,42%, sedangkan pegawai perempuan sebesar 7,58%.

3. Sosial

a. Pendidikan

Pendidikan di suatu daerah merupakan salah satu faktor yang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan daerah tersebut. Hingga tahun 2014 Kecamatan Kayan Hulu berdasarkan pada keadaan Sekolah Dasar Negeri-Swasta tahun pelajaran 2014-2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6
Keadaan Sekolah Dasar Negeri/Swasta

No	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA
1	SDN 1 NANGA TEBIDAH	172
2	SDN 2 NANGA TEBIDAH	131
3	SDN 3 PAYAK	130
4	SDN 4 NANGA ORAN	151
5	SDN 6 NANGA MASAU	116
6	SDN 7 TANJUNG LALAU	179
7	SDN 8 LINTANG TAMBUK	97
8	SDN 9 SEMANDAI	138
9	SDN 10 RIAM PANJANG	135
10	SDN 11 TANAH MERAH	178
11	SDN 12 MERAH AU	172
12	SDN 13 ENTOGONG	143
13	SDN 14 PELAIK	114
14	SDN 15 MERAH ARAI	90
15	SDN 16 EMPONYANG	147
16	SDN 17 NANGA ABAI	77
17	SDN 18 NANGA TORAN	190
18	SDN 19 NANGA KERAPUK	158
19	SDN 20 RIAM MUNTIK	155
20	SDN 21 MENALUK	61
21	SDN 22 KAMPUNG ARAK	133
22	SDN 23 NANGA ORAN	139
23	SDN 24 TOPAN	69
24	SDN 25 EMPAKAN	113
25	SDN 27 NANGA TAMPANG	97
26	SDN 27 ENKIDAU	97
27	SDN 28 TANJUNG MIRU	106
28	SDN 29 NANGKA LESTARI	172
29	SDN 30 RIAM PANJANG	83
30	SDN 31 MAPAN JAYA	85
31	SDN 32 GURUNG BERAJANG	20
32	SDN 33 MELABAN PEDINI	64

Sumber: Kantor Camat Kayan Hulu, 2015

Berdasarkan tabel tersebut di atas, jelaslah bahwa di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang tingkat pendidikan khususnya banyaknya sekolah di wilayah itu sangat bervariasi dari milik swasta sampai milik pemerintah yang tersebar di wilayah Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang.

b. Kesehatan

Prasarana kesehatan di Kecamatan Kayan Hulu tahun 2014 antara lain 2 buah Puskesmas, 10 buah Puskesmas dan 21 Polindes. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 7
BANYAKNYA FASILITAS KESEHATAN DI KECAMATAN
KAYAN HULU

No	NAMA DESA	RUMAH SAKIT	PUSKESMAS	POLINDES
1	NANGA PAYAK		1	-
2	TANJUNG BUNGA		-	1
3	NANGA TEBIDAH		1	-
4	ENTOGONG		-	1
5	NANGA TOGOI		-	1
6	TANJUNG LALAU		1	-
7	LINTANG TAMBUK		-	1
8	NANGA MASAU		-	1
9	NANGA ABAI		-	1
10	NANGA UNGAI		1	-
11	NANGA TORAN		-	1
12	RIAM PANJANG		-	1
13	NANGA LAAR		1	-
14	RIAM MUNTIK		1	-
15	MERAH AU PERMAI		1	-
16	EMPONYANG		-	1
17	LANDAU BARU		-	1
18	TOPAN NANGA		-	1
19	MAPAN JAYA		-	1
20	TONAK GONEH		-	1

21	EMPAKAN		-	1
22	TANAH MERAH		-	1
23	MERAH ARAI		1	-
24	TAMPANG MANUA		-	1
25	NANGKAK LESTARI		1	-
26	NANGA ORAN		-	1
27	BULUH MERINDU		-	1
28	KERAPUK JAYA		-	1
29	TANJUNG MIRU		1	-
30	KEBARAU		-	1
31	NANGA TAMPANG		-	1

Sumber : Kantor Camat Kayan Hulu, 2015

Berdasarkan tabel tersebut di atas, jelaslah bahwa fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang sangat minim yang mana Puskesmas hanya 10 buah saja. Sementara Polindes berjumlah 21 buah.

4. Pertanian

Produksi tanaman padi di Kecamatan Kayan Hulu pada tahun 2014 sebesar 9.498 ton yang terdiri dari 3.568 ton padi sawah, 6.825 ton padi ladang dan 10.393 ton padi biasa. Rata-rata produksi padi di Kecamatan Kayan Hulu mencapai 40,6 kuintal/Ha

Untuk tanaman palawija, tanaman jagung masih menjadi penyumbang produksi terbesar yang mencapai 127 ton dengan rata-rata produksi mencapai 21,57 kuintal/Ha. Tanaman perkebunan yang terbesar di Kecamatan Kayan Hulu pada tahun 2014 adalah tanaman kelapa sawit dan tanaman karet dengan produksi masing-masing sebesar 4.563,37ton dan 2.077 ton.

TABEL 8
LUAS PANEN, RATA-RATA PRODUKSI DAN PRODUKSI PADI DAN
PALAWIJA DI KECAMATAN KAYAN HULU

No.	Komoditi	Luas Panen	Rata-rata Produksi (Kuintal/Ha)	Produksi (Ton)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Padi sawah	1.103	32,35	3.568
2.	Padi Ladang	3.646	18,72	6.825
No.	Komoditi	Luas Panen	Produksi (Kuintal/Ha)	Produksi (Ton)
3.	Padi	4.749	21,88	10.393
4.	Jagung	127	21,57	274
5.	Ubi Kayu	39	137,95	538
6.	Ubi Jalar	19	78,42	149
7.	Kedele	2	10,00	2
8.	Kacang Tanah	4	15,00	6
9	Lacang Hijau	1	10,00	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, 2015

Berdasarkan tabel tersebut di atas jelaslah bahwa di wilayah kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang terkait dengan luas panen, rata-rata produksi padi dan palawija, dimana rata-rata produksi padi sawah, ladang maupun padi 20.786 Ton per tahun serta produksi jagung di wilayah kecamatan tersebut sebesar 274 Ton.

TABEL 9
LUAS AREA TANAMAN PERKEBUNAN MENURUT JENISNYA DI
KECAMATAN KAYAN HULU

No.	Jenis Tanaman	Belum Menghasilkan (Ha)	Menghasilka n (Ha)	Tua/Rusak (Ha)	Jumlah (Ha)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
1.	Karet	2077	1.132	350	3.559

2.	Kelapa Dalam	-	18	15	33
3.	Kelapa Hibrida	-	4	2	6
4.	Kelapa Sawit	4.583,37	2.904	-	7.467,37
5.	Lada	79	58	15	152
6.	Kopi	-	2	10	12
No	Jenis Tanaman	Belum Menghasilkan	Menghasilkan	Tua/Rusak	Jumlah
8.	Kapuk/Randu	9	15	13	37
9	Aren	5	22	10	37
10	Pinang	3	16	13	32
11	Cengkeh	-	-	-	-
12	Tebu	-	-	-	-
2012		6.736,37	4.171	428	11.335,3 7

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, 2015.

TABEL 10

**POPULASI TERNAK DAN UNGGAS MENURUT JENISNYA
DI KECAMATAN KAYAN HULU**

No.	Jenis Ternak dan Unggas	2009	2010	2011	2012
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Sapi	430	425	410	405
2.	Kerbau	142	105	110	110
3.	Kambing	635	632	643	650
4.	Babi	6.300	6.178	6.424	6.502

5.	Ayam Ras	13.680	25.399	34.938	29.106
6.	Ayam Buras	24.450	22.014	23.616	24.151
7.	Itik / Itik Manila	1.300	922	1.181	1.230

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten sintang, 2015.

5. Industri dan Perdagangan.

Berdasarkan jenis usahanya, industri kecil dibagi menjadi usaha Formal dan Non Formal. Pada tahun 2014 terjadi perubahan unit usaha yang terdaftar di Kecamatan Kayan Hulu baik formal maupun non formal. Di Kayan Hulu terdapat 17 perusahaan industri kecil formal dengan 25 orang tenaga kerja.

Di Kecamatan Kayan Hulu pada tahun 2014 terdapat 200 perusahaan perdagangan yang mempunyai surat izin usaha, di mana sebagian besar merupakan perusahaan perdagangan dengan skala kecil. Sedangkan untuk perusahaan dengan skala besar dan sedang jumlahnya tidak mencapai lima puluh persen dari total perusahaan yang ada di Kecamatan Kayan Hulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 11

BANYAKNYA UNIT USAHA DAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI FORMAL DIKECAMATAN KAYAN HULU

No.	Cabang Industri / Komoditi	Unit Usaha	Tenaga Kerja
[1]	[2]	[3]	[4]
I.	Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)		
1.	Kue Basah	-	-
2.	Salai Pisang	-	-
3.	L i m u n	-	-

4.	Pengetaman Kayu	1	1
5.	Bubut Kayu	-	-
6.	Meubel Kayu	3	3
7.	Percetakan	-	-
8.	Kerupuk Singkong	2	4
9.	Moulding / Komponen Bahan	-	-
10.	Pengolahan Rotan	-	-
11.	Tahu -Tempe	2	4
II. Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA)			
1.	Pertenunan ATBM	-	-
2.	Foto Copy	1	1
No	Cabang Industri/Komoditi	Unit Usaha	Tenaga Kerja
3.	Pemotongan Kaca	-	-
4.	Crumb Rubber	-	-
5.	Genteng Semen	-	-
6.	Fiber Glass	-	-
7.	Tukang Jahit	-	-
8.	Foto Studio	-	-
9.	Salon Kecantikan	-	-
10.	Reparasi Mobil	-	-
11.	Reparasi Sepeda Motor	6	10
12.	Reparasi Radio / TV	1	1
13.	Bengkel Las / Bubut	1	1
14.	Reparasi Mesin	-	-
15.	Tukang Emas / Perak	-	-
16.	Bengkel Sepeda	-	-
17.	Vulkanisir Ban	-	-
	Jumlah	17	25

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Kayan Hulu, 2015.

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa unit usaha yang paling dominan reparasi sepeda motor, reparasi radio atau televisi serta bengkel las/bubut dan tenaga kerja sektor industri formal di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang unit usaha 17 dengan tenaga kerja 25 orang.

6. Transportasi

Pada tahun 2014 panjang jalan di wilayah Kecamatan Kayan Hulu sepanjang 62,00 kilometer di mana permukaan jalan 16,13 persen jalan beraspal, dan 83,87 persen jalan tanah. Ditinjau dari kondisinya 8,06 persen

baik, 32,26 persen sedang, 40,32 persen rusak dan 19,35 rusak berat. Jika dibandingkan tahun sebelumnya permukaan jalan belum mengalami perubahan. Jarak desa dengan Ibukota Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang sangat bervariasi jarak yang terjauh adalah desa Nanga Payak, sementara desa yang terdekat ada dua desa, yaitu Desa Tanjung Bunga dan Desa Nanga Tebedah.

TABEL 12
PANJANG JALAN KABUPATEN MENURUT JENIS PERMUKAAN
DI KECAMATAN KAYAN HULU
(Kilometer)

No.	Jenis Permukaan	2011	2012
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Aspal	10	10
2.	Kerikil	-	-
3.	Tanah	52	52
4.	Lainnya	-	-
Jumlah		62	62

Sumber: Kantor Camat Kayan Hulu, 2015.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, jelaslah bahwa panjang jalan di Kecamatan Kayan Hulu kabupaten Sintang terdiri jalan beraspal hanya 10 kilometer sementara jalan tanah atau jalan yang tidak beraspal 52 kilometer serta jalan yang menggunakan transportasi sungai yang lebih banyak digunakan masyarakat di wilayah kecamatan tersebut.

TABEL 13
PANJANG JALAN KABUPATEN MENURUT KONDISI JALAN
DI KECAMATAN KAYAN HULU

No.	Kondisi Jalan	2011	2012
[1]	[2]	[3]	[4]

1.	B a i k	5	5
2.	S e d a n g	20	20
3.	R u s a k	25	25
4.	Rusak Berat	12	12
Jumlah		62	62

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Kayan Hulu, 2015.

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa kondisi jalan diKecamatan Kayan Hulu rata-rata dalam kondisi yang rusak, baik itu sedang maupun rusak berat ini sangat mempengaruhi transportasi yang cukup sulit untuk menunjang perekonomian masyarakat.

TABEL 14
BANYAKNYA KENDARAAN BERMOTOR MENURUT JENISNYA
DI KECAMATAN KAYAN HULU

No.	D e s a	Sepeda	Sepeda Motor	Oplet	Mobil Pribadi	Truk
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Nanga Payak	10	15	-	-	-
2.	Tanjung Bunga	12	21	-	-	-
3.	Nanga Tebidah	71	20	1	1	10
4.	Entogong	5	23	1	-	2
5.	Nanga Masau	6	15	-	1	-
6.	Tanjung Lalau	17	20	-	-	-
7.	Lintang Tambuk	10	21	-	-	-
8	Nanga Masau	5	20	-	-	-
9.	Nanga Abai	2	22	-	-	-
10.	Nanga Ungai	10	27	-	-	-
11.	Nanga Toran	15	30	-	-	20
12.	Riam Panjang	16	12	-	-	-
13.	Nanga Laar	7	18	-	-	15
14.	Riam Muntik	10	22	-	-	-
15.	Merahau Permai	15	20	-	-	-

16.	Emponyang	16	27	-	-	-
17.	Landau Bara	17	30	-	-	-
18.	Topan Nanga	12	20			
19.	Mapan Jaya	8	12			
20.	Tonak Goneh	10	12			
21.	Empakan	5	14			10
No	Desa	Sepeda	Sepeda Motor	Oplet	Mobil Pribadi	Truk
22.	Tanah Merah	7	21			
23.	Merah Arai	11	30			
24.	Tapang Menua	15	17			4
25.	Nangkak Lestari	20	13		1	
26.	Nanga Oran	13	21			
27.	Buluh Merindu	6	22			
28.	Karuk Jaya	9	21			2
29.	Tanjung Miru	11	27			
30.	Kabarau	12	17			
31.	Nanga Tampang	8	12			

Sumber: Kantor Camat Kayan Hulu, 2015

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa Kendaraan atau transportasi di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang di dominasi oleh kendaraan roda dua.

C. Pembahasan

1. Proses Implementasi Kebijakan Penyaluran Tunjangan Terpencil dalam Rangka Peningkatan Profesional Guru

a. Kelayakan Guru

Kelayakan guru disini tentu berkaitan erat dengan pelaksanaan sebagai seorang guru. Kelayakan guru disini bisa dilihat dari kualifikasi pendidikan dan kepotensiannya. Seperti yang ditulis dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 tentang Guru dan Dosen, bahwa kepotensian guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial dan kompetensi profesional (Trianto dkk, 2007:71). Untuk poin pertama ini berkaitan dengan kelayakan guru maka penulis lebih tepat mengarah pada kompetensi kepribadian. kompetensi kepribadian disini adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berahlak mulia (Trian dkk, 2007:72). Namun kelayakan guru juga bisa dilihat dari tingkat pendidikannya yaitu gelar yang dimiliki oleh guru yang telah sertifikasi.

Walaupun dalam hal ini guru-guru tersebut sudah mengajar selama lebih dari 20 tahun dan layak untuk mendapatkan tunjangan terpcencil. Ini bisa menjadi alasan tentang kenapa keberhasilan tunjangan guru terpcencil belum melihatkan hasil yang signifikan, oleh karena itu perlu dievaluasi dan dicari jalan keluarnya agar kedepannya guru tersebut mampu mengambil studi untuk mendapatkan gelar. Dari penjelasan diatas selain hal tersebut menentukan apakah guru tersebut layak untuk menjadi guru. Ada hal lain yaitu perilaku dalam peran sebagai guru. Hal ini menjadai tolah ukur kebijakan tunjangan guru terpcencil, seperti yang dipaparkan dari hasil wawancara oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang mengungkapkan bahawa:

“Kompetensi seorang guru harus sesuai dengan Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang Standar seorang guru yaitu harus memiliki kepribadian yang baik, guru harus beriman, bettaqwa, berpenampilan baik dalam berpakaian, menahan amarah dan kemudian tidak cepat emosi”.

Jawaban yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang menjelaskan bahwa

“Adanya tunjangan guru terpencil ini, guru harus melaksanakan tugas selayakannya sebagai seorang guru sesuai dengan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar guru dimana isi dari permendiknas adalah guru menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berahlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, arif dan bijaksana dari semua tersebut beliau berasumsi bahwa guru-guru yang telah menerima tunjangan guru terpencil terutama berada di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang telah layak sebagai seorang guru”.

Selain itu pendapat dari Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang berpendapat bahwa:

“Sejauh ini bermacam-macam guru pada tingkat SD menempatkan diri sebagai ibu bagi anak-anaknya, sebagai kawan, namun di dalam berinteraksi batas-batas masih ada yaitu guru yang bersikap tegas”.

Dari penuturan diatas kewibawaan guru terpencil itu bermacam-macam yaitu baik dari tingkat SD Negeri maupun Swasta yang ada di wilayah terpencil. Kewibawaan yang ditunjuk oleh seorang guru pada tingkat SD disini lebih kepada perilaku ibu kepada anak-anaknya pada saat berinteraksi dengan siswa-siswinya. Dan seorang guru menempatkan posisinya sebagai kawan namun masih ada batasan-batasan yang tegas dalam interaksi tersebut,

seperti yang tertuang dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 mengenai standar guru, dimana dalam permendiknas tersebut tertulis bahwa seorang guru menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa serta berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. Penuturan lainnya mengenai kelayakanan guru dari segi kewibawaan/ kompetensi keperibadian yang tercermin di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang juga diutarakan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang, yaitu:

“Sebagai seorang guru dan tenaga pendidik dari peserta didik/murid-murid sudah seharusnya dan semestinya seorang guru menunjukkan sikap kewibaannya dalam proses belajar-mengajar terutama dalam tutur kata/bahasa guru, penampilan/cara berpakaian guru serta melarang segala tindakan kekerasan kepada para murid, karena kita berdedikasih untuk mengajar bukan untuk mendidik para murid menjadi preman”.

Dari ungkapan diatas jelas bahwa di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang, guru-guru yang bertugas di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang mencerminkan sikap yang baik pada saat proses belajar-mengajar. Dari penuturan Kepala Sekolah diatas beliau memiliki rasa tanggungjawab yang besar dalam menertibkan prilaku guru apalagi apabila guru tersebut sudah memiliki tunjangan guru terpicil sehingga perlu untuk diarahkan baik dari segi penyampaian materi di sekolah, proses belajar-mengajar maupun bersikap kepada para murid/peserta didik. Sehingga dalam rangka penyampaian tujuan yang diharapkan. Selain itu penuturan Kepala

Sekolah diatas didukung oleh seorang guru yang mengajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang mengungkapkan bahwa:

“Tentunya sikap berwibawa dalam proses belajar-mengajar sudah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terlepas dari tenaga pendidik baik pun memposisikan diri sebagai guru maupun sebagai orang tua para murid saat berada di sekolahan. Peran guru sangat penting keberadaanya selain sebagai pendidik, guru juga bertugas untuk mengayomi, mengajar dan membimbing para murid selayaknya sebagai anaknya sendiri”.

Menurut hasil penuturan diatas dapat dilihat bahwa guru sebagai tenaga pendidik di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang tercermin bahwa guru dalam menjalankan tugasnya haruslah menyesuaikan siatuasi dan kondiri seperti pada tingkat SD, SMP dan SMA. Pada tingkat SD selayaknya guru sebagai tenaga pendidik para murid maka guru menposisikan dirinya sebagai pembimbing layaknya membimbing anak-anaknya.

Pada hasil wawancara selanjutnya yang disampaikan oleh salah satu orang tua siswa di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang mengungkapkan bahwa:

“Saya salah satu orang tua murid kelas 1 di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang ini, menurut saya pada saat ini masih ada guru yang kurang sabar dalam menghadapi para murid di sekolahan. Semestinya sikap sabar, kewibawaan serta rasa keibuan dan kebakakan diperlukan oleh figur seorang guru”.

Menurut hasil ungkapan diatas bahwa sebenarnya masih adanya perilaku guru di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang yang masih

menunjukkan sikap yang kurang baik. Tentunya orang tua murid menginginkan sosok figur guru yang baik untuk memberikan didikan kepada anak-anak mereka di sekolah. Guru memang semestinya memiliki sikap kewibawaan, ketegasan, rasa keibuan atau kebpakan dalam menunjang keprofesionalan seorang guru sebagai tenaga pendidik demi pencapaian tujuan dan harapan yang diinginkan oleh orang tua murid di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang.

Berdasarkan hasil wawancara diatas membuktikan bahwa guru-guru yang mengajar di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang sudah mendapatkan tunjangan guru terpencil dan dikatakan layak sebagai seorang guru. Kelayakan guru bila dikaitkan dengan teori dari Winardi, yang menjadi persoalan adalah sumber daya yang menjadi input program ini adalah guru yang bertugas di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang terutama, mereka yang sudah mendapatkan tunjangan guru terpencil apakah layak dari segi kopetensi kepribadaian, dimana merka telah bersikap dan menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, berwibawa, arif, bijaksana, berperilaku jujur, tegas dan manusiawai.

b. Proses dan Mutu Hasil Pendidikan

Pada aspek ini penulis akan menjelaskan bahwa dari jalannya proses mutu hasil pendidikan. Proses pendidikan disini merupakan proses perencanaan dalam menyiapkan bahan ajaran dalam proses belajar-mengajar di kelas. Proses mutu hasil pendidikan disini erat kaitannya dengan

kompetensi pedadogik. Kompetensi pedadogik merupakan kemampuan pengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Trianto dkk, 2007:72). Dimana dengan adanya tunjangan guru terpencil ini apakah dapat meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan yang dalam hal ini adalah kinerja guru dalam meningkatkan nilai siswa-siswa selama ini dan penguasaan materi oleh guru pada saat penyampaian materi.

Berikut hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis selama melakukan penelitian di lapangan dengan salah satu Kepala Bidang Pembinaan dan Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang yang mengungkapkan bahwa :

“Dari data yang diterima di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, hasil yang diperoleh belumlah sebanding dengan output hasil ujian siswa-siswi selama ini, karena pendidikan di Kabupaten Sintang masih masih jauh dari harapan, pada penilaian di wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat namun saya melihat bahwa guru-gurunya sudah dapat menguasai materi dan apabila guru sudah di tunjangan guru terpencil dan tidak mengajar selama 24 jam perminggu yang diatur dalam PP No. 74 Tahun 2008 pasal 63 maka akan dipotong tunjangan guru terpencil”.

Hal serupa juga diungkapkan dalam wawancara sebagai berikut: “guru disini menyiapkan dulu materi yang akan disampaikan kepada siswa dan penyampian tersebut tergantung dari materinya berpa kali pertemuan namun guru disini masih mengharapkan dari atas, tidak mau melakukan terobosan

hanya maunya mengajar sesuai dengan panduan buku pengajaran dan penyiapan materi. Saya selalu menanyakan guru yang bersangkutan bagaimana perkembangan proses belajar-mengajar di sekolah, pada siswa-siswi yang masih rendah nilainya kurang dari KKM, untuk ulangan harian yang harus dilaksanakan sebanyak 6 kali dalam 1 semester serta dianalisis dari hasil belajar siswa melalui remedial, untuk menilai hasil belajar ada pendekatan scientific yang harus diterapkan dengan 3 dominan yang harus dicapai siswa yaitu:

1. Sikap siswa bisa menerima dan menjalankan, menghargai, menghayati dan mengamalkan
2. Pengetahuan, didalam kelas bisa mengingat, memahami dan menerapkan, menganalisis baru dievaluasi
3. Keterampilan, mengamatai, menanya, mencoba, menalar dan menyajikan dan menciptakan”.

Guru yang mengajar di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang masih enggan untuk melakukan inovasi baru dalam proses belajar-mengajar baik pun guna peningkatan dalam proses mutu hasil pendidikan dalam pengajaran. Guru-guru di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang masih terpaku pada panduan lama yaitu berdasarkan buku pada saat melaksanakan proses belajar-mengajar. Untuk itu selain menjadi guru, beliau juga merupakan Kepala Sekolah. Dimana pada saat melakukan evaluasi terhadap guru-guru yang mengajar di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang melalui perkembangan yang terjadi dan menganalisis hasil belajar siswa-siswi dimana para siswa-siswi sudah mengerti atas penyampaian materi dengan 3 dominasi diatas. Dari hasil belajar di SD

Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang menduduki peringkat terendah pada tingkat Kabupaten Sintang.

Tabel 15
Nilai Ujian Nasional Siswa tahun 2013/2014

Uraian Nilai	Bahasa Indonesia	Matematika	IPA
Terendah	5,70	4,20	4,80
Tertinggi	8,80	8,97	8,70
Rata-rata	7,12	6,29	6,70

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang

Pada tabel diatas terlihat bahwa nilai terendah hasil ujian nasional di Kecamatan Kayan Hulu pada tahun ajaran 2013/2014 yaitu Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia masih ada pelajaran yang mendapatkan nilai 4. Sementara di Kabupaten Sintang ujian Nasional siswa cukup tinggi, rata-rata diatas 8 (delapan). Dengan demikian jelas bahwa di kecamatan Kayan Hulu yang wilayahnya termasuk terpencil di-indikasikan masih ada oknum guru yang sudah memiliki tunjangan guru terpencil tidak serta merta membuat nilai siswa-siswi menjadi lebih baik.

Menurut hasil pengumpulan oleh penulis maka dapat dilihat bahwa memang belum optimalnya peningkatan mutu hasil pendidikan di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang. Dikarenakan nilai rata-rata siswa dalam ujian nasional masih belum dapat peningkatan yang signifikan sehingga hampir tidak adanya mengalami perbaikan nilai pendidikan. Penuturan selanjutnya diungkapkan oleh seorang guru di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang, yaitu:

“Dengan melakukan remedial untuk anak yang membutuhkan perhatian “khusus” adalah tambahan jam belajar, selaku guru saya selalu menginginkan hasil nilai yang baik dari anak murid saya di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang, khususnya guna meningkatkan proses belajar-mengajar dan meningkatkan proses mutu hasil pendidikan di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang. Sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah”.

Menurut hasil ungkapan guru yang bertugas di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang di atas jelas bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk menghasilkan siswa-siswi yang cerdas ditambah lagi dengan proses penyampaian materi yang harus aktif melibatkan keaktifan siswa dalam proses belajar-mengajar di kelas. Berikut penuturan mengenai jalannya implementasi kebijakan tunjangan guru terpencil. Khususnya tentang kinerja guru dalam meningkatkan nilai siswa-siswi selama ini dan penguasaan materi oleh guru pada saat menyampaikan materi, beliau mengungkapkan bahwa:

“Dari yang saya lihat, kinerja guru untuk meningkatkan nilai siswa-siswi adalah disediakannya buku paket semua mata pelajaran agar murid mudah mengisi soal/pr, dengan adanya buku paket murid dikelas tidak lagi mencatat sehingga bisa dengan mudah dan jelas mendengarkan penejelasan yang disampaikan oleh guru serta murid juga aktif untuk mengajukan pertanyaan kepada guru pada saat proses belajar-mengajar berlangsung. Untuk penguasaan materi saya rasa sudah cukup baik, penguasaan materi merupakan peran penting sebab akan disampaikan kepada anak murid. Untuk adanya tunjangan guru terpencil yang berkaitan dengan nilai-nilai siswa-siswi tidaklah menjamin menjadi baik karena nilai NEM siswa-siswi SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang dirasakan masih rendah sehingga belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan oleh sekolah dan dinas pendidikan kabupaten sintang”.

Dari penuturan orang tua murid diatas dapat dilihat bahwa mereka menginginkan guru yang mengajar di sekolah tempat anak mereka menuntut ilmu mendapatkan pendidikan dengan baik sehingga mempermudah anaknya dalam menyerap pelajarana yang disampaikan oleh tenaga pendidik seperti guru yang mengajar di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang. Terutama dalam mengerjakan tugas/pekerjaan di rumah, sehingga anak-anak mereka dengan mudah mengisi pekerjaan rumah dengan jawaban yang diperoleh dari hasil pemebelajaran di sekolah dan melalui buku paket yang telah disiapkan oleh guru tersebut. Di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang berusaha meningkatkan kinerja guru guna mendapatkan tunjangan guru terpencil dan menguasai materi yang akan diajarkan kepada para murid-murid. Serta jika ada nilai-nilai murid yang

belum memenuhi standar nilai KKM, guru yang bersangkutan berusaha mengadakan remedial dan menganalisis materi mana yang dianggap sulit oleh siswa-siswi dan menambah nilai dengan tugas harian mereka sehingga dapat mencapai nilai KKM yang telah ditetapkan. Hal ini jika dikaitkan dengan teori Winardi yang menyangkut tentang standar implematasi yang baik menurut kebijakan yang dalam hal ini adalah kebijakan tunjangan guru terpencil maka guru yang berada di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang telah berusaha bekerja sesuai dengan standar implementasi dari kebijakan tunjangan guru terpencil. Maksudnya adalah guru-guru yang ada di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang terutama mendapatkan tunjangan guru terpencil ini telah menguasai materi yang akan diajarkan dengan baik serta memiliki perencanaan tentang materi yang akan disampaikan. Serta dengan memfotokopi materi pelatihan yang akan diikuti, walaupun masih ada yang enggan untuk melakukan terobosan atau inovasi pada saat proses belajar-mengajar namun semuanya itu guru-guru disana telah menunjukkan performans mereka sebagai guru demi mencapai KKM yang telah ditetapkan.

c. Martabat Guru

Terkait dengan martabat guru adalah mengenai kepatuhan seorang guru serta kombinasi atas kompetensi sosial, kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadaian. Dimana kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif (Trianto dkk, 2007:72) serta berkaitan sedikit tentang keberhasilan dan

kebijakan tunjangan guru terpencil. Seperti yang dipaparkan oleh Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, bahwa:

“Kembali pada prinadinya lagi guru yang seharusnya sudah tunjangan guru terpencil adalah guru yang profesioanal dan melakukan pekerjaan sehari-harinya dengan baik dilihat dari kebijakan itu sendiri relatif namun kebijakan ini masih efektif karena kebijakan ini bisa diaktakan untuk guru masa depan”.

Hasil wawancara terungkap dan disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Kabupaten Sintang seperti diatas memang tidak ekplisit namun penulis menangkap bahwa martabat guru bisa dilihat dari pribadinya. Bagaimana guru tersebut menjalankan kewajibannya, patuh atau tidak guru tersebut dalam menjalankan tugas. Serta sudah seharusnya guru telah menerima tunjangan guru terpencil tersebut melakukan pekerjaan dengan baik. Jika dinilai dari tingkat keberhasilannya Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Kabupaten Sintang memandang bahwa masih relatif, namun kebijakan ini akan berjalan secara efektif terhadap guru-guru yang mendapat tunjangan guru terpencil dimasadepan. Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, bahwa:

“Dinilai Subjektif jika kedisiplinan diukur dari batas-batas jam/absen bagi mereka yang sudah mendapatkan tunjangan guru terpencil itu mengikat”.

Dari penuturan singkat wawancara diatas, walaupun tidak menjabarkan secara panjang lebar namun inti dari ungkapan beliau adalah martabat guru dinilai masih subjektif, tidak secara objektif dimana untuk penilaian untuk mendapatkan tunjangan guru terpencil yakni terikat pada peraturan jam kantor seperti disiplin jam masuk dan mengajar di sekolah. Selain itu menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang mengungkapkan bahwa:

“Kepribadaian, sikap, moral erat kaitannya dengan lingkungan sosialnya terutama dalam berinteraksi dengan masyarakat, dengan teman-teman atau mitra, sangat diperlukan untuk menarik perhatian harus ramah agar mereka beranggapan bahwa sebenarnya kita adalah pelayan masyarakat atau pelayan anak-anak serta apabila dikaitkan dengan kompetensi pedagogik, cara kita masuk ke dunia mereka dari keberhasilan implementasi mendapatkan tunjangan guru terpencil ini masih belum maksimal guru masih jalan di tempat tidak malakukan terobosan baru”.

Sejalan dengan Penuturan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang adalah martabat guru bisa dilihat dari kepribadiannya, sikap, dan moral apabila dikaitkan dengan mitranya atau temannya. Namun penuturan kepala sekolah disini walaupun tidak dijelaskan secara detail namun penulis dapat menangkap bahwa dengan bersikap ramah dapat menarik perhatian lingkungan sekitar agar

tercipta citra yang mengenai Sekolah Dasar tersebut. Serta apabila ditelisik lebih jauh penuturan kepala sekolah mengenai keberhasilan kebijakan mendapatkan tunjangan guru terampil masih maksimal karena masih ada reakan kerja yang terbilang malas untuk melakukan inovasi baru terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini. Dimana mereka masih berpatokan kepada buku yang ada serta masih menggunakan metode ceramah, yaitu masih menjelaskan sesuai apa yang ada di buku. Selanjutnya penuturan yang penulis terima dari salah satu guru yang disertifikasikan di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang, tidak jauh berbeda seperti yang diungkapkan oleh narasumber diatas, seperti: *“Kalau dilihat dari keberhasilan cukup baik, kalau martabat guru bisa dilihat dari kepribadiannya karena itu hal yang sangat penting”*.

Dari hasil wawancara diatas walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit namun inti dari adalah keberhasilan dari implementasi kebijakan mendapatkan tunjangan guru terampil ini cukup baik, walupun jika harus dilihat dari nilai kelulusan siswa masih jauh dari harapan. Segala sesuatu memerlukan proses dan proses tersebut memerlukan perencanaan dan realisasi untuk menunjang profesi mereka sebagai seorang guru dalam rangka mencapai tujuan visi dan misi sekolah yaitu meningkatkan kualitas lulusan peserta didik sehingga dapat mencapai target yang diinginkan. Hasil wawancara dengan salah satu orang tua siswa dimana anak mereka bersekolah di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang, mengungkapkan bahwa:

“Keberhasilan kebijakan terkait dengan penyaluran tunjangan guru terpencil dan kosep martabat guru bahwa keberhasilannya mungkin bisa dikatakan 40 persen saja, karena tunjangan guru terpencil tidak menjamin apabila guru tersebut tidak mempunyai jiwa kebpakaan, kesabaran, ketegasan, kedisiplinan dan menguasai materi dengan baik karena tunjangan guru terpencil diberikan berdasarkan masa kerja, pangkat, dan golongan guru bukan berdasarkan penilaian murid apakah guru tersebut sudah cukup baik dalam mengajar”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas bahwa di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang ini keberhasilan kebijakan penyaluran tunjangan guru terpencil ini masih belum optimal , karena tunjangan guru terpencil ini tidak menjamin apabila guru tersebut tidak memiliki jiwa mengajar yang dibuktikan dengan tidak adanya wibawa, ketegasan, dan rasa kebpakaan dalam menunjang profesinya sebagai seorang guru demi tercapainya tujuan yang diharapkan oleh oarang tua dan sekolah.

Berdasarkan beberapa peraturan diatas membuktikan bahwa guru-guru yang mengajar di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang terutama guru yang sudah mendapatkan tunjangan guru terpencil sudah bisa dikatakan layak sebagai seorang guru sehingga dapat melaksanakan tugas dan bersikap seperti seorang guru yang bertugas membimbing dan mendidik siswa-siswi serta berinteraksi dengan siswanya dengan sikap tegas dan kenunjukan kewibawaan dengan tidak terlepas dari sikap sebagai seorang guru. Tentu dalam hal ini kegiatan yang dilaksanakan oleh guru yang telah mendapatkan tunjangan guru terpencil di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang tersebut terkait dengan kegiatan belajar-mengajar, masuk

kerja, yang menunjukkan kepatuhan dan kedisiplinan guru tersebut terhadap standar dari kebijakan penyaluran tunjangan guru terpencil dan tentunya akan tercipta keberlangsungan prose belajar mengajar yang nyaman dan dapat dipertanggungjawabkan materi yang disampaikan untuk meningkatkan kecerdasan siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

d. Profesionalisme Guru

Dimana dalam hal ini terkait dengan apakah dengan adanya pemberian tunjangan guru terpencil guru mau meningkatkan kemampuan mereka dalam proses belajar mengajar agar menjadi guru yang profesional. Kompetensi profesional guru disini adalah dimana kemampuan penguasaan materi, pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar profesional.

Guru dalam profesioanalisme disini harus memiliki kulifikasi akademik menimun sarjana (S-1) maupun diploma empat (D-IV) yang mana setidaknya guru tersebut mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja selama 20 tahun sebagi guru serta memiliki angka dan memenuhi kredik kumulatif sebagai gurur yang profesional serta memiliki tunjangan guru

terpencil dan memiliki sertifikat pendidik yang sehat secara jasmani dan rohani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang terkait dengan tunjangan guru terpencil dengan jelas mengungkapkan bahwa. *“kebijakan tunjangan guru terpencil ini sudah tepat tapi perlu dilakukan evaluasi kembali untuk memberikan suport kepada guru yang bekerja dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan guru itu sendiri, karena tunjangan guru terpencil ini berbasis kinerja”*.

Dari penjelasan tersebut diatas jelaslah bahwa tunjangan guru terpencil ini bisa memacu para guru untuk terus bisa meningkatkan kemampuannya dan kinerjanya sebagai seorang guru. Oleh karena itu perlu kebijakan ini di lanjutkan dan harus dievaluasi agar kebijakan penyaluran tunjangan guru terpencil lebih tepat sasaran dan dapat memacu peningkatan mutu pendidikan terhadap hasil lulusan sekolah tersebut. Selanjutnya hasil wawancara menurut guru di SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang mengungkapkan bahwa:

“Dengan adanya tunjangan guru terpencil ini, sebagi stimulan untuk menambah kemauan karena ada timbal baliknya, serta guru yang ada perlu mengetahui terkait dengan fasilitas IT, dan menstandarkan guru-guru untuk mengaplikasikan modul bantuan mengajar seperti mengoprasionalkan power poin dengan menggunakan laptop dan dapat memudahkan peserta didik untuk menerima materi yang diajarkan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas bahwa tunjangan guru terampil harus bisa menyesuaikan dengan kemajuan terhadap teknologi yang digunakan untuk proses belajar mengajar terhadap peserta didik dalam menyampaikan materi yang mana secara otomatis dapat meningkatkan kemampuan seorang guru secara profesional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang mengungkapkan bahwa: *“Relatif baik namun sudah tepat untuk menunjang kegiatan guru dalam proses belajar-mengajar disertai dengan pelatihan yang sudah menerima tunjangan guru terampil oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang”*.

Dengan demikian jelas bahwa penyaluran tunjangan guru terampil ini sangat diperlukan didalam meningkatkan keprofesionalan guru dalam mendedikasikan materi pelajaran yang bisa dipahami oleh peserta didik, dan dapat menlancarkan proses belajar-mengajar guna menunjang peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan peserta didik.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyaluran Tunjangan Terampil dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Guru

a. Kemampuan (*competency*) Guru

Salah satu faktor yang cukup penting dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat, baik bersifat langsung maupun tidak langsung bagi guru pegawai negeri sipil cenderung disebabkan kemampuan. Dalam hal

kemampuan mempunyai perspektif yang luas. Kemampuan untuk memimpin, kemampuan berkomunikasi, kemampuan merencanakan program maupun kemampuan menyelesaikan tugas dan masalah. Sehubungan dengan itu, kemampuan selalu dijadikan tanda tanya untuk melaksanakan tugas dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah secara mencolok dengan guru di sekolah. Hal ini cenderung disebabkan setiap personil hanya melakukan tugas selalu berdasarkan uraian tugasnya masing-masing, sehingga diluar bidang tugasnya kurang diperhatikan. Menurut informan, realitas ini cukup beralasan karena setiap personil pegawai mempunyai tugas cukup padat yang seharusnya dikerjakan oleh beberapa guru. Kondisi tersebut menyebabkan mereka larut dalam bidang tugasnya. Apabila ada kegiatan yang mengharuskan mereka ke luar (lapangan) harus diperintah kepala sekolah meskipun pekerjaan tersebut dalam bagian tugasnya. Sikap konsekuensi ini di dasari kemampuan mereka dalam memahami tugas yang mendesak (spontan) dan tidak mendesak.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa apa yang disebut kemampuan sangat bersifat relatif. Meskipun demikian setiap personil/pegawai harus menunjukkan dedikasi dalam pekerjaannya. Secara umum pola tugas yang harus diselesaikan dari tahun ke tahun cenderung sama, sehingga perlu dipersiapkan metode yang proporsional agar semua tugas, baik di dalam maupun di luar sekolah terakomodir dengan baik. Dengan demikian dalam hal kemampuan setiap guru mempunyai predikat siap mengajar. Oleh karena itu seyogyanya dalam kondisi pekerjaan yang padat perlu gagasan atau inisiatif untuk memperoleh solusi yang tepat. Banyaknya tenaga guru jika

tidak diarahkan secara proporsional tidak akan merubah situasi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan individu untuk bersosialisasi dengan pekerjaan yang menjadi tugasnya melalui pembinaan kepala sekolah kepada guru masing-masing. Kemampuan guru suatu instansi menjadi tolok ukur kinerja instansi yang bersangkutan secara holistik. Rendahnya kemampuan pada salah satu bidang pada suatu instansi akan membawa pengaruh buruk bagi instansi tersebut. Kemampuan setiap guru selalu berbeda, akan tetapi tidak bersifat konstan. Untuk meningkatkan kemampuan harus dibina, dilatih secara kontinyu. Hal ini disebabkan kemampuan tidak datang dengan sendirinya, melainkan karena faktor kebiasaan dan keinginan keras untuk mencapai target yang diinginkan.

Kepala Sekolah ketika diwawancarai menyatakan, bahwa untuk meningkatkan kemampuan guru sangat diperlukan pendidikan dan latihan yang relevan. Hal tersebut sangat diperlukan karena sering terjadinya restrukturisasi guru di SD Negeri, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang. Meskipun dapat dikatakan guru yang ada di lingkungan SD Negeri, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang sudah cukup senior, tetapi bukan senior di Sekolah yang sedang ditekuninya sekarang. Dengan demikian pengalaman mengajar dan kemampuannya di sekolah yang baru masih sangat minim.

Pendidikan dan pelatihan guru sangat diperlukan. Selain untuk meningkatkan skill dan kemampuan sangat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan, membuka cakrawala berpikir agar lebih inovatif dan kreatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dari aspek psikologis, adanya pendidikan dan latihan dapat mengurangi kejenuhan dalam rutinitas yang

monoton. Sehubungan dengan itu, guru yang sudah mendapat pendidikan dan latihan tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi mendapatkan semangat kerja yang baru. Implikasi dari kondisi itu maka dapat meningkatkan kemampuan dan etos kerja yang tinggi atau maksimal. Aspek psikologis bersifat laten, sehingga kurang dipahami secara intens oleh semua pihak, akan tetapi mempunyai dampak cukup riil dalam hal kinerja guru.

Pendidikan dan latihan merupakan suatu hal yang mutlak untuk meningkatkan kemampuan kerja guru. Akan tetapi pendidikan dan latihan yang diperoleh harus diaplikasikan secara berkesinambungan, sehingga apa yang telah dipelajari dapat diberdayakan sebagaimana mestinya. Suatu kesia-siaan dan pemborosan dana dan waktu apabila kegiatan pendidikan dan pelatihan hanya dianggap sebagai suatu program. Di lain pihak, apabila guru sudah mendapatkan pendidikan dan latihan, tetapi tidak menunjukkan kemampuan yang signifikan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat dikatakan guru tersebut sangat tidak potensial. Alternatif yang cukup efektif untuk kategori guru seperti tersebut di atas, perlu diadakan penyegaran dengan cara peralihan bidang tugasnya.

Pendidikan dan latihan pada dasarnya merupakan jaminan untuk meningkatkan kemampuan (*competency*) setiap guru. Hal ini tergantung sikap (*attitude*) guru itu sendiri bagaimana memandang dan memanfaatkan kesempatan tersebut. Jika mempunyai prinsip bahwa pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja sudah selayaknya kesempatan tersebut dijadikan momentum untuk menimba ilmu pengetahuan sebaik-baiknya. Apabila ada orientasi atau motif yang berbeda, besar kemungkinan

program pendidikan dan latihan tidak berpengaruh meningkatkan kemampuan guru.

Sehubungan hal itu, diperlukan tindakan atasan secara arif, terutama mengetahui hal-hal yang menyangkut latar belakang pegawainya. Terlebih dahulu perlu ditelusuri latar belakang pendidikan dan selanjutnya latar belakang keluarga. Melalui latar belakang yang ada pada guru dapat ditemukan solusi dalam pemberdayaan guru dengan menunjukkan kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan lancar dan sistematis.

Untuk meningkatkan kemampuan kerja guru di lingkungan SD Negeri, kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang mempunyai peran yang cukup besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dapat diketahui bahwa:

“Semua pembiayaan pendidikan dan latihan guru lingkungan SD Negeri, Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang melalui Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan turut bertanggung jawabnya untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (skill) guru di setiap instansi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan dalam pelaksanaannya cenderung kearah pemerataan kesempatan meningkatkan kualitas dan kemampuan guru”.

Di lain pihak, strategi ini cukup representatif untuk memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan guru di setiap instansi yang bernaung dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Dinas Pendidikan dalam sewaktu-waktu dapat memutasikan guru di lingkungan masing-masing sekolah sesuai dengan keperluan.

Guru di lingkungan SD Negeri, kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang memiliki kemampuan, baik pengetahuan maupun skill mempunyai tendensi untuk kelancaran pelayanan terhadap masyarakat. Lebih lanjut program tersebut menunjukkan kepeduliannya terhadap pegawai, karena selaku organisasi yang mempunyai kewenangan dalam pemberdayaan pegawai Pemerintah Kabupaten Sintang mereka harus proaktif dan jeli melihat situasi di lingkungannya.

Menurut penjelasan informan, karena terbatasnya dana maka tidak semua guru di SD Negeri mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan secara serempak. Oleh karena itu di berikan prioritas kepada guru yang paling mendesak untuk mendapatkan kesempatan terlebih dahulu. Setiap guru yang diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang dibiayai Dinas Kabupaten Sintang sudah ditentukan besar jumlahnya. Untuk merealisasi azas pemerataan, maka umumnya diatur secara bergantian bagi guru yang ada, terutama diberikan kesempatan kepada mereka yang membutuhkan tetapi belum pernah mengikuti program pendidikan dan latihan IT .

Dapat diungkapkan, bahwa terjadinya ketergantungan dana pendidikan dan latihan dari Dinas Pendidikan dapat menyebabkan terlambatnya guru-guru dalam suatu instansi memperoleh pengetahuan dan ketrampilan. Kondisi seperti ini harus diimbangi dengan kepiawaian kepala sekolah mengkoordinir maupun mengarahkan staf-stafnya agar menyelesaikan pekerjaan dengan sistematis. Apabila tidak diarahkan secara benar, maka banyak terjadi kelalaian dan keterlambatan penyelesaian pekerjaannya. Oleh karena itu setiap kepala instansi selalu

melakukan *monitoring* dan evaluasi secara rutin. Hal ini sangat perlu untuk menemukan kelemahan dalam mekanisme kerja yang telah diterapkan sejak dahulu. Dengan menemukan kelemahan dalam menyelesaikan pekerjaan mengajar yang menjadi tugas guru tersebut, maka dapat dicari formulasi yang relevan dan tepat untuk menyelesaikan setiap pekerjaan dalam mengajar dengan tepat waktu dan profesional. Sesuai ungkapan kepala sekolah, bahwa

“Selain melalui pendidikan dan latihan terdapat cara lain untuk meningkatkan kemampuan guru yang ada. Cara lain tersebut berupa pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada guru untuk menyelesaikan pekerjaannya melalui petunjuk langsung, pengarahan secara mendetil dan koreksi yang ketat dari kepala sekolah. Akan tetapi metode ini tidak dapat dilakukan secara berkesinambungan, disebabkan banyaknya tugas-tugas selaku kepala sekolah yang harus diselesaikan”.

Sistem *monitoring* dan evaluasi dari kepala sekolah langsung cukup relevan, namun tidak terlalu efektif. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu dari atasan dan adanya kesan bahwa kepala sekolah bersifat otoriter terhadap stafnya. Kesan tersebut dapat menimbulkan kesenjangan antara kepala sekolah dan guru. Sebagai dampaknya guru hanya akan bekerja dengan baik apabila di depan kepala sekolah, tetapi dibelakang kepala sekolah mereka akan bekerja semauanya sendiri. Sikap seperti ini sangat tidak mendukung kelancaran aktivitas di proses belajar mengajar.

Untuk meningkatkan kemampuan kerja para guru di luar program pendidikan dan latihan hendaknya dilakukan pembinaan sikap dan mental

terlebih dahulu. Hal ini sangat penting karena guru yang memiliki sikap mental yang baik dapat beradaptasi dengan pekerjaan yang harus diselesaikannya. Dengan kata lain, mereka lebih mendahulukan aspek prestasi daripada kompensasi atau insentif. Oleh karena itu, aspek sikap dan mental guru merupakan aspek yang penting untuk meningkatkan kinerja guru dengan wajar. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Sekolah, bahwa:

“Terjadi peningkatan kemampuan yang signifikan bagi pegawai yang sudah mendapatkan pendidikan dan latihan, jika dibandingkan guru yang belum pernah mendapatkannya. Hal ini sangat wajar, karena selain program pendidikan dan latihannya disesuaikan dengan kebutuhan guru, juga guru yang telah mendapatkan kesempatan diklat mempunyai tanggungjawab moral yang besar terhadap sekolah yang telah merekomendasikannya”.

Hasil pendidikan dan latihan dapat mengungkapkan bahwa betapa besarnya peran dan fungsi diklat dalam meningkatkan kemampuan guru selaku Sumber Daya Manusia. *Out put* yang dihasilkan diklat memberikan suatu harapan yang positif dalam menangani rendahnya kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya. Target sederhana atau minimal bagi guru yang telah mengikuti diklat adalah dapat meningkatkan kemampuan yang standard dalam mengajar.

Peningkatan kemampuan melalui diklat adalah suatu hal wajar dan logis. Akan tetapi kemampuan tersebut hendaknya terus diasah agar dapat berkembang secara fleksibel. Hal ini disebabkan pola pekerjaan disekolah sangat bervariasi, dan jika tidak kreatif maka pendidikan dan latihan yang pernah dialaminya tidak dapat mengakomodir dalam menyelesaikan

pekerjaan di sekolah yang menjadi tugasnya. Rendahnya kemampuan bekerja guru di SD Negeri cenderung disebabkan disposisi. Terjadinya restrukturisasi guru dilingkungan sekolah tersebut yang bersifat rolling dengan tujuan penyegaran sangat berakibat fatal dan berpengaruh negatif terhadap kemampuan guru, hal ini disebabkan guru yang selalu berdinamis dipindahkan bidang tugasnya mata pelajaran yang lain yang bukan bidangnya, mereka tidak mampu beradaptasi atau menyelesaikan apa yang seharusnya menjadi kewajiban atau tugas pokoknya.

Rendahnya kemampuan guru SD Negeri, tidak dapat dikatakan rendah kemampuan pada semua lini. Hanya faktor kebiasaan yang sangat mendominasi mengapa kemampuan guru tidak standar. Pada sisi lain perlu adanya ketegasan dari atasan langsung seperti Kepala Sekolah untuk memberdayakan stafnya supaya tidak terjadi stagnasi dalam merespon berbagai tugas dan pekerjaan yang harus dikerjakan. Dengan mendapatkan porsi pekerjaan yang jelas dari atasan dapat diketahui bagaimana sikap masing-masing guru. Akan tetapi atasan tersebut lebih dahulu mengetahui secara jelas mengenai pekerjaan yang harus diselesaikan. Jika kepala sekolah tidak mengetahui dengan jelas sangat mungkin untuk menjelaskan atau memberi pengarahan secara tepat terhadap staf-stafnya. Oleh karena itu kepala sekolah perlu meningkatkan kemampuannya agar dapat ditransfer kepada para guru.

b. Penempatan Guru

Ketepatan dalam menempatkan guru merupakan faktor penting untuk menyelesaikan pekerjaan sistematis. Apabila guru yang ditempatkan sesuai

dengan kemampuannya dapat di peroleh volume kerja mengajar yang seimbang. Pada kenyataan yang ada masalah ini cukup rumit, karena tidak semua guru dapat langsung menunjukkan eksistensinya. Padahal penempatan guru sangat relevan kenyamanan dan kelancaran aktivitas di sekolah. Sehubungan dengan itu, dalam menempatkan para guru memerlukan ketelitian serta berdasarkan kebutuhan .

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dapat diketahui bahwa:

“Mekanisme penempatan guru selalu berdasarkan pada bidang mana yang kekurangan personil. Secara teknis hal tersebut diatur oleh kepala sekolah. Adapun mengenai proses setiap sekolah dapat memperoleh tenaga guru baru yaitu sebelumnya kepala sekolah mengadakan usulan kepada Dinas Pendidikan kabupaten Sintang agar dapat menambah tenaga guru dengan rincian kebutuhannya, dan tidak semuanya usulan tersebut dipenuhi”.

Setelah tenaga guru berhasil direkrut kemudian dimutasikan kepada sekolah SD Negeri. Langkah selanjutnya adalah kewenangan Dinas menempatkan guru tersebut. Pada penempatan awal, guru baru cenderung ditempatkan di bagian yang kekurangan personilnya. Hal ini dilakukan tanpa mempertanyakan kemampuan guru tersebut.

Permintaan terhadap tenaga guru adalah suatu yang lumrah. Disamping karena faktor regenerasi dapat juga disebabkan bertambahnya volume pekerjaan di sekolah, sehingga guru yang telah ada sangat kewalahan menangani tugasnya dengan baik. Akan tetapi bertambahnya tenaga guru dengan kondisi yang kurang memahami job discription maka kurang

memberi pengaruh positif. Penambahan tenaga guru memang mutlak dilakukan akan tetapi bagaimana menempatkan mereka sehingga berdedikasi dan berprestasi harus dipertimbangkan.

Penambahan tenaga guru cenderung memenuhi aspek kuantitas, tetapi belum dapat memenuhi aspek kualitas. Pada umumnya tenaga guru baru tidak dapat cepat beradaptasi dengan pekerjaannya. Harus ada bimbingan dan pengarahan agar mereka mempunyai kemampuan bekerja. Hal ini tidaklah mudah dilaksanakan, mengingat keterbatasan fasilitas pendukung yang dimiliki sekolah. Dengan bertambahnya tenaga guru sudah sepihak beban pekerjaan semakin ringan. Oleh karena itu sangat diperlukan kejelian dari Dinas Pendidikan menempatkan atau mengatur posisi guru yang ada sesuai dengan keterampilan.

Untuk menangani pekerjaan di sekolah secara seimbang setiap bidang, maka dapat saja dilakukan sistem tambal sulam. Dalam artian beberapa guru senior yang mempunyai kemampuan disebarkan secara merata untuk memberikan bimbingan pada guru baru. Hal ini akan bermanfaat untuk menghindari penumpukan guru pada salah satu bidang pekerjaan. Strategi ini sangat efektif untuk memberdayakan jumlah tenaga guru yang besar. Banyaknya jumlah guru tetapi lebih dominan hanya sebagai penonton, dapat menimbulkan kecemburuan maupun prasangka yang negatif. Bahkan dapat menimbulkan kesan bahwa guru di sekolah tersebut sangat asal-asalan atau tidak berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dapat diketahui bahwa

“Pegawai yang ditempatkan untuk mengisi jabatan belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sekolah . Hal ini dapat diketahui dari kinerja yang telah ditunjukkan mereka selama ini. Meskipun selalu dapat diselesaikan, tetapi belum memuaskan”.

Realitas ini tidak hanya terjadi pada guru junior, tetapi juga terjadi guru senior. Kondisi ini cenderung disebabkan guru senior yang ada di sekolah SD Negeri 21 Manaluk adalah guru yang secara teknis merupakan pengajar yang kurang menguasai materi pelajaran. Oleh karena itu, meskipun banyaknya guru senior sering tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Kekeliruan dalam penempatan guru, disebabkan mekanisme struktural. Dengan dasar pertimbangan pangkat/ golongan, dan pendidikan yang dimiliki guru senior maka mereka dapat dipromosikan untuk menjabat suatu bidang mata pelajaran yang tidak dipahaminya. Lebih ekstrim lagi, yaitu apabila promosi tersebut didasari kolusi dan nepotisme. Kasus seperti ini sangat memprihatinkan, karena mereka yang dipromosi seringkali tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, pangkat/golongan dan senioritas.

Terjadinya kekeliruan dalam penempatan guru telah diciptakan dari lembaga yang mempunyai wewenang. Sebagai sekolah yang harus menerima suplai guru tidak mungkin menolak, meskipun mengetahui latarbelakang guru tersebut. Dalam hal ini, selaku penerima suplai guru sekolah berusaha

semaksimal untuk memberdayakan guru tersebut agar dapat bekerjasama dengan baik.

Penjelasan yang diutarakan Kepala UPT Kecamatan, dapat diketahui bahwa pengisian jabatan tidak selalu mengacu pada syarat kualifikasi pendidikan. Dalam ketentuan seharusnya ada jenjang pendidikan tertentu yang ditempuh setiap guru untuk menduduki suatu jabatan. Disebabkan keterbatasan guru yang memiliki kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, maka penempatan guru belum dapat diterapkan.

Penempatan guru di SD Negeri, cenderung berdasarkan pertimbangan senioritas dan kemampuan. Hal ini disebabkan mereka cenderung memberdayakan guru yang sudah ada. Realitas ini terus saja berlanjut dari tahun ke tahun. Akan tetapi pola tersebut merupakan kebijakan yang wajar, karena tidak selamanya guru menghabiskan masa baktinya di satu bidang pekerjaan sebagai pengajar saja.

Adanya mutasi bagi pegawai senior yang mempunyai kemampuan proporsional dalam pekerjaan tanpa menciptakan kaderisasi yang baik menurut penulis, merupakan penghancuran sistem secara perlahan. Masuknya beberapa guru senior dengan pangkat/golongan yang pantas dan pendidikan memadai untuk mengemban suatu jabatan belum menjadi jaminan dapat menjalankan tugas dengan baik dan lancar, karena secara khusus setiap pekerjaan di sekolah terdapat perbedaan.

Suatu yang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap sekolah selalu mencetak tenaga guru secara profesional. Akan tetapi apabila setiap guru

yang mempunyai kemampuan bekerja selalu dimutasikan, baik disebabkan prestasi maupun unsur lainnya akan menimbulkan problem tersendiri . Kebijakan seperti tersebut di atas sangat identik dengan pemanfaatan suatu instansi sekolah untuk melatih tenaga guru untuk kepentingan sekolah dengan tujuan tertentu

Tidak diterapkannya ketentuan kualifikasi pendidikan untuk menduduki suatu jabatan dapat menimbulkan pro dan kontra antara guru di sekolah. Hal ini disebabkan kepala sekolah yang merekomendasi jabatan tertentu berdasarkan pertimbangan kemampuan kerja. Pada sisi lain, guru yang merasa lebih senior dianggap tidak diperhatikan posisinya. Dilema ini tidak jarang membuat kelancaran proses menajara terganggu, tidak mendapatkan dukungan semua pihak. Kondisi yang demikian seringkali menimbulkan berbagai prasangka negatif, dimana sekolah mempunyai kebijakan pilih kasih atau menganak emaskan guru tertentu padahal masa kerja relatif muda dan pendidikannya kurang mendukung untuk menduduki salah satu jabatan.

Kepala Sekolah menurut penjelasannya, bahwa

“Penempatan gurunya belum mengacu pada the right man on the right place. Hal ini disebabkan kuantitas dan kualitas guru yang belum memadai. Meskipun langkah-langkah ke arah tersebut terus diperjuangkan tetapi belum dapat direalisasikan dalam waktu yang singkat”.

Menurut penulis, konsep *the right man on the right place* sangat diperlukan. Kepentingan masyarakat semakin hari terus meningkat, serta

menuntut pelayanan yang prima dan profesional dari setiap sekolah . Keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan secara prima dan profesional adalah suatu hal yang normal, karena mereka adalah subyek dan obyek yang memberikan kontribusi untuk daerah.

Sungguhpun konsep *the right man on the right place* belum dapat dilaksanakan, tidak berarti guru yang melaksanakan tugas dapat melakukan penyimpangan-penyimpangan. Acuan berdasarkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis selalu dijadikan patokan. Oleh karena guru yang ada di sekolah tidak perlu mempermasalahkan kapasitasnya untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya. Sebagai guru yang berdedikasi selayaknya bertanya apa pekerjaan yang harus diselesaikan, bukan bertanya siapa yang harus menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Penjelasan informan yang diliput dari guru, dapat diketahui bahwa:

“Kepala sekolah mempunyai peran dalam menempatkan guru. Adanya kebijakan tersebut didasari oleh kebutuhan, terutama yang bersifat mendesak. Pada situasi normal kebijakan tersebut tidak akan dilakukan, karena terjadinya perubahan penempatan akan berpengaruh terhadap efektivitas kerja sebagai pengajar”.

Perubahan penempatan dari Dinas Pendidikan karena ada kebutuhan dan kepentingan pekerjaan merupakan suatu sikap yang responsip atau tanggap terhadap situasi. Selama kebijakan tersebut bersifat membangun dan

positif tidak perlu ragu untuk mengambil suatu keputusan. Selaku pejabat pengambil keputusan (*policy making*) sudah menjadi kewajibannya menentukan langkah, menciptakan suasana harmonis membentuk tim yang solid dan memperbaiki berbagai struktur. Adanya peran Dinas dalam menempatkan guru bukan berarti akan memanfaatkan sikap “*like and dislike*”, karena sikap seperti akan memicu konflik internal dalam tubuh sekolah itu sendiri. Apabila terjadi konflik internal berbagai aspek dapat menjadi lumpuh, sehingga keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan tidak dapat diperoleh secara alami.

c. Kewenangan dan Tanggung jawab Guru

Dalam melaksanakan setiap pekerjaan seringkali muncul berbagai pertanyaan, siapa yang mempunyai wewenang dan siapa yang bertanggung jawab. Kedua unsur tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap mereka yang memiliki wewenang sudah sepantasnya memiliki tanggung jawab. Semakin besar wewenang semakin besar tanggung jawab, sehingga kedua unsur ini selalu membentuk garis lurus. Meskipun pada kenyataan yang ada seringkali orang menginginkan wewenang yang besar, tetapi tanggung jawabnya kecil.

Wewenang selalu diasumsikan sebagai harapan, sedangkan tanggung jawab diidentikkan dengan resiko. Oleh sebab itu, setiap guru yang bekerja selalu ingin mengetahui batasan yang menjadi wewenangnya. Hal ini sangat diperlukan, karena untuk mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan sebagai

pengajar yang telah dilakukannya. Di lain pihak, guru tidak mungkin berbuat di luar wewenang yang dimilikinya. Selain dapat dikatakan melampaui wewenang kemungkinan tidak akan mendapat dukungan, terlebih lagi mengingat resiko yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan komite sekolah, dapat diketahui bahwa:

“Pelimpahan wewenang biasa terjadi apabila atasan berhalangan dan kekosongan jabatan karena mutasi dan lain sebagainya. Pelimpahan wewenang tersebut untuk menghindari kevakuman akibat tidak adanya atasan sebagai kepala sekolah, sehingga pelimpahan wewenang yang dimaksudkan selalu berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Penjelasan yang dikemukakan informan dalam penelitian ini terungkap bahwa:

“Pelimpahan wewenang sangat erat kaitannya dengan dedikasi dan sikap guru. Hal ini cukup beralasan, karena jika terjadi kelalaian dapat mengecewakan bagi yang memberikan wewenang. Oleh karena dalam pelimpahan wewenang tidak terindikasi oleh unsur prestasi dan kinerja guru yang bersangkutan.

Pelimpahan wewenang dapat diterapkan secara akurat. Guru mendapatkan pelimpahan wewenang tetap dari jalur yang relevan dengan tugas yang diembannya. Sehubungan dengan itu, perlu batasan wewenang yang jelas, sehingga pertanggung jawaban diberikan sesuai kapasitasnya. Di lain pihak, kekosongan jabatan supaya segera dapat diatasi karena mereka yang mempunyai dalam jabatan ganda dikhawatirkan tidak berkonsentrasi penuh terhadap pekerjaannya. Situasi tersebut dapat mempersulit posisi guru

yang dilimpahkan wewenang, karena besarnya volume pekerjaan dan tanggung jawab dapat membentuk sikap arogan ataupun depresi. Fenomena ini dapat menjadi polemik yang berakibat fatal.

Adanya pelimpahan wewenang berarti ada yang mempertanggung jawabkan sebagian tugas-tugas sekolah secara khusus. Pada dasarnya semua guru mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang sama, akan tetapi memiliki batasan sendiri-sendiri. Dengan demikian setiap guru dapat mengembangkan prestasi kerjanya guru berdasarkan wewenang dan tanggung jawab. Wewenang yang jelas akan memberikan keleluasaan guru menunjukkan dedikasi bagi sekolahnya.

Kepala Sekolah dalam wawancaranya, untuk memberikan pelimpahan wewenang tidak ada yang menjadi syarat khusus. Akan tetapi agar pelimpahan wewenang dapat berfungsi seperti yang diinginkan, maka perlu dilakukan pertimbangan tanpa melewati kriteria yang prinsip. Oleh karena itu, sebelum menentukan pilihan dalam pelimpahan wewenang terlebih dahulu ditinjau faktor-faktor yang mendukung, jika diprediksi layak dan mampu selanjutnya diproses.

Persyaratan khusus untuk mendapatkan pelimpahan wewenang sangat diperlukan. Akan tetapi menurut penulis tidak perlu diekspose secara transparan, karena dikhawatir akan menjadi target guru yang ambisuis, tetapi tidak mempunyai kemampuan. Selaku pejabat yang dapat memberikan pelimpahan wewenang harus mempunyai catatan pribadi tentang guru yang

akan diberikan pelimpahan wewenang. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila ada kritikan atau sorotan publik yang bermuatan negatif.

Pada dasarnya pelimpahan wewenang bukanlah suatu keharusan selama masih ada alternatif lain. Akan tetapi jika terjadi kekosongan jabatan yang relatif lama, maka pelimpahan wewenang sebaiknya dapat dilaksanakan. Kebijakan ini tidak dapat dianggap sebagai sikap monopoli pejabat yang berwenang. Sesuai dengan jabatan dan fungsinya maka guru yang diberikan pelimpahan wewenang harus mampu menunjukkan kemampuan bekerja khususnya mengajar, sehingga tidak menimbulkan kesan formalitas, melainkan betul-betul mempunyai komitmen yang kuat untuk melakukan pekerjaan belajar mengajar dengan sukses.

Menurut informan wawancara yang diliput dari guru di SD Negeri, bahwa adanya:

“Pelimpahan wewenang tidak menunjukkan hasil kerja yang signifikan. Hal ini terlihat dari kemampuan menyelesaikan pekerjaan maupun pembagian tugas untuk staf-stafnya. Terdapat guru yang padat pekerjaannya, tetapi ada juga yang terlihat seperti tidak mempunyai pekerjaan. Oleh karena itu, tidak terdapat keseimbangan pekerjaan antara guru satu dengan guru lainnya. Apabila kepala sekolah yang mempunyai wewenang untuk mengatur atau mengarahkan guru sesuai dengan volume kerja, maka pekerjaan tersebut akan menjadi ringan dan dapat diselesaikan dengan cepat.

Pelimpahan wewenang tidak hanya sekedar untuk menduduki sebuah jabatan yang sedang kosong, tetapi menurut penulis lebih dari itu adalah untuk

menyelesaikan pekerjaan secara sistematis dengan memberdayakan guru secara proporsional. Wewenang yang jelas dapat dijadikan dasar untuk membuat kerangka kerja dengan efisien. Mengingat tanggung jawab yang harus dipikul kepala sekolah yang diberikan wewenang, maka intervensi dari berbagai pihak yang dapat menggrogoti kewibawaan harus dihindari.

Dilain pihak, wewenang yang jelas selain menumbuhkan sikap aspiratif dapat mengungkapkan bahwa apakah mereka yang diberikan wewenang mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Jika tidak diperoleh perubahan yang positif, maka dapat dikatakan gagal, dan perlu dipertanyakan apa dasar yang digunakan untuk memberikan pelimpahan wewenang. Keberhasilan guru yang telah diberikan wewenang selain meningkatkan prestise, juga akan memberikan nilai positif bagi pejabat yang memberikan wewenang. Dalam hal ini, maka pejabat tersebut akan dinilai sangat obyektif dan kooperatif. Kredibilitas dan akuntabilitasnya tidak akan diragukan karena telah merekomendasikan guru yang tepat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Sekolah dalam hasil wawancara penelitian ini bahwa:

“pelimpahan wewenang dapat bersifat intern dan ekstern bidang. Adapun yang dimaksud intern bersifat dalam bidang, artinya pelimpahan wewenang akan dipercayakan pada guru yang ada di bidang tersebut, sedangkan yang dimaksud ekstern bersifat lintas bidang, yaitu guru yang diberi pelimpahan wewenang bukan berasal dari bidang tersebut. Untuk pelimpahan wewenang yang bersifat intern, tidak mengganggu tugas sehari-hari dan tentunya akan dicari yang sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi

pelimpahan wewenang yang bersifat ekstern dapat mengganggu pelaksanaan tugas rutin sehari-hari.

Pelimpahan wewenang bersifat intern, cenderung untuk menyelesaikan pekerjaan sekolah secara profesional. Hal ini disebabkan tugas yang dilimpahkan guru tersebut sudah diketahui sebelumnya, sehingga mempunyai relevansi untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan sekolah dengan profesional. Di lain pihak, pelimpahan wewenang yang dipercayakan kepada yang berada luar bidang belum dapat diketahui kemampuannya, karena pola pekerjaan berbeda pada setiap bidang. Jika berbicara tentang kemampuan guru yang dilimpahkan wewenang sangatlah relatif, sebab setiap guru mempunyai kekurangan dan kelebihan. Akan tetapi suatu yang akan memberikan tekanan (*pressure*) adalah tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dengan adanya tanggung jawab, akan menumbuhkan akurasi dalam setiap pekerjaan sehingga menjadi lebih baik.

Penjelasan yang disampaikan oleh UPT Dinas di Kecamatan dalam hasil penelitian ini, bahwa:

“bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh guru yang menerima pelimpahan wewenang cenderung berorientasi pada hasilnya saja (output). Hal ini terlihat bagaimana mekanisme guru dalam menyelesaikan tugasnya, sedangkan prosesnya tidak diperhatikan terutama menyangkut disiplin dan waktu kerja.

Berdasarkan hasil observasi kedisiplinan guru di SD Negeri sangatlah rendah. Hal ini dapat terlihat dari ketepatan waktu guru datang dan pulang dari sekolah. Secara keseluruhan guru di SD Negeri. Guru yang mendapatkan tugas

di sekolah. Banyaknya guru yang bertugas di sekolah tidak dapat ditemui secara utuh. Selama penulis mengadakan observasi tidak pernah terlihat guru yang bertugas hadir seluruhnya untuk mengikuti apel pagi dan siang setiap hari.

Sebagai guru di sekolah sudah menjadi kewajiban mengikuti tata tertib yang menjadi aturan di setiap sekolah. Terlepas apakah ada pekerjaan menanti maupun tidak, setiap guru wajib datang dan pulang tepat waktu sesuai dengan bidang tugas dalam mengajar. Hal ini dilakukan terutama apabila menyangkut pelayanan langsung terhadap pendidikan bagi masyarakat. Kedisiplinan waktu merupakan proses dari bentuk tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Disiplin dalam hal apapun sangat identik sikap bertanggung jawab.

Apabila guru hanya berorientasi pada hasil kerja, maka dapat dikatakan aspek pembinaan guru tidak berhasil. Kehadiran guru di sekolah selama jam kerja memberikan suasana yang positif, karena selain dapat memupuk rasa kebersamaan sesama guru, akan mudah bagi masyarakat mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kelancaran pelayanan terhadap pendidikan untuk masyarakat merupakan bukti autentik dari suatu tanggung jawab. Oleh karena itu tanggung jawab tidak hanya dipandang dari satu aspek saja, karena dapat dimanifestasi dalam berbagai cara dan bentuk

Guru dalam penjelasannya, menyatakan bahwa hasil wawancara ini sebagai berikut:

“yang diberikan pelimpahan wewenang selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Hal ini terbukti tidak terdapatnya

unsur penyimpangan maupun upaya penyimpangan. Secara kasat mata atau sepintas kilas penyimpangan yang berupa kebijakan tidak mungkin dilakukan, karena masih ada kepala sekolah yang selalu mengadakan monitoring terhadap semua guru.

Adanya pelimpahan wewenang menurut penulis, tidak berarti guru tersebut dapat melakukan tindakan semaunya. Apabila mereka melakukan penyimpangan, tidak hanya nama baik yang dipertaruhkan, tetapi masa depan karirnya juga akan terancam. Tindakan penyimpangan merupakan penghancuran sistem dari dalam secara perlahan. Sebagai dampaknya, maka instansi sekolah yang bersangkutan akan menuai kritikan atau penghujatan akibat perbuatan oknum.

Adanya penyimpangan demi keuntungan pribadi secara implisit dan eksplisit harus cepat dicegah. Apabila tidak segera dilakukan tindakan tegas dapat membudaya bagi semua guru. Untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan, maka diperlukan kontrol yang tegas, evaluasi secara kontinyu, dan menjalin komunikasi dua arah. Sistem ini bukanlah berarti kebijakan yang otoriter dari atasan, tetapi harus disadari sebagai suatu komitmen untuk peningkatan kinerja ke depan.

Ungkapan Komite sekolah, dapat diketahui bahwa setiap bidang pekerjaan di sekolah ada yang bertanggung jawab. Dengan demikian antara bawahan dan atasan sama-sama mempunyai tanggung jawab. Akan tetapi selaku kepala sekolah pasti mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Sehubungan hal tersebut, maka atasan cukup kewalahan apabila bawahan kurang mempunyai tanggung jawab dalam pekerjaannya.

Setiap guru menurut penulis, harus mempunyai perspektif terhadap pekerjaannya sebagai suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik. Dengan sudut pandang seperti itu, maka tidak menimbulkan perasaan bahwa mereka sebagai orang gajian yang bekerja sesuai perintah atasan dan dinas. Apabila perasaan seperti itu dapat disingkirkan, maka guru dapat bekerja dengan perasaan memiliki. Sebaliknya jika menganggap dirinya sebagai guru bekerja untuk mendapatkan upah, maka mereka akan bekerja tanpa rasa tanggung jawab, ada keterpaksaan dan bahkan bersikap culas, yaitu jika dilihat atasan akan rajin bekerja, sebaliknya tidak ada atasan cenderung diam menunggu. Perasaan memiliki bagi semua guru sangat mutlak. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kreativitas, kenyamanan bekerja, target yang ingin dicapai dan inovasi yang dapat membantu pekerjaan agar dapat dipahami, dilaksanakan dengan mudah, baik dan lancar.

Dalam penjelasan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dalam penelitian ini, bahwa:

“guru yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab tidak dibekali ketrampilan khusus. Mereka hanya diberikan pengarahan dan instruksi sesuai dengan petunjuk dari Dinas. Tidak adanya ketrampilan khusus cenderung disebabkan pekerjaan tersebut sifatnya rutin, sehingga tidak mungkin melakukan pelatihan untuk suatu pekerjaan yang bersifat umum. Akan tetapi apabila ada program baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, maka guru tersebut diberikan pelatihan dan training.

Pelatihan atau *training*, untuk meningkatkan ketrampilan guru sangat diperlukan, tetapi dalam konteks yang relevan. Untuk melakukan pelatihan

dan *training* memerlukan waktu biaya dan tenaga, jika untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah lazim disekolah cukup dengan sistim mentor. Dengan kemampuan mentor dapat mentransfer pengetahuan kepada guru. Proses seperti ini sangat efektif membangun kemampuan guru dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai pengajar.

d. Motivasi Guru

Berbagai cara dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kerja guru, seperti diadakan pendidikan dan pelatihan. Semua faktor tersebut belumlah cukup jika tidak ada motivasi dari guru itu sendiri. Dengan adanya motivasi yang besar berbagai kendala dapat diatasi. Motivasi merupakan suatu konsep yang kurang populis, tetapi perannya cukup besar dalam mempengaruhi kinerja guru. Hal ini disebabkan luasnya pemahaman dari motivasi itu sendiri.

Penjelasan yang diberikan Kepala Sekolah dalam wawancaranya dapat diketahui bahwa

“guru yang ada cenderung mempunyai motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan tugasnya. Hal ini terlihat dari hasil kerja yang ditunjukkan oleh para guru, yaitu setiap pekerjaan selalu terselesaikan dengan tepat waktu. Motivasi guru sangat relatif, bagi mereka yang kurang memahami tugasnya dapat terlihat kurang bergairah dalam bekerja. Hal ini sangat dimaklumi karena guru yang biasa dinas di lapangan agak kesulitan bekerja di dalam mengajar.

Motivasi setiap guru harus selalu tinggi. Hal ini disebabkan adanya hubungan pelayanan dan jasa. Akan tetapi sikap ini harus dimulai dari kepala Sekolah. Guru dapat termotivasi apabila kepala sekolah sebagai atasannya mempunyai motivasi yang tinggi. Motivasi merupakan suatu sarana untuk menunjang kelancaran aktivitas guru dalam menyelesaikan tugas secara memuaskan. Kehilangan motivasi akan dapat berpengaruh terhadap kinerja guru, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Meskipun motivasi yang dimiliki guru tidak dapat bersifat representatif untuk semua aspek, tetapi paling tidak mempunyai motivasi untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab sebagai pengajar dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Dikatakan oleh Kepala Sekolah bahwa untuk meningkatkan motivasi para guru yang menjadi stafnya agar tetap termotivasi dalam pekerjaannya secara bertanggung jawab melalui beberapa cara. Terlebih dahulu menunjukkan motivasi diri sendiri dengan cara disiplin, komitmen dan obyektif. Hal ini diharapkan dapat diikuti oleh gurunya. Selanjutnya mengadakan komunikasi dua arah, dalam artian bukan sebagai atasan dan bawahan. dalam komunikasi ini akan diketahui bagaimana motivasi guru, mengapa motivasinya cenderung rendah dan bagaimana solusinya. Sikap familiar dapat menyentuh guru untuk mengeluarkan uneg-uneg yang mengganjal sehingga kehilangan motivasi. Tanpa mengadakan pendekatan sangat sulit mengetahui motivasi para guru.

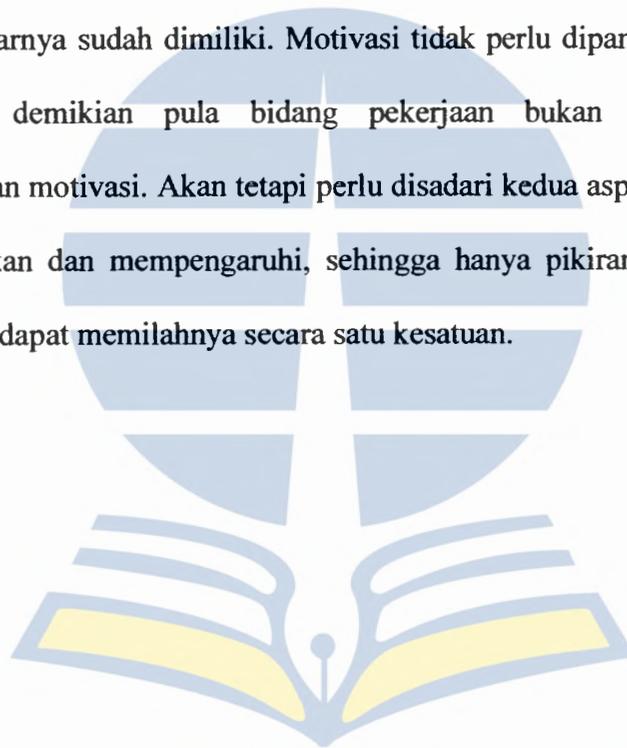
UPT Dinas di Kecamatan Kayan Hulu dalam penjelasannya, bahwa mayoritas guru yang mempunyai motivasi dalam pekerjaannya adalah mereka yang pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Hal ini sangat relevan, karena merasa sangat diperhatikan oleh atasan dan untuk menjaga image bahwa setelah mengikuti pendidikan dan latihan terjadi perubahan yang sangat positif.

Pendidikan dan pelatihan bukan ukuran untuk mendapatkan motivasi. Sesungguhnya guru yang mendapatkan pendidikan dan latihan semakin besar beban tanggung jawabnya, jika tidak memiliki motivasi yang tinggi maka dapat melalaikan tanggung jawabnya. Sebaliknya, guru yang belum mendapatkan pendidikan dan latihan bukan berarti tidak diperhatikan, tetapi sangat memprioritaskan aspek yang ada relevansinya dengan kebutuhan. Pada dasarnya motivasi kerja bagi setiap guru sangat bermanfaat serta mendominasi pembentukan kepribadian. Dengan terbentuknya kepribadian guru yang baik, maka reputasinya dapat dikategori baik, sehingga mempunyai nilai plus untuk direkomendasikan sebagai guru layak untuk ditempatkan pada posisi yang pantas. Oleh karena itu motivasi dapat dikatakan mempunyai hubungan kausalitas dengan prestasi dan posisi.

Berdasarkan penjelasan Kepala Sekolah dapat diketahui bagaimana motivasi guru yang diberdayakan sesuai maupun tidak sesuai dengan keinginannya. Pada dasar mereka yang diberdayakan sesuai dengan keinginan mempunyai motivasi yang tinggi karena lebih memahami apa yang menjadi tugasnya. Dalam hal ini tidak terkontaminasi dengan indikasi yang

negatif, semata-mata menyenangi pola pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian pula mereka yang diberdayakan tidak sesuai keinginannya bukan disebabkan unsur apapun, karena merasa pekerjaan tersebut terasa asing dan kurang dipahami.

Dimanapun guru diberdayakan tidak perlu ada anggapan pekerjaan tersebut lebih baik, lebih populer ataupun lebih rendah, dan tidak sesuai. Sikap tersebut akan mengkerdilkan diri sendiri tanpa mau menggali potensi yang sebenarnya sudah dimiliki. Motivasi tidak perlu dipandang dari bidang pekerjaan, demikian pula bidang pekerjaan bukan menjadi ukuran mendapatkan motivasi. Akan tetapi perlu disadari kedua aspek tersebut saling membutuhkan dan mempengaruhi, sehingga hanya pikiran yang sehat dan rasionallah dapat memilahnya secara satu kesatuan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasar kanalisis data implementasi kebijakan Penyaluran Tunjangan Terpencil, Terluar, Terbelakang dalam Rangka Peningkatan Profesional Guru SD Negeri, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, beberapa kesimpulan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kelayakan guru yang terlibat dilapangan terkait dengan kebijakan penyaluran tunjangan terpencil terhadap peningkatan kesejahteraan guru yang mengajar di SD Negeri, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang dan telah layak serta menunjukkan prilaku sebagai seorang pendidik dan tetap berwibawa tanpa mengenyampingkan sikap keibuan atau kebpakan dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan visi dan misi sekolah untuk mewujudkan **kualitas mutu peserta didik**.
2. Proses dan mutu pendidikan yang tak lepas dari kinerja guru sebagai pendidik di sekolah maka guru-guru yang telah menerima kebijakan penyaluran tunjangan guru terpencil di SD Negeri, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang. Berusaha untuk meningkatkan kinerja sebagai seorang guru/pengajar/pendidik seperti menyampaikan materi, mengadakan evaluasi memberikan remedial dan menganalisis hasil evaluasi siswa-siswi demi

memenuhi standar yang ingin dicapai dalam kualitas hasil lulusan peserta didik.

3. Martabat guru di SD Negeri, Kecamatan Kayan Hulu, KabupatenS intang ini tak berbeda jauh dengan kewibaaan sebagai guru atau tenaga pendidik yang bisa dilihat dari sikap interaksi dan tanggungjawab dalam menjalankan tugas mengajar terhadap murid didik khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan dan kedisiplinan, hal ini dapat terlihat dari jam masuk kerja maupun masuk belajar serta ketika berada di lingkungan sosial dan saat interaksi dengan masyarakat di wilayah tersebut.
4. Profesional guru di SD Negeri, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang khususnya dalam peningkatan kemampuan terkait dengan proses belajar dan mengajar terhadap anak didik/peserta didik khususnya yang telah menerima penyaluran tunjangan guru terampil belum menunjukkan hasil yang optimal seperti dalam hal penguasaan iptek dalam menunjang proses belajar-mengajar dan menghasilkan perubahan yang signifikan karena dengan alasan guru-guru yang menerima penyaluran tenaga guru terampil adalah mereka yang berusia dalam kategori tidak muda lagi.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi impementasi kebijakan penyaluran tunjangan terampil, terluar, dan terbelakang dalam rangka peningkatan kesejahteraan guru di SD Negeri, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang terkaid dengan kemampuan guru, penempatan

guru, kewenangan yang jelas dan tanggung jawab guru serta motivasi guru dalam mendukung aktifitas kegiatan proses belajar-mengajar dalam upaya meningkatkan keluaran kualitas mutu pendidikan.

B. Saran-Saran

Melihat simpulan yang bisa ditarik dalam penelitian ini, penulis akan menyumbangkan beberapa buah pikiran berupa saran-saran. Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan guru yang sudah menerima kebijakan penyaluran tunjangan guru terpencil di SD Negeri, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang lebih terpacu lagi untuk memberikan rasa tanggungjawab terhadap keberhasilan kelulusan anak didik/peserta didik baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga dapat bersaing secara nasional bahkan secara internasional.
2. Agar implementasi kebijakan penyaluran tunjangan guru terpencil ini berjalan kearah yang lebih baik, pemerintah perlu mengadakan evaluasi terkait dengan apa yang masih perlu diperbaiki, sehingga kedepannya guru yang berada di wilayah terpencil, terluar, dan terbelakang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga mereka lebih extra lagi didalam meningkatkan proses tanggungjawab dalam kegiatan ajar-mengajar khususnya di SD Negeri, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, umumnya bagi guru yang berada di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau untuk tetap meningkatkan kinerja

guru demi tercapinya tujuan dan cita-cita bangsa yaitu dapat meningkatkan kecerdasan secara intelektual bagi peserta didik.

3. Diharapkan guru-guru yang menerima penyaluran tunjangan terpicil menjadi semakin patuh dan disiplin terhadap jam masuk dalam mengajar dan bertanggungjawab terhadap materi pelajaran yang sudah ditetapkan pemerintah sehingga dapat mewujudkan cita-cita negara dalam upaya mensejahterakan masyarakat karena, dengan pendidikan inilah solusi untuk masyarakat terlepas daripada kondisi kemiskinan dan keterbelakangan.
4. Diharapkan pemerintah selain melakukan pemberian pelatihan tentang penggunaan fasilitas IT terutama dalam menggunakan teknologi dalam menyampaikan materi seperti menggunakan Laptop dan Infokus sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan materi disekolah dan dapat meningkatkan profesionalitas guru yang telah mendapatkan penyaluran tunjangan guru terpicil, terluar dan terbelakang juga harus mempunyai etikat baik terkait dengan sarana dan prasarana dalam menunjang penggunaan fasilitas IT baik dalam proses pendidikan untuk peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, Jakarta: RinekaCipta.
- AR, Mustopaidijaja, 2003, *manajemen Proses KebijakanPublik, formulasi, implementasi dan Evaluasi Kerja*, LembagaAdministrasi Negara. Jakarta.
- Badrul, Munir, 2002. *Perencanaanpembangunan Daerah, DalamPerspektifOtonomi Daerah*. BadanPenerbit BAPPED Propinsi NTB, Mataram.
- BumiAksara, 2002, *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi keimplementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta.
- BayuSuryaningrat. 1981. *Permintaandan Administrasi Desa*. Jakarta:AksaraBaru
- BambangPurwoko. 1999. *Metode Penelitian*, Jakarta: LP3ES
- Danim.Sudarman, 2000, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, BumiAksara, Jakarta.
- Dunn, William N, 2001, *Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada, University Press, Yogyakarta.
- D, NugrohoRian, 2003, *Kebijakan Publik, (Formulasi, Implementasi, Evaluasi)* PT. Gramedia, Jakarta.
- Edwards, George C, III, 1980, *Implementasi and Publik Policy*, Congressional Quarterly, Inc, Washington, D.C.
- Evers, Hans-Dieter, 1986.*SosioogiPerkotaan, Urbanisasi dan Sengketatanah di Indonesia dan Malaysia*. LP3ES. Jakarta.
- Hadi, Sutrisno, 1986. *Metode penelitian Ilmiah*, Gramedia.Jakarta: PustakaUtama,.Jakarta.
- Hill, M. 1993. *The PolicyProcess*.New York Harvester Eheatshearf.
- Irhomi, T.O. 2004, *Rampaian Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan, 1997.*Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: BumiAksara.

- Jones, C. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jones, Charles O, 1996, *Pengantar Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Knoozt, Harold, 1990, *Pengantar Ilmu Komunikasi*. CV. Armico, Bandung
- Kaharuddin, H.SS. 1997, *Sosiologi Keluarga*, Liberty, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1989. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Leibo, J. 1994. *Sosiologi Pedesaan. Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berpradigma Ganda*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Maleong, Laxi J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Temaja Rosdakarya, Bandung.
- Miles, M.B. dan Hubermas, M, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: IU Press. Jakarta.
- Mark Concidine, 1996. *Kebijakan Publik*.
- Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Sosiologis Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nakamura. 1980. *Implementasi Kebijakan Negara Berkembang*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ndaraha, Taliziduhu , 1987. *Partisipasi masyarakat di Beberapa Desa*. Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta.
- Putra, Fadillah, 2005. *Kebijakan Tidakuntuk Publik*. Resis Book. Yogyakarta.
- Purwoko. 1999. *Penelitian Kualitatif dan Penerapan*. Pustaka, Jakarta.
- , 2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. PustakaPelajar. Yogyakarta.
- Ripley, R.B. dan Franklun, G.A. 1986. *Bureaucracy and Policy Implementation*. Ontario: Dorsey Press.

- Soenarko, 2000. *publik Policy: Pengertian-Pengertian pokok Untuk Memahami dan Analisis Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: ErlangaUniversity Press.
- Sumardi, I.N. 2005. *Efektifist Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama, Jakarta.
- Strauss, A dan Corbin, J. 1997. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Tehnikdan Teori Grounded*. PT. Binallmu.Surabaya.
- Steers, R.M. 1980. *Efektifitas Organisasi*. Bandung: Tarsito.
- Syarwani, Abdullah, 1987. *Menatap Masalah pembangunan Indonesia*. Lembaga Kajian Masyarakat Indonesia, Jakarta.
- Sastropetro, R.A. Santoso, 1986. *Partisipasi, komunikasi, Persuasidan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Alumni, Bandung.
- Siagian, Sondang, P. 1983. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta.
- Taupik, 1995. *Pendidikan Formal di Indonesia*. UI Press Jakarta.
- Thoha, Miftah, 1993. *Kebijakan Publik*. CV. Rajawali Jakarta.
- , 1992. *dimensi-Dimensi Prima IlmuAdministrasi Negara*. PT. Raja Rafindo Persada, Jakarta.
- Thamrin, 1997. *Kebijaksanaan Negara: Suatu Pengantar*. Fisipol Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Tangkilisan, H.N. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik, Transpormasi Pikiran George Edwards*, Yogyakarta: LukanOfset.
- Tjokroamidjoyo, Bintoro, 1987. *Pengantar Administrasi Pembangunan LP3ES*, Jakarta.
- Tjokroamidjoyo, Bontoro, Mustopadidjoyo, 1982. *Pengantar Pemikir tentang Teoridan Strategi Pembangunan Nasional*.PT. GunungAgung.Jakarta.
- The Liang Gie, 1981. *Ensiklopedi Adminstrasi*. GunungAgung, Jakarta.
- Van Mater, D. dan Van Horn, C.E. 1975. *The Policy Implementation Process A Conceptual Framework. Administration and Society Vol 6 No 4 Sage Publikation*.

- Wahab, Solihin Abdul, 1990. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. RenikaCipta Jakarta.
- Wibawa, 2002. *Kebijakan Publik*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Winardi, 1994. *Implementasi dan Teori Dalam Kebijakan Publik*. Gravindo Perkasa, Jakarta.
- , 1997. *Analisis kebijaksanaan; dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. BumiAksara Jakarta.
- , 1999. *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya*. PT. Danar Wijaya Brawijaya University Press.
- Sigit, Soehardi, 2003, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Bisnis Manajemen*, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata
- Subarsono, A.G. 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugito, 1995, *Studi Implementasi Kebijaksanaan Tata Niaga*, Kalimantan Barat, Fisip Universitas Tanjungpura.
- Sugiyono, 2005, *memahami penelitian kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugioyono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi*. CV. Alfa Beta, Bandung.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 421.3/411/DIKMEN, Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2013/2014.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 153/U/2013, Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2013/2014
- Wahab, Solichin Abdul, 2002, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke implementasi Kebijaksanaan Negara*. BumiAksara, Jakarta.
- Winarno, 1980, *Teori Kebijakan Publik*, PusatAntaraUniversitas – Studi Sosial Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : GUSTIANA
2. No. Mahasiswa : 500022416
3. Tempat, Tgl. Lahir : Menaluk, 15 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
6. Alamat : Jln. JC. Oevang Oeray, Gg Kapuas Raya, Desa Sui. Ana, Sintang
7. Agama : Katolik
8. Pendidikan : SD Negeri No.13 Entogong Tahun 1989
 SMP Negeri Negeri No.01 Kayan Hilir Tahun 1993
 SMA Negeri/KH. Dewantara Pontianak Tahun 1998
 S.1. Fakultas Terbuka Tahun Tahun 2010
 Terdaftar di S 2. September, Tahun 2013
9. Pekerjaan : PNS
10. Nama Orang Tua : Ayah : Zakaria Rendau
 Ibu : Wexberta Cerana
11. Nama Suami : Andreas Teridi
12. Pekerjaan : Swasta
13. A n a k : 1.
 2.

Pontianak, April 2015

Penulis,


GUSTIANA

NIM. 500022416



**PEMERINTAH KABUPATEN SULTANO
KECAMATAN KAYAN HULU**

KETERANGAN

	Ibukota Kecamatan
	Desa
	Dusun
	Sungai
	Jalan
	Batas Kabupaten
	Batas Kecamatan
	Batas Desa

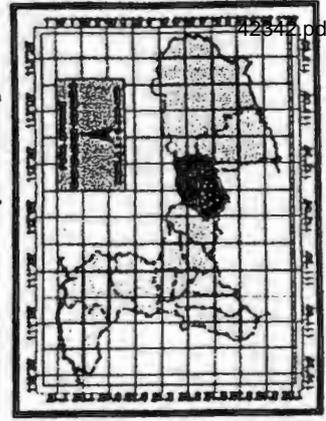


SKALA 1 : 250.000

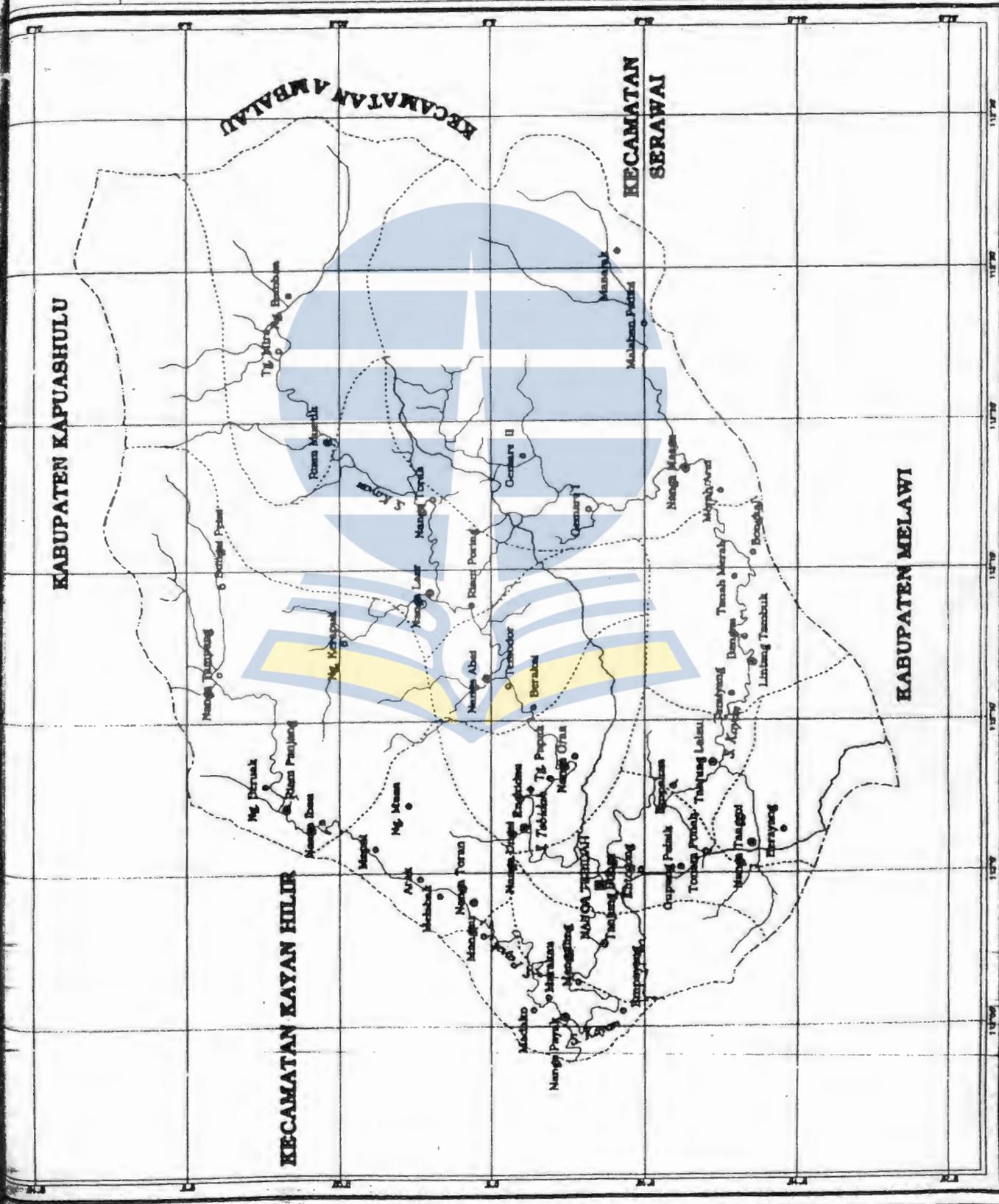


Sumber Peta :

1. Peta Administrasi Kabupaten Serawag



Desain Oleh :
RAFFEDA KABUPATEN SULTANO
TAHUN 2008



KECAMATAN KAYAN HULU
Bulan Topan Nanga Tebidah

LAPORAN KEPENDUDUKAN

BULAN: APRIL

TABEL 1

NO	DESA	PENDUDUK BULAN			LAHIR BULAN INI			MATI BULAN INI			PENDATANG BULAN INI			PINDAH BULAN INI			PENDUDUK AKHIR BULAN INI			KK		
		J	M	J+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR			
1	Nanga Payak	475	435	910			0			0			0			0			475	435	910	267
2	Tanjung Bunga	501	464	965			0			0			0			0			501	464	965	252
3	Nanga Tebidah	515	458	973			0			0			0			0			515	458	973	220
4	Emtogong	346	370	716			0			0			0			0			346	370	716	237
5	Nanga Tonggor	287	301	588			0			0			0			0			287	301	588	192
6	Tanjung Lalau	287	254	541			0			0			0			0			287	254	541	151
7	Lintang Tambuk	673	674	1347			0			0			0			0			673	674	1347	355
8	Nanga Masau	510	517	1027		3	3	1	1	2	10	4	14	2	2	4			510	517	1027	255
9	Nanga Abai	595	568	1163			0			0			0			0			595	568	1163	270
10	Nanga Ungal	648	736	1384			0			0			0			0			648	736	1384	326
11	Nanga Toran	467	539	1006			0			0			0			0			467	539	1006	268
12	Riam Panjang	488	750	1238			0			0			0			0			488	750	1238	287
13	Nanga Laar	395	366	761			0			0			0			0			395	366	761	182
14	Riam Mundik	272	290	562			0			0			0			0			272	290	562	152
15	Merahau Permai	327	351	678			0			0			0			0			327	351	678	130
16	Emponyang	228	243	471			0			0			0			0			228	243	471	131
17	Landau Bara	660	530	1190			0			0			0			0			660	530	1190	330
18	Topan Nanga	298	272	570			0			0			0			0			298	272	570	156
19	Mapan Jaya	232	223	455			0			0			0			0			232	223	455	122
20	Tonak Goneh	201	183	384			0			0			0			0			201	183	384	111
21	Empakan	429	424	853			0			0			0			0			429	424	853	252
22	Tanah Merah	470	515	985			0			0			0			0			470	515	985	131
23	Merah Arai	342	336	678			0			0			0			0			342	336	678	162
24	Tapang Menua	353	352	705			0			0			0			0			353	352	705	185
25	Nangkak Lestari	601	594	1195			0			0			0			0			601	594	1195	227
26	Nanga Oran	638	698	1336			0			0			0			0			638	698	1336	285
27	Buluh Merindu	446	436	882			0			0			0			0			446	436	882	193
28	Kerapuk Jaya	476	502	978			0			0			0			0			476	502	978	239
29	Tanjung Miru	258	281	539			0			0			0			0			258	281	539	123
30	Kebarau	166	164	330			0			0			0			0			166	164	330	88
31	Nanga Tampang	299	303	602			0			0			0			0			299	303	602	207
	Jumlah	12876	13125	26001	0	3	3	1	1	2	10	4	14	2		4			12883	13129	26012	6486



Nanga Tebidah, 15 April 2015
 KECAMATAN KAYAN HULU
 PERBINA PERBINA, S.P.
 Perbina
 NIP. 19640908 198603 1 020



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR : 0007.13/C5.6/KH/P/2015

**TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU YANG BERTUGAS DI DAERAH KHUSUS
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa guru PNS dan bukan PNS yang bertugas pada daerah khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat perlu mendapat tunjangan khusus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Khusus jenjang pendidikan dasar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941 tanggal 1 Desember 2008);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 4. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015;
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P tahun 2011;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara sebagaimana diubah Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur yang menangani Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2011 tentang tunjangan khusus bagi guru tetap bukan PNS yang belum memiliki Jabatan Fungsional Guru;

- 42842.pdf
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 213/MPN.A4/KP/2010 mengenai pengangkatan Jabatan Struktural Eselon IIa;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 123/P/2012 tentang Penetapan Daerah Khusus tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU YANG BERTUGAS DI DAERAH KHUSUS JENJANG PENDIDIKAN DASAR PROPINSI KALIMANTAN BARAT.
- PERTAMA : Memberikan Tunjangan Khusus bagi guru PNS dan bukan PNS yang bertugas pada daerah khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat perlu mendapat tunjangan khusus.
- KEDUA : Penerima tunjangan khusus bagi guru PNS dan bukan PNS sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tunjangan Khusus bagi guru PNS dan bukan PNS sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua diberikan setiap bulan yang besarnya :
- a. Setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi PNS sesuai dengan perundang-undangan;
 - b. Setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan PNS yang sudah memperoleh SK Inpassing sesuai dengan perundang-undangan;
 - c. Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan PNS yang belum memperoleh SK Inpassing sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

**DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU DI DAERAH KHUSUS
JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2015 PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Kab/Kota : Kabupaten Sintang

No.	NUPTK	NAMA GURU	UNIT KERJA	NO REK. BANK
259	1	3253758660200043 Abas Candra GOL : III/c TUNJANGAN : Rp. 2,763,300	SMP NEGERI 4 SERAWAI SATU ATAP	BRI No Rek. 030401012738530 a/n ABAS CANDRA
260	2	3237763666110013 ADINAN GOL : II/c TUNJANGAN : Rp. 2,133,300	SD NEGERI 22 KP ARAK	BRI No Rek. 347901023799537 a/n ADINAN
261	3	4433759660300302 Adriana Titi Suswanti,S.Pd.SD. GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 22 LANJAU	BRI No Rek. 347901023963534 a/n ADRIANA TITI SUSWANT
262	4	1057754655300053 AGATA KUSMAWATI GCL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 07 KEPALA JUNGAI	BNI No Rek. 0029253232 a/n AGATA KUSMAWATI
263	5	3146763666110023 Agus GOL : III/a TUNJANGAN : Rp. 2,317,600	SD NEGERI 05 SEBADAK	BRI No Rek. 030401012737534 a/n AGUS
264	6	1738752655200002 AGUS SALIM GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 02 JASA	BRI No Rek. 347901023845532 a/n AGUS SALIM
265	7	3351765667300013 Agustina Dwi Putriana GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 26 NANGA TAMPANG	BRI No Rek. 347901023990531 a/n AGUSTINA DWI PUTRIAN
266	8	5753738643200002 AHASWIRUS GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,968,300	SD NEGERI 12 SEPAN MENGARET	BRI No Rek. 030401012767539 a/n AHASWIRUS
267	9	3138763665210103 Ahmad saidi GOL : III/b TUNJANGAN : Rp. 2,491,700	SD NEGERI 03 EMPURA	BRI No Rek. 030401012759536 a/n AHMAD SAIDI
268	10	2343744648200003 AJAN GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,398,400	SD NEGERI 26 MERAKO	BRI No Rek. 347901023532537 a/n AJAN
269	11	4756744647200002 AJINALEKA GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,294,600	SMP NEGERI 3 KETUNGAU HULU	BRI No Rek. 030401010526539 a/n AJINALEKA
270	12	8159737640200013 AKASIOUS SUKIMAN GOL : III/b TUNJANGAN : Rp. 3,728,800	SD NEGERI 04 BUNTUT PIMPIN	BRI No Rek. 347901024350530 a/n AKASIOUS SUKIMAN
271	13	1736753656200022 Akup Hermanto GOL : III/a TUNJANGAN : Rp. 2,791,500	SD NEGERI 29 NAGKAK LESTARI	BRI No Rek. 347901024036534 a/n AKUP HERMANTO A.MA

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU DI DAERAH KHUSUS
 JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2015 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kota : Kabupaten Sintang

No.	NUPTK	NAMA GURU	UNIT KERJA	NO REK. BANK
14	8160763663110003	Alam GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 26 NANGA TAMPANG	BRI No Rek. 347901024157534 a/n ALAM
15	3338765667200013	Ambrosius Iskandar GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 22 LANJAU	BRI No Rek. 347901024105537 a/n AMBROSIUS ISKANDAR
16	1046735637200033	AMBROSIUS SALAWATI GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 4,492,400	SD NEGERI 13 TAHAI	BRI No Rek. 030401009838537 a/n AMBROSIUS SALAWATI
17	2041755658300003	Ana Faulinawati GOL : III/a TUNJANGAN : Rp. 2,623,600	SD NEGERI 26 NANGA TAMPANG	BRI No Rek. 030401012912532 a/n ANA FAULINAWATI
18	3161763664210093	ANASTASIA NORHAYATI GOL : II/c TUNJANGAN : Rp. 2,133,300	SD NEGERI 10 RIAM PANJANG	BRI No Rek. 030401012916536 a/n ANASTASIA NORHAYATI
19	5842767669300002	Angela Ernie GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 26 NANGA TAMPANG	BRI No Rek. 347901024027535 a/n ANGELA ERNIE
20	0847760662300102	ANITA GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 06 TANJUNG ANDAN	BRI No Rek. 347901024285531 a/n ANITA
21	4440760661200003	ANTONIUS AL IDING GOL : III/b TUNJANGAN : Rp. 2,734,600	SD NEGERI 17 NANGA RIYOI	BRI No Rek. 347901024107539 a/n ANTONIUS AL IDING
22	8847754658200002	ARDIMAN GOL : III/a TUNJANGAN : Rp. 2,706,300	SD NEGERI 17 NANGA ABAI	BRI No Rek. 347901024156538 a/n ARDIMAN
23	4142745647200073	Artono GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,615,800	SD NEGERI 08 LINTANG TAMBUK	BRI No Rek. 347901023514539 a/n ARTONO
24	6447764664300022	Astri Mawarni GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 03 EMPURA	BRI No Rek. 347901024205531 a/n ASTRI MAWARNI
25	1746757658200022	ATET GOL : III/a TUNJANGAN : Rp. 2,543,500	SMP NEGERI 2 KETUNGAU HULU	BRI No Rek. 347901023901532 a/n ATET
26	5262751653200003	AWANG MIMI SUHAIMI GOL : III/a TUNJANGAN : Rp. 2,791,500	SD NEGERI 10 RIAM PANJANG	BRI No Rek. 030401012955530 a/n AWANG MIMI SUHAIMI

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU DI DAERAH KHUSUS
 JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2015 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

/Kota : Kabupaten Sintang

No.	NUPTK	NAMA GURU	UNIT KERJA	NO REK. BANK
27	3933748651300062	AYATI GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,505,400	SD NEGERI 07 KEPALA JUNGAI	BRI No Rek. 347901023365532 a/n AYATI
28	2135743647200003	BARAK GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,729,700	SD NEGERI 22 SEI KELUKAI	BRI No Rek. 030401012125533 a/n BARAK
29	4052735637200023	Bastian Talan GOL : III/c TUNJANGAN : Rp. 2,491,100	SD NEGERI 11 TANAH MERAH	BRI No Rek. 030401012249531 a/n BASTIAN TALAN
30	1841746651300002	Bernadetha GOL : III/b TUNJANGAN : Rp. 3,095,700	SD NEGERI 23 JELUNDUNG	BRI No Rek. 347901023969530 a/n BERNADETHA
31	1841751653300062	BERNARDA SRIWIDAYATI GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 21 MENAKON	BRI No Rek. 347901024059532 a/n BERNARDA SRIWIDAYATI
32	1436764670210003	BIASTEN GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 13 LUJUK	BRI No Rek. 347901024264535 a/n BIASTEN
33	8853749650200012	D.SUMARDIYONO GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 21 MENAKON	BRI No Rek. 347901024196538 a/n D.SUMARDIYONO
34	5950748649200012	DAGOT PANGNUS GOL : III/b TUNJANGAN : Rp. 2,246,200	SD NEGERI 18 NANGA TORAN	BRI No Rek. 347901023806538 a/n DAGOT PANGNUS
35	6157748650200023	DALIB GOL : III/c TUNJANGAN : Rp. 2,678,900	SMP NEGERI 5 KETUNGAU HULU	BRI No Rek. 347901024045533 a/n DALIB
36	7947756657200032	Darwis GOL : III/a TUNJANGAN : Rp. 2,465,900	SD NEGERI 15 MERAH ARAI	BRI No Rek. 347901024076534 a/n DARWISA.MA
37	0148768669110013	DEDE SAPUTRA GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 13 LUJUK	BRI No Rek. 347901024104531 a/n DEDE SAPUTRA
38	7534750653200032	DEMAN GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 06 TANJUNG ANDAN	BRI No Rek. 347901024354534 a/n DEMAN
39	1340760662200043	Demi Supriyadi GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 29 NAGKAK LESTARI	BRI No Rek. 347901023911537 a/n DEMI SUPRIYADI

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU DI DAERAH KHUSUS
JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2015 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kota : Kabupaten Sintang

No.	NUPTK	NAMA GURU	UNIT KERJA	NO REK. BANK
40	5136748651300033	DERAMAH GOL : III/c TUNJANGAN : Rp. 3,226,700	SD NEGERI 18 MELINGKAT	BRI No Rek. 030401013064536 a/n DERAMAH, S.TH.
41	7457765667300023	Devi Windasari GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 26 NANGA TAMPANG	BRI No Rek. 347901024263539 a/n DEVI WINDASARI
42	7134760661300093	DEWI AGUSTINI GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 18 MELINGKAT	BRI No Rek. 347901024265531 a/n DEWI AGUSTINI
43	9633762663300092	DIANA KUKUR GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 04 BUNTUT PIMPIN	BRI No Rek. 347901024276532 a/n DIANA KUKUR
44	1333746650200023	DIMAN MARTONO GOL : III/b TUNJANGAN : Rp. 2,820,700	SD NEGERI 17 NANGA ABAI	BRI No Rek. 030401013055537 a/n DIMAN MARTONO
45	3460758659300003	DORISMA NAINGGOLAN GOL : II/c TUNJANGAN : Rp. 2,341,300	SD NEGERI 17 NANGA RIYOI	BRI No Rek. 347901023955531 a/n DORISMA NAINGGOLAN
46	1341763665110043	EFENDI GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 19 SUNGAI KELIK	BRI No Rek. 347901023867534 a/n EFENDI
47	3542756658300002	ELISABETH INOI GOL : II/b TUNJANGAN : Rp. 2,177,700	SD NEGERI 26 MERAKO	BNI No Rek. 0029253661 a/n ELISABETH INOI
48	6444744646300043	ELISABETH RUKMINI GOL : III/d TUNJANGAN : Rp. 3,260,500	SD NEGERI 06 TANJUNG ANDAN	BRI No Rek. 347901023333535 a/n ELISABETH RUKMINI
49	6352758660300123	EMELIA KARTA LENA GOL : III/c TUNJANGAN : Rp. 2,678,900	SMP NEGERI 5 KETUNGAU HULU	BRI No Rek. 347901024088531 a/n EMELIA KARTA LENA
50	2433764665200142	Endang Rahmat GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 23 SEJELU	BRI No Rek. 347901024150532 a/n ENDANG RAHMAT
51	0646755655300012	Erlinawati GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 26 NANGA TAMPANG	BRI No Rek. 347901023802531 a/n ERLINAWATI
52	3340751653300033	Ernawati GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 03 EMPURA	BRI No Rek. 347901023915531 a/n ERNAWATI

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU DI DAERAH KHUSUS
 JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2015 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

b/Kota : Kabupaten Sintang

No.	kab kota	NUPTK	NAMA GURU	UNIT KERJA	NO REK. BANK
51	53	6437764666210042	ERNI ROSITA GOL : III/d TUNJANGAN : Rp. 2,293,500	SD NEGERI 18 MELINGKAT	BRI No Rek. 347901024134536 a/n ERNI ROSITA
52	54	4241763665300083	ERVINA NELLY GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 07 RASAU	BRI No Rek. 347901023902538 a/n ERVINA NELLY
53	55	2743758659300072	ESTER SIRASARI GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 13 TAHAI	BRI No Rek. 347901024140537 a/n ESTER SIRASARI
54	56	1452755656200032	FABIANUS YANSAH JANG GOL : III/a TUNJANGAN : Rp. 2,390,600	SD NEGERI 13 TAHAI	BRI No Rek. 030401013122538 a/n FABIANUS YANSAH JANG
55	57	9434749651300053	FAMILIA BIWIT GOL : III/b TUNJANGAN : Rp. 2,734,600	SD NEGERI 13 TAHAI	BRI No Rek. 030401013136537 a/n FAMILIA BIWIT
56	58	3133746647300033	FASIANA. M GOL : III/a TUNJANGAN : Rp. 2,465,900	SD NEGERI 29 MENGKIRAI	BRI No Rek. 030401013127538 a/n FASIANA. M
57	59	2855760664300002	Fatimah GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 05 SEBADAK	BRI No Rek. 347901024026539 a/n FATIMAH
58	60	9257761662200013	FIRMINUS RINYUAKNG GOL : III/c TUNJANGAN : Rp. 2,678,900	SMP NEGERI 5 KETUNGAU HULU	BRI No Rek. 347901023994535 a/n FIRMINUS RINYUAKNG
59	61	3958750652200002	FRANSISKUS GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,615,800	SD NEGERI 17 TEMBAK	BRI No Rek. 030401012275532 a/n FRANSISKUS
60	62	1436738642200013	FRINADUS DANU GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 4,093,300	SD NEGERI 18 NANGA TORAN	BRI No Rek. 347901023377539 a/n FRINADUS DANU
61	63	4862747648300022	GRESYWASTI GOL : III/b TUNJANGAN : Rp. 2,820,700	SMP NEGERI 3 KAYAN HULU	BRI No Rek. 347901024221537 a/n GRESYWASTY
62	64	1748748652300002	GUINI GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,615,800	SD NEGERI 02 JASA	BRI No Rek. 030401013152533 a/n GUINI
63	65	6947755656300072	GUSTIANA, S.Pd.SD. GOL : III/c TUNJANGAN : Rp. 2,850,300	SD NEGERI 21 MENALUK	BRI No Rek. 347901023411537 a/n GUSTIANA

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU DI DAERAH KHUSUS
 JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2015 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kab/Kota : Kabupaten Sintang

No.		NUPTK	NAMA GURU	UNIT KERJA	NO REK. BANK
prov	kab kota				
324	66	2262760661200003	Hanafi GOL : II/b TUNJANGAN : Rp. 2,246,200	SD NEGERI 19 RUHAN	BRI No Rek. 030401013183534 a/n HANAFI
325	67	2846762664200002	Hartono GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 19 RUHAN	BRI No Rek. 347901024178530 a/n HARTONO
326	68	6547746651200002	Haryanto GOL : II/c TUNJANGAN : Rp. 2,491,100	SD NEGERI 08 LINTANG TAMBUK	BRI No Rek. 347901023850537 a/n HARYANTO
327	69	4836749653200012	HASAN GOL : III/c TUNJANGAN : Rp. 2,850,300	SD NEGERI 20 RIAM MUNTIK	BRI No Rek. 347901024067535 a/n HASAN
328	70	2549747651200003	Hasanudin GOL : III/d TUNJANGAN : Rp. 3,064,400	SD NEGERI 06 ENSABANG	BRI No Rek. 347901024126533 a/n HASANUDIN
329	71	7563759662210073	HELEN.S.Th GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 13 LUJUK	BRI No Rek. 347901023823530 a/n HELEN
330	72	1756761665200002	HENDRO GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 26 MERAKO	BRI No Rek. 347901023885532 a/n HENDRO
331	73	3442753656200003	HERDIANTO GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 17 NANGA RIYOI	BRI No Rek. 347901023869536 a/n HERDIANTO
332	74	2537749652300053	HERLINA ATAN GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 10 RIAM PANJANG	BRI No Rek. 347901024298534 a/n HERLINA ATAN
333	75	5433728629200082	HERMANUS GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,968,300	SD NEGERI 12 MERAH AU	BRI No Rek. 347901024300535 a/n HERMANUS
334	76	8460764665210092	Hesty Nur Laela, S.Pd. GOL : III/b TUNJANGAN : Rp. 2,570,200	SMP NEGERI 5 KAYAN HILIR	BRI No Rek. 030401012873534 a/n HESTY NUR LAELA, S.P
335	77	1655764664300022	HESTY NURDIANTI GOL : II/c TUNJANGAN : Rp. 2,133,300	SD NEGERI 13 TAHAI	BRI No Rek. 030401012862533 a/n HESTY NURDIANTI
336	78	3338754656300063	Holet GOL : II/c TUNJANGAN : Rp. 2,341,300	SD NEGERI 23 JELUNDUNG	BRI No Rek. 347901024255536 a/n HOLET

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU DI DAERAH KHUSUS
 JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2015 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

/Kota : Kabupaten Sintang

No.	NUPTK	NAMA GURU	UNIT KERJA	NO REK. BANK
79	5346748651200033	IPANG.A.Ma GOL : III/b TUNJANGAN : Rp. 2,651,100	SD NEGERI 21 MENAKON	BRI No Rek. 347901024163535 a/n IPANG.A.MA
80	5635760661300132	IRMA SRINELNI GOL : III/a TUNJANGAN : Rp. 2,390,600	SD NEGERI 27 SUNGAI BELATUK	BRI No Rek. 030401012856532 a/n IRMA SRINELNI
81	1244759661200043	ISAKO GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 17 TEMBAK	BRI No Rek. 347901023964530 a/n ISAKO
82	1433739643200002	ITEN GOL : III/a TUNJANGAN : Rp. 2,623,600	SD NEGERI 17 TEMBAK	BRI No Rek. 030401013200530 a/n ITEN
83	1952743648200002	JAILANI,S.Pd.SD GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,615,800	SD NEGERI 07 RASAU	BRI No Rek. 030401009794539 a/n JAILANI
84	0246762663200013	JEBVURSI DESSA SURYA GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 15 RIAM SEJAWAK	BRI No Rek. 347901024234530 a/n JEBVURSI DESSA SURYA
85	2841740643200012	Jelapik GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,968,300	SD NEGERI 03 EMPURA	BRI No Rek. 030401012138536 a/n JELAPIK
86	7536744648200022	JELIDY NAYAN GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,505,400	SD NEGERI 18 NANGA TORAN	BRI No Rek. 347901024029537 a/n JELIDY NAYAN
87	7435754656200032	JONISON GOL : III/d TUNJANGAN : Rp. 3,260,500	SD NEGERI 19 SAKE	BRI No Rek. 347901023348530 a/n JONISON
88	1837758661200042	JUMADIN GOL : II/b TUNJANGAN : Rp. 2,177,700	SD NEGERI 13 TAHAI	BRI No Rek. 030401012775532 a/n JUMADIN
89	2357756657200013	JUMLI GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 17 NANGA ABAI	BRI No Rek. 347901024193530 a/n JUMLI
90	9536745647200032	KANSIN.S.Th GOL : III/d TUNJANGAN : Rp. 3,160,900	SD NEGERI 13 LUJUK	BRI No Rek. 347901023868530 a/n KANSIN.S.TH
91	4150755657200003	Kardinator GOL : III/a TUNJANGAN : Rp. 2,543,500	SD NEGERI 18 NATAI TEBEDAK	BRI No Rek. 347901023979535 a/n KARDINATOR

**DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU DI DAERAH KHUSUS
JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2015 PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Kab/Kota : Kabupaten Sintang

No.		NUPTK	NAMA GURU	UNIT KERJA	NO REK. BANK
prov	kab kota				
350	92	4049750652300113	Kartinah GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 25 LEDAN	BRI No Rek. 347901024330530 a/n KARTINAH.MA
351	93	9049758660300083	KARTINI GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 17 NANGA ABAI	BRI No Rek. 347901024305535 a/n KARTINI
352	94	1052757661200003	KASIM JABAN GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 13 LUJUK	BRI No Rek. 347901023929530 a/n KASIM JABAN
353	95	1043755658300023	KATARINA MURWANTI GOL : III/d TUNJANGAN : Rp. 2,293,500	SD NEGERI 21 MENAKON	BRI No Rek. 347901024318538 a/n KATARINA MURWANTI
354	96	3563739640110773	Kelut Budiasa, S.Pd. GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,729,700	SMP NEGERI 5 KAYAN HILIR	BRI No Rek. 030401009820534 a/n KETUT BUDI'ASA
355	97	3934738643200002	Kimson GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 4,222,300	SD NEGERI 03 EMPURA	BRI No Rek. 030401012225537 a/n KIMSON
356	98	5549763665200023	KIRONIMUS GOL : III/b TUNJANGAN : Rp. 2,491,700	SMP NEGERI 2 KETUNGAU HULU	BRI No Rek. 347901023863530 a/n KIRONIMUS
357	99	6556750652300053	Korita Eta GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 11 TANAH MERAH	BRI No Rek. 347901023908534 a/n KORITA ETA
358	100	9744758662300002	Kristiani GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 15 MERAH ARAI	BRI No Rek. 347901024195532 a/n KRISTIANI
359	101	2336750653300003	Kristofora Endang Namiyati GOL : III/d TUNJANGAN : Rp. 2,293,500	SD NEGERI 16 NANGA RADE	BRI No Rek. 347901024143535 a/n KRISTOFORA ENDANG NA
360	102	3533752654200003	KUSNANDI GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 12 SEPAN MENGARET	BRI No Rek. 347901024202533 a/n KUSNANDI
361	103	2038747651200003	Kuswadi GOL : III/a TUNJANGAN : Rp. 1,816,900	SD NEGERI 22 LANJAU	BRI No Rek. 347901024099532 a/n KUSWADI
362	104	5357746649200003	LAMAN GOL : III/a TUNJANGAN : Rp. 3,063,600	SD NEGERI 02 JASA	BRI No Rek. 030401012880531 a/n LAMAN

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU DI DAERAH KHUSUS
 JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2015 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kab/Kota : Kabupaten Sintang

No.		NUPTK	NAMA GURU	UNIT KERJA	NO REK. BANK
prov	kab kota				
363	105	6945762664110042	LANGGENG PRIO.H, A.MA GOL : II/c TUNJANGAN : Rp. 2,200,500	SD NEGERI 26 MERAKO	BRI No Rek. 347901024311536 a/n LANGGENG PRIO.H A.MA
364	106	1253745650200003	LAZARUS GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,615,800	SD NEGERI 19 SUNGAI KELIK	BRI No Rek. 030401009766536 a/n LAZARUS
365	107	1736737646200002	LENGSON.Y GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,847,200	SD NEGERI 12 SEPAN MENGARET	BRI No Rek. 030401009735535 a/n LENGSON Y
366	108	2748753659300002	LINGGAWATI, S.Pd.SD GOL : III/a TUNJANGAN : Rp. 2,543,500	SD NEGERI 21 MENALUK	BRI No Rek. 030401012877538 a/n LINGGAWATI, A.MA.
367	109	1637762667300002	Lisnawati GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 05 SEBADAK	BRI No Rek. 347901023987538 a/n LISNAWATI
368	110	1852756659300002	LIYAI GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 17 TEMBAK	BRI No Rek. 347901024310530 a/n LIYAI
369	111	1756746651300002	LUDANGI, S.Th GOL : III/c TUNJANGAN : Rp. 2,850,300	SD NEGERI 07 RASAU	BRI No Rek. 030401012898534 a/n LUDANGI, S.TH
370	112	0635759660300142	Lusiana GOL : III/b TUNJANGAN : Rp. 2,651,100	SD NEGERI 33 MELABAN PEDINI	BRI No Rek. 030401012892538 a/n LUSIANA, S.PD.SD.
371	113	0160740643300043	Lusiana Tenot GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,847,200	SD NEGERI 23 JELUNDUNG	BRI No Rek. 030401012080539 a/n LUSIANA TENOT
372	114	9246733636200003	LUTHER K. PIRANYAWA GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 4,492,400	SD NEGERI 07 KEPALA JUNGAI	BRI No Rek. 030401009792537 a/n LUTHER K. PIRANYAWA
373	115	6563749651200263	Lutherding GOL : II/b TUNJANGAN : Rp. 2,317,000	SD NEGERI 23 JELUNDUNG	BRI No Rek. 347901024228539 a/n LUTHERDING
374	116	2433741644200182	MAJANG GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,968,300	SD NEGERI 12 MERAH AU	BRI No Rek. 347901023557537 a/n MAJANG
375	117	2448766668300013	MARIA HARTATI GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 19 SAKE	BRI No Rek. 347901024319534 a/n MARIA HARTATI

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU DI DAERAH KHUSUS
 JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2015 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kab/Kota : Kabupaten Sintang

No.		NUPTK	NAMA GURU	UNIT KERJA	NO REK. BANK
prov	kab kota				
376	118	5147764666210083	MARIYA KRISTINA GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 10 RIAM PANJANG	BRI No Rek. 347901023801538 a/n MARIYA KRISTINA
377	119	2653745649200002	MARKUS GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,615,800	SD NEGERI 04 MELINGKAT	BRI No Rek. 030401013009536 a/n MARKUS
378	120	6461759661200013	MARTINUS GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SMP NEGERI 2 KETUNGAU HULU	BRI No Rek. 347901023810537 a/n MARTINUS
379	121	354775566300062	Maryam GOL : III/c TUNJANGAN : Rp. 2,678,900	SD NEGERI 05 SEBADAK	BRI No Rek. 030401013022534 a/n MARYAM
380	122	3952757657300012	MARYAM GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 06 NANGA MASAU	BRI No Rek. 347901023907538 a/n MARYAM
381	123	8956763665110032	MATIUS ALIANUS GOL : III/a TUNJANGAN : Rp. 2,390,600	SD NEGERI 02 JASA	BRI No Rek. 030401013028530 a/n MATIUS ALIANUS, A.MA.
382	124	1954768673210002	Mega Amiatu GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SMP NEGERI 5 KAYAN HILIR	BRI No Rek. 347901024272538 a/n MEGA ARNIATI
383	125	4342759662300023	MINE GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 04 BUNTUT PIMPIN	BRI No Rek. 347901024345535 a/n MINE
384	126	8633748651200042	Mingguk GOL : III/b TUNJANGAN : Rp. 2,651,100	SD NEGERI 23 JELUNDUNG	BRI No Rek. 347901023875537 a/n MINGGUK
385	127	1638746651300002	MULYA GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 19 SUNGAI KELIK	BRI No Rek. 347901024189531 a/n MULYA
386	128	2333740642200043	MULYONO GOL : III/c TUNJANGAN : Rp. 2,597,100	SD NEGERI 04 MELINGKAT	BRI No Rek. 030401012726533 a/n MULYONO
387	129	8844746650200002	Musa Talaim GOL : III/d TUNJANGAN : Rp. 3,160,900	SD NEGERI 19 RUHAN	BRI No Rek. 030401012732534 a/n MUSA TALOIM
388	130	1038761664200003	MUSTAPA UDIT GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 04 MELINGKAT	BRI No Rek. 030401012724531 a/n MUSTAPA UDIT, A.MAP

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU DI DAERAH KHUSUS
 JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2015 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kab/Kota : Kabupaten Sintang

No.		NUPTK	NAMA GURU	UNIT KERJA	NO REK. BANK
prov	kab kota				
389	131	7357759660300063	NEHEMIA GOL : III/a TUNJANGAN : Rp. 2,543,500	SD NEGERI 22 KP ARAK	BRI No Rek. 347901023989530 a/n NEHEMIA
390	132	1655742648200002	NIKODIMUS GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,505,400	SD NEGERI 15 RIAM SEJAWAK	BRI No Rek. 030401012714536 a/n NIKODIMUS
391	133	2338762664200013	NORMADYA YOLANDA GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 07 RASAU	BRI No Rek. 347901024117534 a/n NORMADYA YOLANDA
392	134	3638757660300012	NURDIANA GOL : III/a TUNJANGAN : Rp. 2,543,500	SD NEGERI 06 NANGA MASAU	BRI No Rek. 347901023985536 a/n NURDIANA
393	135	2239755656300003	NURMAYANTI GOL : III/b TUNJANGAN : Rp. 2,570,200	SMP NEGERI 3 KAYAN HULU	BRI No Rek. 347901024114536 a/n NURMAYANTI
394	136	5247760662200003	OCTAVIANUS PIANTONO GOL : III/d TUNJANGAN : Rp. 2,880,100	SMP NEGERI 5 KETUNGAU HULU	BRI No Rek. 347901024251532 a/n OCTAVIANUS PIANTONO
395	137	7463744645200002	Paulus GOL : III/b TUNJANGAN : Rp. 2,734,600	SD NEGERI 16 NANGA RADE	BRI No Rek. 030401012944539 a/n PAULUS
396	138	3540763665200022	PAULUS GOL : III/c TUNJANGAN : Rp. 2,678,900	SMP NEGERI 7 SATAP KAYAN HULU	BRI No Rek. 347901023894531 a/n PAULUS S.PD
397	139	3943747650200002	Paulus GOL : III/d TUNJANGAN : Rp. 3,160,900	SD NEGERI 26 NANGA TAMPANG	BRI No Rek. 347901024024537 a/n PAULUS
398	140	3542760664110013	PAULUS CUAN GOL : III/c TUNJANGAN : Rp. 2,678,900	SMP NEGERI 3 KETUNGAU HULU	BRI No Rek. 030401012937532 a/n PAULUS CUAN,S.PD
399	141	6739761664200012	PETRUS BERUCAP GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SMP NEGERI 3 KETUNGAU HULU	BRI No Rek. 347901024038536 a/n PETRUS.BERUCAP,MA
400	142	5733742647200012	POMPUNG GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,398,400	SD NEGERI 29 MENGIRAI	BRI No Rek. 030401012941531
401	143	8048746650300013	RADIANA BOIT GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 19 SAKI	BRI No Rek. 347901024342537 a/n RADIANA BOIT

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU DI DAERAH KHUSUS
 JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2015 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kab/Kota : Kabupaten Sintang

No.		NUPTK	NAMA GURU	UNIT KERJA	NO REK. BANK
prov	kab kota				
402	144	3355743648200003	RAFAEL UNTUNG GOL : IIIb TUNJANGAN : Rp. 2,651,100	SD NEGERI 17 NANGA RIYOI	BRI No Rek. 347901023821538 a/n RAFAEL UNTUNG
403	145	2447740646200002	RAMLI GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,729,700	SD NEGERI 15 RIAM SEJAWAK	BTI No Rek. 030401009774539 a/n RAMLI
404	146	2442745650200003	RATNA JUITA, A.Ma GOL : IIIb TUNJANGAN : Rp. 2,415,600	SD NEGERI 15 RIAM SEJAWAK	BRI No Rek. 347901024197534 a/n RATNA JUITAA.MA
405	147	1546746651300003	REDA GOL : III/c TUNJANGAN : Rp. 2,850,300	SD NEGERI 22 SEI KELUKAI	BRI No Rek. 030401012962537 a/n REDA
406	148	5140763665300073	RENA MURNI GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 17 NANGA ABAI	BRI No Rek. 347901024118530 a/n RENA MURNI
407	149	7842749652200032	RINSI GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 22 KP APAK	BRI No Rek. 347901024079532 a/n RINSI
408	150	9544743647300063	Rita Urep GOL : III/c TUNJANGAN : Rp. 2,850,300	SD NEGERI 23 JELUNDUNG	BRI No Rek. 347901024006539 a/n RITA UREP
409	151	3837736641200002	Robin Sukadir S. GOL : III/b TUNJANGAN : Rp. 3,001,200	SD NEGERI 15 MERAH ARAI	BRI No Rek. 030401009785530 a/n RIBIN SUKADIR SURUNG
410	152	5636749651300072	ROSMITA GOL : III/b TUNJANGAN : Rp. 2,651,100	SD NEGERI 18 MELINGKAT	BRI No Rek. 030401013004536 a/n ROSMITA, A.MA.
411	153	1147758660300113	RUBIAH GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SMP NEGERI 2 KETUNGAU HULU	BRI No Rek. 347901023913539 a/n RUBIAH
412	154	5055750652200003	RUSIJAB GOL : III/d TUNJANGAN : Rp. 2,970,800	SMP NEGERI 2 KETUNGAU HULU	BRI No Rek. 030401013002534 a/n RUSIJAB
413	155	7840758659300092	Rusmiyati, S.Th GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SMP NEGERI 5 KAYAN HILIR	BRI No Rek. 347901024062535 a/n RUSMIYATI
414	156	5458743645300002	Salbia GOL : III/c TUNJANGAN : Rp. 3,328,300	SD NEGERI 22 LANJAU	BRI No Rek. 030401013076533 a/n SALBIA

**DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU DI DAERAH KHUSUS
 JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2015 PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Kab/Kota : Kabupaten Sintang

No.		NUPTK	NAMA GURU	UNIT KERJA	NO REK. BANK
prov	kab kota				
415	157	5348752654200033	SAMSUL FURKAN GOL : III/c TUNJANGAN : Rp. 2,517,800	SMP NEGERI 3 KAYAN HULU	BRJ No Rek. 347901024261537 a/n SAMSUL FURKAN
416	158	1439741643200043	SANADI GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,729,700	SMP NEGERI 3 KAYAN HULU	BRJ No Rek. 030401009662538 a/n SANADI
417	159	5035748651200003	SARJONO GOL : III/b TUNJANGAN : Rp. 2,651,100	SD NEGERI 19 SUNGAI KELIK	BRJ No Rek. 030401013075537 a/n SARJONO
418	160	8262740643200013	Satuk GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,847,200	SD NEGERI 23 JELUNDUNG	BRJ No Rek. 347901023555535 a/n SATUK
419	161	8647736640200002	SAWABI GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 4,222,300	SD NEGERI 07 RASAU	BRJ No Rek. 030401009748538 a/n SAWABI
420	162	4140755657210103	SILAWATI GOL : III/b TUNJANGAN : Rp. 2,491,700	SMP NEGERI 5 KETUNGAU HULU	BRJ No Rek. 347901024130532 a/n SILAWATI
421	163	5741764667200002	Solomo GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 11 TANAH MERAH	BRJ No Rek. 347901023844536 a/n SOLOMO
422	164	5852753656200022	SONI, S.Pd.SD GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 26 MERAKO	BRJ No Rek. 347901024188535 a/n SONI S.Pd.SD
423	165	7048760661300113	Sri Armita, S.Pd GOL : III/b TUNJANGAN : Rp. 2,570,200	SMP NEGERI 5 KAYAN HILIR	BRJ No Rek. 030401013144530 a/n SRI ARMITA, S.PD
424	166	2834758660300082	Sri Kumalasari GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 29 NAGKAK LESTARI	BRJ No Rek. 347901024274530 a/n SRI KUMALASARI
425	167	0233757659200043	STEPHANUS RORIMPANI GOL : III/c TUNJANGAN : Rp. 2,678,900	SMP NEGERI 3 KETUNGAU HULU	BRJ No Rek. 030401013137533 a/n STEPHANUS RORIMPANI
426	168	5947762664200052	SUGIAN GOL : II/c TUNJANGAN : Rp. 2,269,800	SD NEGERI 04 BUNTUT PIMPIN	BRJ No Rek. 347901024198530 a/n SUGIAN
427	169	3342750652200003	SUHANDA GOL : III/b TUNJANGAN : Rp. 3,095,700	SD NEGERI 12 SEPAN MENGARET	BRJ No Rek. 030401012215532 a/n SUHANDA

**DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU DI DAERAH KHUSUS
JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2015 PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Kab/Kota : Kabupaten Sintang

No.		NUPTK	NAMA GURU	UNIT KERJA	NO REK. BANK
prov	kab kota				
428	170	1140743645300013	SULASTRI GOL : III/d TUNJANGAN : Rp. 3,160,900	SD NEGERI 22 KP ARAK	BRI No Rek. 347901023848530 a/n SULASTRI
429	171	1953761664300002	SUMIATI GOL : III/a TUNJANGAN : Rp. 2,317,600	SD NEGERI 13 TAHAI	BRI No Rek. 030401013167538 a/n SUMIATI
430	172	5648746648300052	SUPRIYATNI GOL : III/d TUNJANGAN : Rp. 3,363,200	SD NEGERI 04 MELINGKAT	BRI No Rek. 030401013174535 a/n SUPRIYATNI
431	173	2448750653300012	SUTINAH GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SMP NEGERI 2 KETUNGAU HULU	BRI No Rek. 347901024237538 a/n SUTINAH
432	174	7242738640200053	Suwardi GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 4,222,300	SD NEGERI 08 LINTANG TAMBUK	BRI No Rek. 030401012313534 a/n SUWARDI
433	175	1136756659200003	TALID GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 04 MELINGKAT	BRI No Rek. 347901023795533 a/n TALID
434	176	4262765666300023	TEMY ASTATI GOL : III/a TUNJANGAN : Rp. 2,390,600	SD NEGERI 12 SEPAN MENGARET	BRI No Rek. 030401013043530 a/n TEMY ASTATI
435	177	2048757659200033	Terajan GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 19 RUHAN	BRI No Rek. 347901024056534 a/n TERAJAN
436	178	1552738645200003	THOMAS SEDAU GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 4,093,300	SD NEGERI 02 JASA	BRI No Rek. 030401009734539 a/n THOMAS SEDAU
437	179	5149741643200003	TILTAYASA GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,847,200	SD NEGERI 02 JASA	BRI No Rek. 030401009687538 a/n TILTAYASA
438	180	1235753657200003	TINUS. Spd.SD GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 13 LUJUK	BRI No Rek. 347901024136538 a/n TINUS
439	181	2046761664300003	TITI SEMANTI GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 22 SEI KELUKAI	BRI No Rek. 347901024120537 a/n TITI SEMANTI
440	182	1850761666300002	TOKOK GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 19 SAKE	BRI No Rek. 347901024349539 a/n TOKOK

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR
NOMOR 0007.13/C5.6/KH/P/2015

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU DI DAERAH KHUSUS
JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2015 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kab/Kota : Kabupaten Sintang

No.		NUPTK	NAMA GURU	UNIT KERJA	NO REK. BANK
prov	kab kota				
441	183	1156745651200003	TOMSON GOL : III/b TUNJANGAN : Rp. 2,651,100	SD NEGERI 22 SEI KELUKAI	BRI No Rek. 030401012837538 a/n TOMSON
442	184	1555752653300003	TUNDAN DARMIATY, A.Ma.Pd GOL : III/b TUNJANGAN : Rp. 2,246,200	SD NEGERI 26 MERAKO	BRI No Rek. 347901023883530 a/n TUNDAN DARMIATY A.MA
443	185	2547768669200002	Tunjung GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 19 RUHAN	BRI No Rek. 347901024090538 a/n TUNJUNG
444	186	6742744646200062	Urbanus Watu GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,505,400	SD NEGERI 11 TANAH MERAH	BRI No Rek. 030401009908536 a/n URBANUS WATU
445	187	3359751653300053	VALENTINA GANI GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SMP NEGERI 5 KETUNGAU HULU	BRI No Rek. 347901023814531 a/n VALENTINA GANI
446	188	8736735637300032	Veronika Dabut GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 4,093,300	SD NEGERI 22 LANJAU	BRI No Rek. 347901024270536 a/n VERONIKA DABUT
447	189	6762753655300042	VERONIKA SANTEN GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 07 KEPALA JUNGAI	BRI No Rek. 347901024312532 a/n VERONIKA SANTEN
448	190	0151756658200033	WAHIDIN GOL : III/b TUNJANGAN : Rp. 2,651,100	SD NEGERI 18 NANGA TORAN	BRI No Rek. 347901024262533 a/n WAHIDIN A.MA
449	191	1242760664200003	WELLYNONO GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 19 SUNGAI KELIK	BRI No Rek. 347901024249535 a/n WELLYNONO
450	192	5443764665210083	WIHILMA WIWIN GOL : III/a TUNJANGAN : Rp. 2,543,500	SD NEGERI 28 TANJUNG MIRU	BRI No Rek. 347901024323533 a/n WIHILMA WIWIN
451	193	0250750653200023	Wilson GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 29 NAGKAK LESTARI	BRI No Rek. 347901023849536 a/n WILSON
452	194	1946753658300002	WINARTI NELLY, A.Ma GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 26 MERAKO	BRI No Rek. 347901024016534 a/n WINARTI NELLY A.MA
453	195	0548741644300022	Y.SANDOAN GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,968,300	SD NEGERI 12 MERAHAU	BRI No Rek. 347901023562532 a/n Y SANDOAN

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU DI DAERAH KHUSUS
 JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2015 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kab/Kota : Kabupaten Sintang

No.		NUPTK	NAMA GURU	UNIT KERJA	NO REK. BANK
prov	kab kota				
454	196	2256746649200003	YAHIN GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 4,222,300	SD NEGERI 06 NANGA MASAU	BRI No Rek. 347901024153530 a/n YAHIN
455	197	1548758659200002	Yakobus Bigin GOL : III/c TUNJANGAN : Rp. 2,850,300	SMP NEGERI 6 TEMPUNAK	BRI No Rek. 347901023495531 a/n YAKOBUS BIGIN
456	198	1448748652300003	YANTI GOL : III/c TUNJANGAN : Rp. 2,341,300	SD NEGERI 17 NANGA RIYOI	BRI No Rek. 347901024282533 a/n YANTI
457	199	8955747649200032	YANTO SAYAN GOL : III/d TUNJANGAN : Rp. 3,363,200	SD NEGERI 19 SAKE	BRI No Rek. 347901024236532 a/n YANTO SAYAN S.PD.SD
458	200	3539762663300082	YOHANA ANA GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 26 MERAKO	BRI No Rek. 347901024048531 a/n YOHANA ANA
459	201	2260744647200003	YOHANES GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,729,700	SD NEGERI 10 RIAM PANJANG	BRI No Rek. 030401012805531 a/n YOHANES
460	202	1550744649200003	YOSEF RAHUN GOL : III/d TUNJANGAN : Rp. 3,064,400	SD NEGERI 17 NANGA RIYOI	BRI No Rek. 347901023833535 a/n YOSEF RAHUN
461	203	4434762664300073	YULIANA GOL : III/c TUNJANGAN : Rp. 2,678,900	SMP NEGERI 3 KETUNGAU HULU	BRI No Rek. 030401012793530 a/n YULIANA, S.PD
462	204	1042763665300103	YULIANA BUCANG GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 19 SAKE	BRI No Rek. 347901024162539 a/n YULIANA BUCANG
463	205	1439769670110012	YUNUS BINUS GOL : TUNJANGAN : Rp. 1,500,000	SD NEGERI 13 LUJUK	BRI No Rek. 347901024080533 a/n YUNUS BINUS
464	206	8857748651200042	YUSTINUS GOL : IV/a TUNJANGAN : Rp. 3,505,400	SD NEGERI 07 KEPALA JUNGAI	BRI No Rek. 347901023368530 a/n YUSTINUS



DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR,
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,

SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D
NIP 18590601 198503 1 002

